



Laporan Tahunan Annual Report **2014**

Menjadi Badan
Klasifikasi Profesional
Terkemuka dalam
rangka Membangun
Industri Maritim Asia

Becoming a
Leading Professional
Classification Society
that Promotes the Development
of the Maritime Industry of Asia



PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)



50 TAHUN BKI

Pada tanggal 1 Juli 2014, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) merayakan ulang tahun ke 50. Perayaan “usia emas” itu tentu memiliki arti khusus bagi badan klasifikasi ini. Akan tetapi, “usia emas” BKI pun menandai kesinambungan mengejar cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 1 Juli 1964, para pemimpin bangsa dan negara melihat keutamaan kelas bagi kemajuan industri perkapalan nasional dalam rangka menegaskan kedaulatan Indonesia.

Lima puluh tahun kemudian, para pemimpin bangsa dan negara kembali menegaskan harapan untuk memperjuangkan keutamaan kelas tersebut.

Laporan Tahunan PT Biro Klasifikasi (Persero) 2014 menjelaskan bagaimana kami berupaya menjawab harapan itu.

50 YEARS OF BKI

On 1 July 2014, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) commemorated its 50th anniversary. The ‘golden year’ has obviously a special meaning for this classification society. Nevertheless, the ‘golden year’ of BKI also reflects the continuing aspirations of an independent Indonesia.

On 1 July 1964, leaders of the nation-state were well aware of the importance of class in the development of a sovereign national shipbuilding industry.

Fifty years on, leaders of the nation-state restated the hope to uphold the importance of class.

The 2014 annual report of PT Biro Klasifikasi (Persero) explains how we intend to answer that hope.

Menjadi Badan Klasifikasi Profesional Terkemuka Dalam Rangka Membangun Industri Maritim Asia

Becoming a Leading Professional Classification Society that Promotes the Development of the Maritime Industry of Asia

Kegiatan usaha BKI bermanfaat dalam penerapan standar nasional, sehingga industri perkapalan dapat mencapai *economics of scale* yang tinggi, serta industri pendukungnya memperoleh tingkat kepastian yang tinggi tatkala bertransaksi di dalam bidang perkapalan, pelayaran, serta industri yang berkaitan dengan badan apung lainnya.

Kegiatan usaha inti BKI adalah melakukan klasifikasi kapal dan kelengkapannya sesuai aturan dan prosedur yang dikembangkan oleh BKI sebagai badan klasifikasi nasional yang berdaulat. Klasifikasi bertujuan memberikan kepastian tentang kondisi kapal kepada para pemangku kepentingan, mulai dari pemilik kapal dan perusahaan pelayaran hingga industri asuransi dan perbankan.

Terkait dengan klasifikasi, BKI juga melakukan kegiatan usaha statutoria, yaitu memeriksa kesesuaian kapal dan badan apung lainnya dengan ketentuan tertentu, umumnya berupa konvensi yang diterbitkan oleh *International Maritime Organization* (IMO) dan ketentuan yang dikembangkan oleh pemerintahan negara anggota IMO.

Di samping klasifikasi dan statutoria, BKI juga mengembangkan usaha jasa konsultansi non klasifikasi. Jasa ini mencakup independent assurance bagi industri perkapalan dan usaha penunjangnya, industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar, serta aneka industri, dan juga industri Migas, geotermal dan energi terbarukan serta usaha penunjangnya.

BKI diakui kompetensinya dalam bidang klasifikasi dan non klasifikasi, serta mendapat otorisasi dari pemerintahan dalam bidang statutoria. Selain itu, BKI juga bekerja sama dengan badan klasifikasi asing yang beroperasi di Indonesia serta menjadi asosiasi badan klasifikasi internasional. Untuk tahun 2015, BKI bahkan memimpin asosiasi badan klasifikasi *Asia Association of Asian Classification Societies* (ACS).

BKI's business activities sustain the implementation of national standards, so that the shipbuilding industry may reach high economics of scale, and the supporting industries may work with a high level of certainty when transacting in the field of shipbuilding, shipping as well as industries that are related to other floating bodies.

The main business activity of BKI is the classification of ships and components according to rules and procedures that have been formulated by BKI as a sovereign national classification society. Classification aims to provide certainty about ship conditions to stakeholders that range from shipowners and shippers to insurance and banking industries.

Related to classification, BKI also conducts statutory business activities, namely surveying the compliance of ships and other floating bodies towards certain statutes, mainly conventions published by the International Maritime Organization (IMO) and rules of national administrations of IMO country members.

In addition to classification and statutory, BKI also develops a non-classification service business. The services include independent assurance for shipbuilding industries and their supporting businesses, chemical industries, machine and metal industries, various industries, and also oil & gas, geothermal, and renewable energy industries.

BKI's competence in the fields of classification and non-classification are acknowledge, and BKI also has received authorization by country administrations in the field of statutory. Furthermore, BKI also collaborates with foreign classification societies that operate in Indonesia and is a member of international classification society associations. For 2015, BKI is the leader of the Association of Asian Classification Societies (ACS).

Daftar Isi contents



KILAS KINERJA 2014

PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2014

- 06. Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
- 08. Peristiwa Penting 2014
Highlights in 2014

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

- 14. Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners
- 22. Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners
- 26. Laporan Direksi
Report of the Board of Directors
- 28. Profil Direksi
Profile of the Board of Directors
- 38. Rencana Strategis 2015-2019
Strategic Plan 2015-2019
- 31. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan
Responsibility Annual Report

PROFIL KORPORASI

CORPORATE PROFILE

- 48. Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of the Company
- 49. Kegiatan Usaha
Business Activities
- 52. Struktur Organisasi
Organizational Structures
- 54. Visi dan Misi Perusahaan
Corporate Vision and Mission
- 44. Lambang Perusahaan
Company Emblem

- 45. Lingkup Kegiatan Usaha
Scope of Business
- 56. Sumber Daya Manusia
Human Resources
- 61. Teknologi
Technology
- 62. Riset dan Pengembangan
Research and Development
- 63. Pengembangan Teknik
Technical Development
- 63. Seminar
Seminar
- 64. Jaringan Kerjasama
Partnership Networking
- 66. Pemegang Saham
Shareholder
- 66. Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi,
Perusahaan Ventura
Subsidiary, Associated Company, Venture
Capital Company
- 66. Kronologi Pencatatan Saham dan Efek
Lainnya
Chronology of Listing of Shares or Other
Securities
- 66. Pemeringkat Efek, Lembaga dan atau
Profesi Penunjang Pasar Modal
Securities Rating Agency, Capital Market
Support Institution or Professional
- 67. Pejabat Senior Kantor Pusat
Head Office Senior Officials
- 68. Alamat Kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia
(Persero)
Offices Address of PT Biro Klasifikasi
Indonesia (Persero)



ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

- 74. Tinjauan Operasi
Review of Operations
- 77. Analisis Kinerja Keuangan
Analysis of Financial Performance
- 77. Prospek Usaha
Business Prospects
- 82. Perbandingan Target dan Realisasi
Target vs Realization Comparison
- 83. Target/Proyeksi 2015
2015 Targets/Projections
- 84. Pemasaran
Marketing
- 86. Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Payout
- 86. Dana Hasil Penawaran Umum
Proceeds of Public Offering
- 87. Informasi Material
Material Information

TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

- 88. Pendahuluan
Introduction
- 89. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
- 91. Dewan Komisaris
The Board of Commissioners
- 97. Direksi
Board of Directors
- 105. Komite Audit
Audit Committee
- 108. Komite Investasi (Pengembangan Usaha)
Investment (Business Development) Committee
- 111. Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 111. Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

- 113. Satuan Pengawas Intern
Audit Internal
- 114. Sistem Manajemen Risiko
Management Risk System
- 117. Analisis dan Evaluasi Risiko
Analysis and Evaluation Risk
- 122. Divisi Manajemen Risiko
Risk Management Division
- 122. Sistem Manajemen Mutu
Quality Management System
- 123. Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction
- 123. Perkara Penting
Material Legal Cases
- 124. Sanksi Administratif
Administrative Sanctions
- 124. Kode Etik dan Budaya Perusahaan
Code of Ethics and Corporate Culture
- 124. Integritas dalam Berusaha
Business Integrity
- 125. Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi
Corporate Data and Information Confidentiality
- 125. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi
False Statements, False Claims, and Conspiracy

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- 131. Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan
Health, Safety and Environment

LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENT

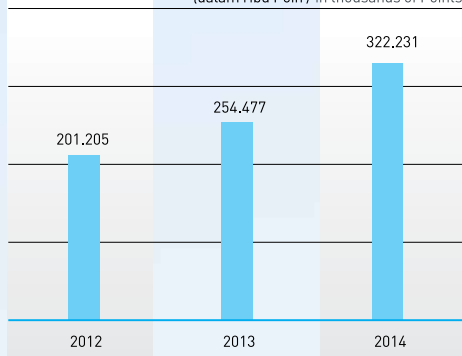
Ikhtisar Keuangan 2014

Financial Highlights 2014

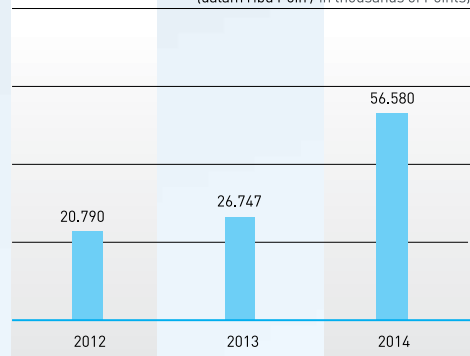
Hasil Usaha / Operating Income	2014	2013	2012
Pendapatan / Revenues	Rp756.660.228.022	Rp555.197.173.704	Rp419.176.067.983
Laba bruto/ Gross Profit	Rp588.868.187.686	Rp451.623.437.601	Rp342.649.168.390
Laba Usaha / Operating Income	Rp194.690.752.734	Rp136.165.167.853	Rp88.311.544.402
Laba Bersih / Net Income	145.169.888.120	105.114.829.743	67.438.219.802
Laba per saham / Earnings Per Share			
Posisi Keuangan / Financial Position	2014	2013	2012
Jumlah Aset / Total Assets	Rp597.192.959.651	Rp405.459.785.392	Rp304.180.086.153
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	Rp137.912.877.956	Rp76.861.674.701	Rp71.814.760.042
Jumlah Ekuitas / Equity	Rp459.280.081.695	R328.598.110.691	Rp304.180.086.153
Jumlah Investasi pada Entitas / Investment in Associated Entities	–	–	
Rasio Keuangan / Financial Ratio	2014	2013	2012
Likuiditas / Liquidity			
Current Ratio	376,04%	436,73%	308,94%
Acid Test Ratio	376,04%	467,73%	308,94%
Cash Ratio	143,34%	170,16%	113,65%
Working Capital to Asset Ratio	55,97%	52,19%	41,36%
Solvabilitas / Solvency			
Total Debt to Equity Ratio	30,03%	23,35%	30,91%
Operating Income Ratio	32,60%	24,53%	21,07%
Operating Ratio	74,27%	75,47%	78,93%
Gross Operating Ratio	77,82%	81,34%	81,74%
Net Profit Margin Ratio	26,36%	26,11%	22,53%
Return on Investment Ratio	36,51%	38,19%	37,88%
Return on Equity Ratio	31,79%	32,11%	40,89%
Aktivitas / Activity			
Total Assets Turn Over	1,29X	1,37X	1,61X
Working Capital Turn Over	2,26X	2,62X	3,33X
Receivable Turn Over	3,24X	5,01X	5,14X
Collection Period	113 Hari	104 Hari	96 Hari
Equity to Total Assets Ratio	52,15%	81,04%	76,39%

Produksi Klas Tunggal (Single Class Production)

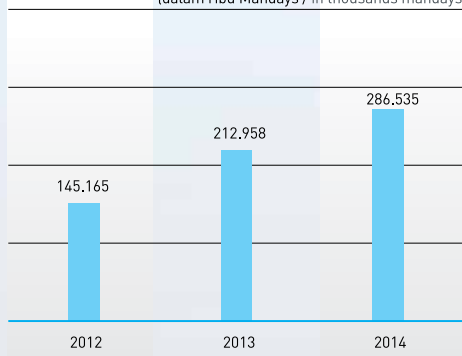
(dalam ribu Poin / in thousands of Points)

**Produksi Kelas Ganda (Dual Class Production)**

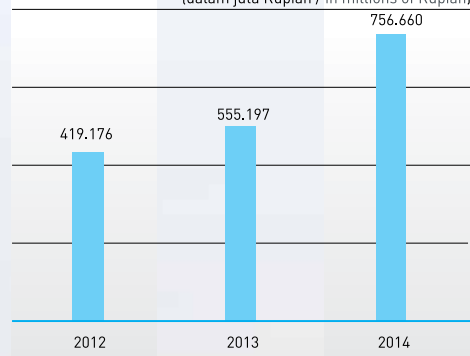
(dalam ribu Poin / in thousands of Points)

**Produksi Marine & Industrial (Marine & Industrial Production)**

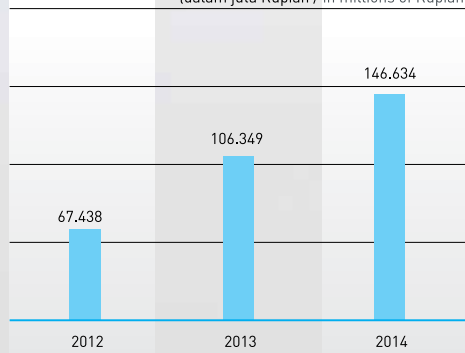
(dalam ribu Mandays / in thousands mandays)

**Pendapatan (Revenue)**

(dalam juta Rupiah / in millions of Rupiah)

**Laba Komprehensif (Comprehensive Profit)**

(dalam juta Rupiah / in millions of Rupiah)



Pristiwa Penting 2014 Highlights in 2014

1 Kunjungan Chairman IACS.

Direksi BKI menyambut kedatangan Chairman/Ketua IACS Roberto Cazzulo yang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. Dalam kesempatan itu Chairman IACS mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BKI berkaitan dengan proses mendaftar sebagai anggota *International Association of Classification Societies* (IACS).

Visit of IACS Chairman.

The Board of Directors of BKI welcomed IACS' Chairman Roberto Cazzulo during his official visit to Jakarta. Chairman Cazzulo appreciated efforts made by BKI in the process of becoming a member of the International Association of Classification Societies (IACS).



2 Menandatangani Nota Kesepahaman dengan DNV GL Maritime Academy, Singapura.

Direktur Utama BKI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktur DNV GL Maritime Academy Singapura untuk kerjasama pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Signing an MOU with the DNV GL Maritime Academy of Singapore.

The President Director of BKI signed an MOU with the Director of the DNV GL Maritime Academy Singapore on the cooperation in the field of human resource education and training.

3 Sosialisasi Peraturan Dirjen Perhubungan Laut Nomor HK.103 tentang Penedokan (Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia.

Biro Klasifikasi Indonesia mendukung program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R.I. dalam melakukan sosialisasi peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penedokan (Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia yang diselenggarakan di Bali, Batam, Balikpapan, Makassar, dan Jakarta.

Socialization of the Regulation of the Director General of Sea Transportation No. HK.103 on Docking of Indonesian-flagged ships.

Biro Klasifikasi Indonesia supports the program of the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia by socializing the Regulation of the Director General of Sea Transportation on Docking of Indonesian-flagged ships in Bali, Batam, Balikpapan, Makassar, and Jakarta.



4 Sosialisasi dan ramah-tamah dengan Pengurus DPP dan anggota INSA.

Dalam upaya meningkatkan sinergi dan pelayanan kepada para pemakai jasa, BKI secara berkala menyelenggarakan acara sosialisasi dan ramah-tamah dengan jajaran pengurus dan anggota *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA).

Meet-and-greet with the officers and members of INSA.

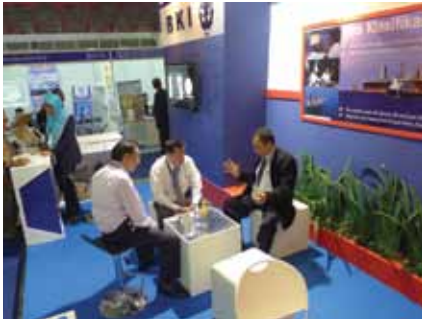
To enhance synergy with and services to customers, BKI regularly conducts meet-and-greet events with officers and members of the Indonesian National Shipowners' Association (INSA).

5 Berpartisipasi dalam Konvensi Nasional Divisi Penunjang Operasi SKK Migas 2014.

Biro Klasifikasi Indonesia berperan aktif menjaga dan meningkatkan aspek keselamatan pengoperasian kapal-kapal nasional yang digunakan di area operasi migas.

Participation in the 2014 National Convention of the SKK Migas Supporting Operation Division.

Biro Klasifikasi is actively participating in the enhancement of the safety aspect of national ships that are operating in oil and gas operational areas.



6 Berpartisipasi dalam pameran INAMARINE 2014.

Biro Klasifikasi Indonesia berpartisipasi dalam acara pameran INAMARINE 2014 untuk memperluas jangkauan pasarnya khususnya dalam bidang sertifikasi material dan komponen dari pabrikan mancanegara yang akan digunakan dalam pembangunan dan perbaikan kapal-kapal Klas BKI.

Participation in the 2014 INAMARINE exhibition.

Biro Klasifikasi participated in the 2014 INAMARINE expo to widen its reach in the market, particularly in the field of imported material and component certification that are used in the building and reparation of BKI Class ships.

7 Menyelenggarakan ACS Seminar on Shipping and Shipbuilding 2014.

BKI menjadi tuan rumah penyelenggaraan ACS Seminar on Shipping and Shipbuilding 2014 yang menghadirkan pembicara-pembicara ahli dari badan-badan klasifikasi anggota Asosiasi Badan Klasifikasi Asia (ACS) yang terdiri dari ClassNK, KR, CCS, IRS, VR, dan BKI.

Holding the 2014 ACS Seminar on Shipping and Shipbuilding.

BKI was the host of the 2014 ACS Seminar on Shipping and Shipbuilding that featured experts from classification societies that are members of the Asian Association of Classification Societies (ACS), namely ClassNK, KR, CCS, IRS, VR, and BKI.



8 Memperingati "Ulang Tahun Emas - 50 Tahun BKI".

2014 adalah tahun yang penting dalam perjalanan sejarah BKI karena pada tanggal 1 Juli 2014 badan klasifikasi nasional Indonesia ini memasuki usianya yang ke 50 yang ditandai dengan berbagai kegiatan seperti:

- Pers Gathering dengan para jurnalis nasional terkemuka
- Memberikan santunan kepada anak yatim dari lingkungan sekitar kantor pusat BKI sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan
- Meresmikan penggunaan gedung Kantor Pusat baru BKI
- Menyelenggarakan acara syukuran sebagai Puncak Peringatan HUT ke 50 BKI
- Mengadakan acara Family Gathering yang diadakan dari dan untuk keluarga besar BKI

Commemorating the "Golden Year - 50 Years of BKI".

2014 was an important year in the history of BKI because on 1 July 2014 the national classification society of Indonesia entered its 50th year, which was commemorated with events such as:

- Press gathering with journalists of national media
- Distributing donations among orphans that live near to the headoffice of BKI as a sign of its corporate social responsibility
- Innaugurating the new headoffice building of BKI
- Conducting a commemoration ceremony for the 50th anniversary of BKI
- Conducting a family gathering for the larger family of BKI

Pristiwa Penting 2014 Highlights in 2014

9 Berpartisipasi sebagai pembicara dan peserta dalam RITECH Expo 2014.

Biro Klasifikasi Indonesia berperan aktif mendukung kegiatan Ritech Expo 2014 dengan membawakan topik Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Kapal.

Participating as speaker and participant of RITECH Expo 2014.

Biro Klasifikasi actively participated to support the Ritech Expo 2014 by speaking on Energy Efficiency and Reduction of Greenhouse Gas Emissions from Ships.



10 Menandatangani pembaruan kerjasama dengan TUV Nord.

Biro Klasifikasi Indonesia mengambil langkah strategis menjalin kemitraan dengan badan sertifikasi teknik Jerman TUV Nord untuk meningkatkan penetrasi pasar dan mengembangkan cakupan pelayan jasa bidang Konsultasi dan Supervisi.

Signing the renewal of cooperation with TUV Nord.

Biro Klasifikasi Indonesia made a strategic move by entering into a partnership with the technical certification body of Germany TUV Nord to deepen its market penetration and enlarging its service scope in the field of Consultancy and Supervision.

11 Menyelenggarakan RAKER dan TOMSI.

Biro Klasifikasi Indonesia secara berkala menyelenggarakan acara Rapat Kerja dan *Technical Operational Meeting for Surveyor and Inspector* (TOMSI) untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis korporasi dalam meningkatkan pelayanan dan menjawab tantangan pasar.

Conducting a Coordinating Meeting and TOMSI.

Biro Klasifikasi regularly conducts coordinating meetings and Technical Operational Meeting for Surveyors and Inspectors (TOMSI) to develop policies and corporate strategies in the course of increasing services and answering market challenges.



12 Menghadiri TMG ACS 2014.

Sebagai anggota Asosiasi Badan Klasifikasi Asia (*Asian Classification Societies/ACS*), BKI berperan aktif melalui berbagai kontribusinya dalam membahas dan merumuskan permasalahan teknis terkini bidang klasifikasi dan perlindungan lingkungan maritim bersama-sama anggota ACS lainnya seperti Class NK Jepang, KR Korea Selatan, CCS China, IRS India, dan VR Vietnam.

Attending the 2014 ACS TMG.

As a member of the Asian Association of Classification Societies (ACS), BKI actively contributes in the discussion and formulation of current technical matters in the field of classification and marine environmental protection, together with the other ACS members such as ClassNK of Japan, KR of South Korea, CCS of China, IRS of India, and VR of Vietnam.



13 Menerima kunjungan Direktur Industri Maritim, Kedingrintaraan, dan Alat Pertahanan.

Kementerian Perindustrian beserta staf. BKI menerima kunjungan Direktur dan Staf untuk membahas pengembangan standar komponen dan industri perkapalan nasional.

Welcoming the Director and staff of the Maritime, Aviation and Defense Industries of the Ministry of Industry.

BKI welcomed the Director and Staff to discuss the development of national ship component industrial standards.

14 Seminar BKI – Wartsila 2014.
Bekerjasama dengan pabrikan mesin kapal terkemuka Wartsila BKI menyelenggarakan acara seminar sehari berjudul “Menyongsong Era Gasifikasi di Dunia Maritim Indonesia”.

BKI-Wartsila 2014 Seminar.
Collaborating with the renowned producer of ship machines Wartsila, BKI held a one-day seminar with the title “Embracing the Gas-fueled Era of Indonesia’s Maritime World.”



15 Direktur Utama BKI dipilih sebagai Ketua ACS.
Para pimpinan badan klasifikasi Asia yang berkumpul di Kobe, Jepang dalam acara *ACS Executive Committee Meeting* ke 22 sepakat memilih Direktur Utama BKI Rudiyanto sebagai Chairman atau Ketua ACS untuk masa bakti dua tahun ke depan.

The President Director of BKI elected as Chairman of ACS.
The leaders of Asian classification societies gathered in Kobe, Japan, in the event of the 22nd ACS Executive Committee Meeting, and unanimously elected the President Director of BKI, Rudiyanto, as the Chairman of ACS for the next two years.



16 Acara Technical Talk The Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST) Indonesia.
BKI bekerjasama dengan IMarEST menggelar acara Bincang Teknik dengan menghadirkan pembicara Presiden IMarEST Richard Vie CEng, CMarEng, FIMarEST yang membawakan tema *The Design and Construction of a Modern Cruise Vessel*.

Technical Talk of the Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST) Indonesia.
Together with IMarEST, BKI held a technical talk that featured the President of IMarEST Richard Vie CEng, CMarEng, FIMarEST, who spoke about the Design and Construction of a Modern Cruise Vessel.

17 Menandatangani Nota Kesepahaman dengan EKONID, IMPC, dan TRID.
BKI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Perkumpulan Ekonomi Indonesia – Jerman (EKONID), IMPC, dan TUV Rheinland Indonesia berkaitan dengan Penyediaan Informasi tentang Kualifikasi, Pelatihan Teknikal dan Profesional, dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia.

Signing of the MOU with EKONID, IMPX, and TRID.
BKI signed an MOU with the Economic Indonesian-German Society of EKONID, IMPC, and TUV Rheinland Indonesia related to the supply of information about Human Resource Qualification, Technical and Professional Training, and Certification.



18 Biro Klasifikasi Indonesia mendapatkan penghargaan Investor Award 2014 dari Majalah Investor sebagai BUMN Terbaik 2014 Bidang Non Keuangan Sektor Jasa, Perdagangan, dan Pariwisata.

Biro Klasifikasi Indonesia received the 2014 Investor Award from Majalah Investor as the Best Non-Financial Sector of Service, Trading, and Tourism SOEs of 2014.

19 Berpartisipasi dalam pameran memperingati Hari Nusantara 2014.
Biro Klasifikasi Indonesia mendukung kebijakan Poros Maritim yang digagas Pemerintah antara lain dengan berpartisipasi mendukung penyelenggaraan peringatan Hari Nusantara 2014 yang diadakan di Kotabaru, Pulau Laut,

Kalimantan Selatan. **Participation in the commemoration of Hari Nusantara 2014.**
Biro Klasifikasi Indonesia supports the Government’s Maritime Axis policy by among others participating in the commemoration of Hari Nusantara 2014 that was held in Kotabaru, Pulau Laut, South Kalimantan.

Laporan Manajemen

Menuju Poros Maritim Dunia dalam Era Asia

Towards a Global Maritime
Axe in the Asian Era



Management Report



Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

Dalam rangka menuju badan klasifikasi kelas dunia, kita harus memperhatikan perkembangan lingkungan yang terjadi. Dalam hal ini, patut kita mengingat bahwa semangat yang mendasari pembentukan BKI pada tahun 1964 adalah kebanggaan nasional. Sementara, pada tahun 2014, semangat tersebut direvitalisasi sebagai kedaulatan bangsa.

In the course of becoming a world-class classification society, we have to consider how the environment has changed throughout the years. Here, we have to remember that the founding spirit of BKI in 1964 was national pride. Meanwhile, in 2014, the spirit was revitalized and became national sovereignty.

Pendahuluan

Pemegang Saham yang kami hormati,

Tahun 2014 merupakan tahun yang bersejarah bagi BKI, karena tercapai usia ke 50 pada waktu Pemerintah Republik Indonesia kembali meengaskan pentingnya industri perkapalan dan pelayaran dalam pembangunan nasional.

Memasuki usia ke 50, BKI telah berkembang sebagai badan klasifikasi yang diakui secara internasional dan sebagai

Introduction

Dear Shareholders,

As BKI reached 50 in 2014, the Government of Indonesia started to revitalize the role of shipbuilding and shipping industries in national development. The year was pivotal in the history of BKI.

Reaching 50, BKI has developed both as an internationally recognized classification society and as healthy (AA) state-

Management Report



Sukatno, Komisaris Utama (President Commissioner)

perusahaan Persero yang sehat (AA). Pencapaian tersebut tentulah merupakan landasan yang baik untuk berkembang lebih lanjut.

Dalam rangka membangun visi tersebut, kita harus memperhatikan perkembangan lingkungan yang terjadi. Dalam hal ini, patut kita mengingat bahwa semangat yang mendasari pembentukan BKI pada tahun 1964 adalah kebanggaan nasional. Sementara, pada tahun 2014, semangat tersebut direvitalisasi sebagai kedaulatan bangsa.

owned enterprise. These achievements surely are a proper foundation to grow further.

Nevertheless, while developing the vision, we have to consider how the environment has changed throughout the years. Here, we have to remember that the founding spirit of BKI in 1964 was national pride. Meanwhile, in 2014, the spirit was revitalized and became national sovereignty.

Laporan Manajemen

Di dalam bidang usaha BKI, kedaulatan bukan berarti menutup mata terhadap standar internasional dan ukuran kinerja yang berlaku global, melainkan mengutamakan kebutuhan bangsa yang dilihat dalam perspektif anak bangsa.

Kebutuhan bangsa ini telah dirumuskan sebagai visi BKI di dalam Business Plan 2015-2019, yaitu: "Menjadi badan klasifikasi dan *independent assurance* berkelas dunia" — hanya dengan mencapai kelas dunia, BKI dapat berperan sebagai badan klasifikasi yang mengutamakan kebutuhan bangsa.

Business Plan

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran *Business Plan* 2009-2014, dapat disampaikan:

- secara rata-rata per tahun, pertumbuhan kapal terdaftar mencapai 14,08% dan pertumbuhan pendapatan mencapai 25,94%;
- adapun tingkat kesehatan perusahaan mencapai peringkat AA pada tahun 2014;
- sementara itu, kompetensi SDM telah meningkat secara signifikan, meskipun masih harus ditingkatkan lagi untuk mencapai level kompetensi global seperti yang ditargetkan; dan
- kepercayaan para pemangku kepentingan terjaga, akan tetapi BKI tetap berusaha untuk meningkatkan kepercayaan tersebut terutama dalam hal survei statutoria.

Dapat disimpulkan, bahwa dalam period 2009-2014, BKI telah tumbuh sebagai korporasi sehat yang mampu mengemban tugas klasifikasi dan statutoria di Indonesia. Akan tetapi, perlu saya sampaikan pula, lingkungan pun telah berkembang begitu rupa, sehingga BKI perlu meningkatkan performanya lagi, baik sebagai badan klasifikasi maupun sebagai korporasi.

Adapun *Business Plan* 2015-2019 secara singkat menyatakan: BKI akan melakukan intensifikasi jasa layanan klasifikasi serta peningkatan portofolio usaha non klasifikasi, didukung pembaharuan strategi dan budaya organisasi, transformasi SDM, peningkatan fungsi teknologi informasi, serta peningkatan riset dan pengembangan. Sementara, pendapatan diharapkan tumbuh hingga Rp 2,88 T pada tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 33%.

In the business field of BKI, sovereignty does not mean to isolate oneself towards international standards and globally accepted measurements of performance. It means prioritizing needs of the nation seen in the perspective of a national.

BKI has addressed the needs of the nation in its 2015-2019 Business Plan, formulated in the vision: "To become a world-class classification society and independent assurance body" — only by reaching world-class, BKI will be able to play its role as a classification society that prioritizes national needs.

Business Plan

Based on the evaluation of goals and targets of the 2009-2014 Business Plan, it is safe to say that:

- the annual average growth registered ships reached 14.08% and the annual average growth of revenues reached 25.94%;
- the company increased its health standard to AA in 2014;
- human resource competence increased significantly, even though it still has to improve in certain areas to reach the targeted global level of competence; and
- trust of stakeholders has been upheld, but BKI will still strive to improve the level of trust particularly in the statutory segment.

It can be concluded that in the periode of 2009-2014, BKI has grown as a healthy corporation that is able to carry the duties of classification and statutory in Indonesia. Nevertheless, I should add that the environment has also changed, so much so that BKI has still to improve its performance, both as a classification society and as a corporation.

In brief, the 2015-2019 Business states: BKI will intensify its classification services and enlarge its non-classification business portfolio, sustained by the renewal of its organizational strategy and culture, the transformation of its human resources, the enhancement of its information technology function, and the increase in research and development. Furthermore, revenues are expected to grow up to IDR 2.88 T by 2019, with an annual average growth rate of 33%.

Management Report

Kinerja Direksi

Perumusan Business Plan 2015-2019 tidak terlepas dari kinerja Direksi yang juga mendorong pengembangan strategi korporasi, bisnis, dan fungsional, serta struktur dan budaya organisasi yang baru.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga menghargai kemampuan Direksi dan seluruh jajaran BKI yang telah melakukan upaya maksimal (*best efforts*), sehingga BKI dapat mencapai target laba yang ditetapkan oleh Pemegang Saham, serta dapat secara konsisten mewujudkan arahan Dewan Komisaris untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Terkait dengan penerapan GCG ini, Dewan Komisaris secara konsisten telah mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan strategi usaha dan kebijakan operasional BKI, melalui rapat rutin seperti Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi, serta Rapat Organ Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Investasi & Pengembangan Usaha.

Berkat kinerja Direksi yang baik, kerja keras seluruh jajaran, serta penerapan GCG tersebut, BKI dapat meningkatkan nilai Pemegang Saham serta meningkatkan daya saing, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Pandangan tentang Prospek Usaha

Terkait dengan keberlanjutan peningkatan nilai Pemegang Saham dan daya saing Perseroan, Business Plan 2015-2019 mencanangkan target pertumbuhan rata-rata per tahun 29,95% untuk pendapatan kelas dan 35,75% untuk pendapatan non kelas, serta pertumbuhan rata-rata per tahun 29,97% untuk total aktiva dan 27,34% untuk ekuitas, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional berkisar antara 5,8% sampai 6,1%.

Dewan Komisaris memahami pada tahun 2015 tengah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada bisnis BKI. Akan tetapi, Dewan Komisaris berkeyakinan peluang dan prospek usaha yang telah dicanangkan Direksi dapat terwujud, berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh BKI, yaitu di antaranya: struktur permodalan dan kualitas pelayanan yang baik, di samping SDM yang terlatih serta jumlah dan tersebar nya kantor-kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia.

Performance of the Board of Directors

The formulation of the 2015 Business Plan is closely related to the performance of the BOD in terms of driving the development of corporate, business, and functional strategies, as well as the new organizational structure and culture.

Additionally, the Board of Commissioners also appreciates the best efforts of the BOD and all management levels of BKI, so that BKI was able to reached the level of profit that was targeted by the Shareholder, and consistently accomplished the BOC's directive to implement good corporate governance (GCG).

Related to the implementation of GCG, the BOC has consistently supervise and advised the implementation of BKI's business strategy and operational policies, through routine meetings such as BOC Meetings, Joint Meetings of the BOC with the BOD, and Meetings of the BOC Organs, i.e. the Audit Committee and the Investment & Business Development Committee.

Due to the good performance of the BOD, the hard work of all management levels, and the implementation of GCG, BKI was able to increase Shareholder value and to improve competitiveness, both at the national and the international level.

Review of the Business Prospect

In terms of sustainable growth of Shareholder value and the Company's competitiveness, the 2015-2019 Business Plan targets the average annual growth rate of 29.95% for classification revenues and 35.75% for non-classification revenues. It also states the average annual growth rate of 29.97% for total assets and 27.34% for equity, with the assumption that the national economy will grow at an average annual growth rate between 5.8% and 6.1%.

The BOC realizes that the deceleration of economic growth will affect the business of BKI in 2015. However, the BOC is confident that the business opportunities and prospects that have been put forward by the BOD can be realized, based on the competitive edges of BKI, which are: sound capital structure and service level, well-trained human resources, and the large number of branch offices that are spread across the whole of Indonesia.

Laporan Manajemen

Dalam kaitan dengan prospek usahanya, Dewan Komisaris memandang upaya Direksi untuk melakukan diversifikasi usaha di segmen non kelas dapat menjadi andalan untuk mencapai target usaha tahun 2015.

Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2014, Dewan Komisaris mengalami perubahan komposisi. Berdasarkan SK-12/MBU/2014 tanggal 15 Januari 2014, Bapak Machfud Sidik digantikan oleh Bapak Sukatno sebagai Komisaris Utama. Sementara itu, berdasarkan SK-93/MBU/2014 tanggal 30 April 2014, Bapak Faisal Halimi digantikan oleh Bapak Faisal Ahmad.

Adapun struktur Dewan Komisaris tetap sama, dengan satu Komisaris Utama dan tiga Komisaris, sehingga Dewan Komisaris BKI pada tahun 2014 adalah:

Komisaris Utama / President Commissioner	Sukatno
Komisaris / Commissioner	Erwin Rosmali
Komisaris / Commissioner	Minto Widodo
Komisaris / Commissioner	Faisal Ahmad

Atas nama Dewan Komisaris, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Machfud Sidik dan Bapak Faisal Halimi atas bimbingan dan nasehat yang diberikan kepada Direksi sepanjang masa tugasnya, serta atas kontribusi yang diberikan kepada BKI hingga akhir masa jabatannya.

Penutup

Akhir kata, dengan semangat mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta visi mencapai badan klasifikasi dan *independent assurance* kelas dunia, seluruh insan BKI bergerak maju untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Atas nama Dewan Komisaris, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungannya, kepada Direksi atas dedikasinya dan kepada seluruh jajaran BKI atas kerja keras dan kontribusinya. Selain itu, kepada seluruh Pemangku Kepentingan, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kerja samanya.

In particular, related to the business prospect, the BOC is of the opinion that the BOD's effort to diversify the business in the non-classification segment can become a cornerstone of the development towards 2015 business targets.

Komposisi Dewan Komisaris

In 2014, the BOC has changed its composition. Based on decision SK-12/MBU/2014 of 15 January 2014, Mr. Machfud Sidik has been replaced by Mr. Sukatno as the President Commissioner. Furthermore, based on SK-93/MBU/2014 of 30 April 2014, Mr. Faisal Halimi has been replaced by Mr. Faisal Achmad.

The structure of the BOC remained the same, with one President Commissioner and three members of the BOC, so that the Board of Commissioners of BKI in 2014 comprised:

On behalf of the BOC, I extend my gratitude to Mr. Machfud Sidik and Mr. Faisal Halimi for providing guidance and advice of the BOD throughout their terms of duty, and for the contributions given to BKI up to the end of their terms.

In Closing

Finally, with the spirit of realizing Indonesia as a Global Maritime Axis and the vision to become a world-class classification society and independent assurance body, all members of BKI are moving forward to continuously increase our service level.

On behalf of the Board of Commissioners, I would like to thank the Shareholder for its trust and support, the BOD for its dedication, and all management levels of BKI for their hard work and contributions. Furthermore, I would also like to thank the Stakeholders for their trust, support, and cooperation.

Management Report

Semoga BKI menjadi badan klasifikasi terkemuka yang dapat menegakkan kedaulatan bangsa dalam bidang maritim.

May BKI become a renown classification society that can uphold national sovereignty in the maritime world.



Sukatno

Komisaris Utama

President Commissioner

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Sukatno
Komisaris Utama
President Commissioner

Faisal Ahmad
Komisaris
Commissioner

Minto Widodo
Komisaris
Commissioner

Erwin Rosmali
Komisaris
Commissioner



Management Report



Laporan Manajemen

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Sukatno
Komisaris Utama
President Commissioner

Riwayat Jabatan:

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2014;

Pengalaman Kerja:

Direktur Sekolah Intelijen Maritim TNI-AL, Ketua Tim Pemeriksa (Auditor) di Kementerian Pertahanan & TNI, Pengajar Bidang Hankam di Lemhanas RI;

Latar Belakang Pendidikan:

Lulusan Akademi Angkatan Laut;

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Komisaris Utama BKI:

Keputusan Menteri BUMN No. SK-12/MBU/2014 tanggal 15 Januari 2014.

History of Position:

Held the position of President Commissioner since 2014;

Work Experience:

Director of School of Intelligence of the Indonesian Navy, Head of the Auditor Team at the Ministry of Defence & Armed Forces, Faculty in the field of Defence and Security at Lemhanas RI;

Educational Background:

Graduate of the Indonesian Naval Academy

**Legal Basis of Appointment as
the President Commissioner of BKI:**

Decision of the Minister of SOEs No. SK-12/MBU/2014 dated 15 January 2014.

Management Report



Minto Widodo
Komisaris
Commissioner

Riwayat Jabatan:

Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2013;

Pengalaman Kerja:

Kepala Pusat Sistem Informasi Keuangan Daerah (1996-2004), Sekretaris Bapeksta Keuangan (1996), Kementerian Keuangan (1981);

Latar Belakang Pendidikan:

MA (Ekonomi) Colorado State University, USA (1989), Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1981);

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Komisaris BKI:

Keputusan Menteri BUMN No. SK-322/MBU/2012 tanggal 11 September 2012 dan Keputusan Dewan Komisaris No. KU.001/Dekom.101/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.

History of Position:

Held the position of Commissioner since 2013;

Work Experience:

Head of the Centre of Regional Financial Information (1996-2004), Secretary of Bapeksta Keuangan (1996), Ministry of Finance (1981);

Educational Background:

MA (Economics) of the Colorado State University, USA (1989), BA (Economics) of Universitas Gadjah Mada (1981);

Legal Basis of Appointment as the Commissioner of BKI:

Decision of the Minister of SOEs No. SK322/MBU/2012 dated 11 September 2012 and Decision of the Board of Commissioners No. KU.001/Dekom.101/III/2013 dated 1 March 2013.

Laporan Manajemen

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Faisal Ahmad
Komisaris
Commissioner

Riwayat Jabatan:

Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2014;

Pengalaman Kerja:

Komisaris PT Rajawali I Surabaya (2012-2014), Kepala Bidang Usaha Industri Strategis Kementerian BUMN (2014-sekarang);

Latar Belakang Pendidikan:

Magister Manajemen Keuangan Universitas Bhayangkara, Jakarta (2008), Sarjana Manajemen Universitas Pancasila, Jakarta (1993);

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Komisaris BKI:

Keputusan Menteri BUMN No. SK-12/MBU/2014 tanggal 15 Januari 2014.

History of Position:

Held the position of Commissioner since 2014;

Work Experience:

Commissioner of PT Rajawali I Surabaya (2012-2014), Head of Strategic Industries Business Field, Ministry of SOEs (2014-now);

Educational Background:

Master of Management of Universitas Bhayangkara, Jakarta (2008), Bachelor of Management of Universitas Pancasila, Jakarta (1993);

Legal Basis of Appointment as the Commissioner of BKI:

Decision of the Minister of SOEs No. SK-12/MBU/2014 dated 15 January 2014.

Management Report



Erwin Rosmali
Komisaris
Commissioner

Riwayat Jabatan:

Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2013;

Pengalaman Kerja:

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;

Latar Belakang Pendidikan:

Lulusan Akademi Ilmu Pelayaran;

Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Komisaris BKI:

Keputusan Menteri BUMN No. SK-322/MBU/2012 tanggal 11 September 2012 dan Keputusan Dewan Komisaris No. KU.001/Dekom.101/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.

History of Position:

Held the position of Commissioner since 2013;

Work Experience:

Secretary of the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation;

Educational Background:

Graduate of Akademi Ilmu Pelayaran;

Legal Basis of Appointment as the Commissioner of BKI:

The Decision of the Minister of SOEs No. SK322/MBU/2012 dated 11 September 2012 and Decision of the Board of Commissioners No. KU.001/Dekom.101/III/2013 dated 1 March 2013.

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

BKI akan melakukan intensifikasi jasa layanan klasifikasi dan statutoria serta peningkatan portofolio usaha komersial.

BKI will intensify its classification and statutory services and increase its commercial segment portfolio.



Pemegang Saham yang Terhormat,

BKI menghadapi peralihan yang penting pada tahun 2014, dan dengan rasa syukur yang mendalam, atas nama Direksi, saya melaporkan bahwa Perseroan dapat menjalani peralihan ini dengan hasil yang baik.

Kinerja 2014

Berdasarkan evaluasi auditor independen Husni, Mucharam & Rasidi, BKI dapat mencapai tujuan dan target yang dianggarkan pada tahun 2014.

Dear Shareholders,

BKI faced a period of significant changes in 2014, and with deep gratitude, on behalf of the Board of Directors, I report that the Company managed to overcome this important period of change with flying colors.

Performance in 2014

Based on the evaluation of the independent auditor Husni, Mucharam & Rasidi, BKI has accomplished the goals and targets of 2014.

Management Report



Rudiyanto, Direktur Utama (President Director)

Realisasi pendapatan mencapai Rp 756,55 M dari target Rp 754,24 M. Realisasi laba komprehensif mencapai Rp 146,34 M dari target Rp 143,25 M. Lebih jauh, dalam hal tingkat kesehatan perusahaan, BKI mencapai skor 94,5 dan berada pada peringkat AAA sesuai yang ditargetkan.

Secara umum, KPI pun tercapai dengan rincian: keuangan dan pasar memperoleh skor 19,8; fokus pelanggan 24,0; produk dan proses 15,4; fokus tenaga kerja 24,0; dan kepemimpinan 16,8. Total skor KPI untuk tahun 2014 adalah 100.

Revenues reached IDR 756.55 B compared to the target of IDR 754.24 B. Comprehensive profit reached IDR 146.34 B compared to the target of IDR 143.25 B. Furthermore, in terms of corporate health, BKI has scored 94.5 and reached the targeted level of AAA.

KPIs have been reached: finance and market scored 19.8; customer focus 24.0; product and process 15.4; human resource focus 24.0; and leadership 16.8. The total KPI score for 2014 was 100.

Laporan Manajemen

Dari segi operasional, BKI mencapai target dan memperoleh peringkat A untuk pelayanan pengguna jasa, pelaksanaan penugasan pemerintah, serta peningkatan SDM.

Kemudian, dari segi jangkauan operasi, BKI dapat menjalankan 21.469 survei dari target 23.406 survei. Kendala yang dihadapi mencakup kekurangan tenaga surveyor specialist dan kesadaran pengguna jasa. Untuk mengatasinya, BKI mengadakan pelatihan dan kegiatan komunikasi perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan

Pada tahun 2014, seluruh jajaran BKI telah mensosialisasikan GCG Code untuk mempertahankan kejujuran, transparansi, independensi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan dalam proses kerja dan transaksi di lingkungan masing-masing.

Fungsi pengawasan dan audit telah berjalan dalam rangka mencegah tindakan ilegal dan pelanggaran norma, serta mendorong setiap insan BKI untuk senantiasa mematuhi peraturan-perundangan. Pada tahun 2014, semua unit kerja telah menindaklanjuti temuan auditor.

Dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian internal, Satuan Pengawas Intern BKI bekerja dengan jaminan independensi dan telah mengadakan audit operasional terhadap 18 unit produksi dan satu unit kerja pada tahun 2014.

Adapun untuk sistem manajemen mutu, BKI memiliki sistem manajemen yang melakukan audit sesuai persyaratan ISO 9001:2008. Pada tahun 2014, sistem manajemen melakukan audit internal terhadap 34 unit kerja dan audit eksternal pada bulan Juni, September dan Oktober.

In terms of operations, BKI has also reached targets and obtained A-levels for service level, implementation of government duties, and human resource improvement.

However, in terms of production reach, BKI was able to conduct 21,469 surveys of the targeted 23,406 surveys. One obstacle was the shortage of specialist surveyors and the awareness of customers. To overcome these hurdles, BKI has conducted trainings and corporate communication activities.

Corporate Governance

In 2014, all management levels of BKI have socialized the GCG Code to uphold honesty, transparency, independency, accountability, integrity, and fairness in work processes and transactions within their respective work environments.

Supervision and audit functions were implemented in the course of preventing illegal behavior and violations of norms, and to encourage all members of BKI to constantly obey rules and regulations. In 2014, all work units have followed up findings of the auditors.

To improve the internal control system, the Internal Control Unit of BKI has worked with guaranteed independency and have conducted operational audit at 18 production and work units throughout 2014.

Furthermore, in terms of quality management system, BKI has a management system that conducts audits based on the ISO 9001:2008 requirements. In 2014, the management system has conducted internal audits at 34 work units as well as external audits in June, September and October.

Management Report

Dalam segi manajemen risiko, BKI memiliki divisi manajemen risiko yang telah menyusun manual manajemen risiko dan telah merancang template kontrak kerja. Di samping itu, divisi ini juga telah melakukan analisis teknis keuangan.

Prospek Usaha

Didasari asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% dalam situasi keamanan dan perekonomian nasional yang stabil, dengan tingkat inflasi 4,4%, kenaikan harga BBM, listrik dan telekomunikasi 15%, nilai tukar (Rp/USD) Rp 11.900 dan suku bunga SPN tiga bulan 6,2%, serta tidak ada perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap penugasannya, Direksi berpendapat prospek usaha utama BKI untuk tahun 2015 tetap berada di bidang klasifikasi dan statutoria.

Indonesia memiliki 23.000 kapal register aktif dalam kategori wajib kelas (sumber: Ditkapel 2014) dan baru ada 10.513 kapal register aktif BKI (94,3% single class dan 5,7% dual class). Diperkirakan, dalam periode 2015-2019, akan ada penambahan 26 kapal perintis, 83 kapal kontainer, dan 500 kapal rakyat di Indonesia (sumber: Bappenas 2015, diolah).

Sementara itu, perusahaan pendukung implementasi program Tol Laut mencakup: 51 pemasok sukucadang maritim, 250 galangan kapal, 1.894 penyedia jasa maritim, dan 2.866 perusahaan pelayaran (sumber: Kemenhub, Kemenperin, INSA; diolah). Prospek usaha klasifikasi dan statutoria BKI untuk 2015 diperkirakan muncul terutama dari perusahaan yang telah menggunakan jasa BKI.

Adapun portofolio usaha komersil diharapkan akan tumbuh dari peningkatan jumlah pekerjaan baru dan konsumen layanan independent assurance marine baru. Dalam hal ini, prospek usaha diharapkan akan diperoleh sehubungan dengan adanya pengakuan dari SKK Migas, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Depnaker dan Kemenhub, serta pelanggan K3S yang belum mengenal jasa BKI.

In terms of risk management, BKI has a risk management division that has completed a risk management manual and has designed work contract templates. Additionally, this division has also conducted a technical finance analysis.

Business Prospects

Based on the assumptions that economic growth will reach 5.6% in a stable and safe environment and a stable national economy; the inflation rate will reach 4.4%; prices of fuel, electricity and telecommunication services will increase by 15%; an exchange rate (IDR/USD) of IDR 11,900 and three-monthly SPN interest rate of 6.2%; and that there will be no changes in government policies that significantly affect the implementation of BKI's duty; the Board of Directors believes that the main business prospects of BKI in 2015 will still be in the classification and statutory segment.

Indonesia has 23,000 mandatory class category, active, registered ships (source: Ditkapel 2014) and only 10,513 ships have been registered at BKI (94.3% single class and 5.7% dual class). It has been estimated that in the period of 2015-2019 there will be an addition of 26 perintis ships, 83 container vessels, and 500 kapal rakyat in Indonesia (source: Bappenas 2015, adjusted).

Meanwhile, companies that support the implementation of the Ocean Toll program comprise: 51 maritime sparepart suppliers, 250 ship yards, 1,894 maritime service providers, and 2,866 shipping companies (source: Kemenhub, Kemenperin, INSA; adjusted). Prospects for BKI's classification and statutory business are expected to come mainly from existing clients.

Nevertheless, the portofolio of the commercial segment is anticipated to grow in terms of new independent assurance marine contracts and customers. Particularly, business prospects are expected to materialize in relation with the recognition of SKK Migas, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Depnaker and Kemenhub, as well as K3S customers that are new to BKI.

Laporan Manajemen

Rencana Strategis

Sesuai Business Plan 2015-2019, BKI akan melakukan intensifikasi jasa layanan klasifikasi dan statutoria serta peningkatan portofolio usaha komersil. Untuk tahun 2015, segmen jasa klasifikasi dan statutoria masih menjadi andalan untuk memperoleh pendapatan dan laba usaha.

Adapun sasaran korporasi yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah:

- tercapainya kualitas pelayanan setara dengan standar internasional, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan dan pengakuan dari para pemangku kepentingan;
- tercapainya tambahan pelimpahan survei statutoria baik oleh Pemerintah Indonesia maupun dari negara lain;
- tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, dengan integritas dan komitmen kuat untuk bersaing secara global;
- tercapainya sistem manajemen dan organisasi yang sehat dan mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan karyawan;
- terlaksananya *assessment* oleh *Accredited Certification Body*, yaitu BSI-IACS dalam rangka menjadi anggota IACS; dan
- tercapainya pengembangan sistem teknologi informasi sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi pada lingkungan usaha BKI.

Implementasi rencana strategis ini tidak terlepas dari posisi BKI di industri dan pandangan pemangku kepentingan terhadap standar kelautan Indonesia. Untuk itu, BKI telah meningkatkan modal disetor dari Rp 45 M menjadi Rp 255 M, serta akan melakukan upaya sistematis untuk membawa *flag state* Indonesia ke dalam white list.

Komposisi Direksi

Pada tahun 2014, Direksi BKI tidak mengalami perubahan struktur ataupun komposisi.

Strategic Plan

In line with the 2015-2019 Business Plan, BKI will intensify its classification and statutory services and increase its commercial segment portfolio. For 2014, the classification and statutory segment will still remain the main source of revenue and operating income.

Corporate targets of 2015 include:

- achieving service quality equal to international standards, with the aim to improve the trust and recognition of stakeholders;
- increasing the number of statutory surveys commissioned by the Government of Indonesia and the governments of other countries;
- the availability of competent and professional human resources, with the integrity and commitment required to compete globally;
- developing a healthy management and organizational system that is able to improve both the productivity and the wellbeing of employees;
- accomplishing the assessment of an Accredited Certification Body, i.e. BSI-IACS, in the course of becoming a member of IACS; and
- developing the information system technology in accordance to the needs and technological advancement of BKI's business environment.

The implementation of this strategic plan is closely related to BKI's position within the industry and the perception of stakeholders of Indonesia's maritime standard. Therefore, BKI has increased its paid-in capital from IDR 45 B to IDR 255 B, and will conduct systematic efforts to bring Indonesia's flag state into the white list.

Composition of the Board of Directors

The Board of Director of BKI has changed neither in terms of structure nor composition in 2014.

Management Report

Penutup

Pada tahun akhir tahun 2015, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN menandai semakin terbukanya bidang usaha BKI. Persaingan global akan semakin intensif bahkan di tingkat lokal sekalipun.

Karena itu, Direksi menghargai dedikasi para pemangku kepentingan yang mendukung upaya BKI untuk menjadi badan klasifikasi profesional terkemuka dalam rangka membangun industri maritim di Asia.

Secara khusus, atas nama Direksi, saya mengucapkan terima kasih kepada para anggota *Association of Asian Classification Society* (ACS) yang telah menunjuk Direktur Utama BKI sebagai Ketua (Chairman) untuk periode 2015.

Direksi pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemegang Saham, kementerian terkait, serta Dewan Komisaris dan komite-komite di bawahnya, dan tentunya kepada seluruh karyawan BKI yang telah bekerja keras dan menjunjung komitmen menjadi badan klasifikasi kelas dunia.

Kepada para pengguna jasa dan pemangku kepentingan lainnya, Direksi mengucapkan terima kasih atas loyalitas dan dukungan yang telah diberikan kepada BKI.

Semoga BKI dapat mewujudkan cita-cita menjadi badan klasifikasi profesional dan terkemuka yang berperan penting dalam membangun industri maritim di Asia.

Conclusion

At the end of 2015, the implementation of the Economy Union of ASEAN marks the widening of BKI's field of business. Global competition will intensify even at the local level.

Therefore, the BOD appreciates the dedication of the stakeholders towards BKI's efforts of becoming a renown and professional classification society in the context of developing Asia's maritime industry.

Specifically, on behalf of the Board of Directors, I would like to thank the members of the Association of Asian Classification Society (ACS) that have appointed the President Director of BKI as their Chairman for the period of 2015.

The BOD would also like to mention its appreciation and its thankfulness towards the Shareholder, related ministries, as well as the Board of Commissioners and its committees, and of course also all employees of BKI that have worked hard and upheld the commitment of becoming a world-class classification society.

To the customers and other stakeholders, the BOD would like to thank you for your loyalty and support towards BKI.

May BKI fulfill its aspiration to become a renown and professional classification society that plays an important role in the development of the maritime industry of Asia.



Rudiyanto

Direktur Utama

President Director

Laporan Manajemen

Direksi Board of Directors

Rudiyanto
Direktur Utama
President Director

Iman Satria Utama
Direktur Klasifikasi
Classification Director

Ibrahim Gause
Direktur Komersil dan Plt.
Direktur Pengembangan
Sumber Daya
*Commercial Director
and Acting Director of
Resources Development*

Timbul Tambunan
Direktur Keuangan dan
Administrasi
*Director of Finance and
Administration*

Management Report



Laporan Manajemen

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Rudiyanto
Direktur Utama
President Director

Riwayat Jabatan:

Menjabat sebagai Direktur Utama BKL sejak tahun 2014;

Pengalaman Kerja:

Director of Commercial 2 of Sucofindo (2013), VP of SBU Engineering and Transportation of Sucofindo (2008-2013);

Latar Belakang Pendidikan:

MM IPMI, Jakarta, BSC International Institute for Risk & Safety Management, Inggris Raya, Sarjana Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sarjana Teknologi Perminyakan UPN Veteran, Yogyakarta;

Dasar Pengangkatan sebagai Direktur Utama BKL:

Keputusan Menteri BUMN No. SK-424/MBU/2013 tanggal 19 December 2013.

History of Position:

Held the position of President Director of BKL since 2014;

Work Experience:

Director of Commercial 2 of Sucofindo (2013), VP of SBU Engineering and Transportation of Sucofindo (2008-2013);

Educational Background:

MM of IPMI, Jakarta, BSC of the International Institute for Risk & Safety Management, United Kingdom, BA (Politics) of Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, BA (Oil&Gas Technology) of UPN Veteran, Yogyakarta;

Legal basis of appointment as President Director of BKL:

Decision of Minister of SOEs No. SK-424/MBU/2013 dated 19 December 2013.

Management Report



Iman Satria Utama
Direktur Klasifikasi
Classification Director

Riwayat Jabatan:

Menjabat sebagai Direktur Klasifikasi BKI sejak tahun 2013, Direktur Teknik & Operasi BKI sejak tahun 2012;

Pengalaman Kerja:

Kepala Kantor Adpel Palembang (2011-2012), Kasubdit Nautis, Teknik dan Radio Kapal Ditkapel (2009-2011), Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Adpel Semarang (2007-2009);

Latar Belakang Pendidikan:

Magister Manajemen STIE Budi Luhur, Jakarta (2001), Sarjana Sosial Politik Universitas Saburai, Bandar Lampung (1991);

Dasar Pengangkatan sebagai Direktur BKI:

Keputusan Menteri BUMN No. SK-284/MBU/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang dikukuhkan kembali melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

History of Position:

Held the position as Director of Classification Business of BKI since 2013, previously Director of Operations & Technical Affairs of BKI since 2012;

Work Experience:

Head of Palembang Port Administration (2011-2012), Head of Subdirector of Ship Radio, Technical and Nautical - Directorate of Shipping and Seafaring (2009-2011), Head of Ship Seaworthiness Division - Semarang Port Administration (2007-2009);

Educational Background:

Master of Management of STIE Budi Luhur, Jakarta (2001), BA (Social-Politics) of Universitas Saburai, Bandar Lampung (1991);

Legal basis of appointment as Director of BKI:

Decision of Minister of SOEs No. SK-284/MBU/2012 dated 3 August 2012 that was reaffirmed by the Decision of Minister SOEs No. SK-424/MBU/2013 dated 19 December 2013.

Laporan Manajemen

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Ibrahim Gause
 Direktur Komersil dan Plt. Direktur
 Pengembangan Sumber Daya
 Commercial Director and Acting Director
 of Resources Development

Riwayat Posisi:

Menjabat sebagai Direktur Komersil BKI sejak tahun 2013, sebelumnya Direktur Pemasaran & Pengembangan merangkap Plt. Direktur Keuangan & SDM BKI;

Pengalaman Kerja:

Direktur Operasi I Surveyor Indonesia, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Surveyor Indonesia, Sekretaris Perusahaan Surveyor Indonesia;

Latar Belakang Pendidikan:

Sarjana Hukum Perdata Internasional Universitas Diponegoro, Semarang;

Dasar hukum pengangkatan sebagai Direktur BKI:

Keputusan Menteri BUMN No. SK-175/MBU/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang dikukuhkan kembali melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

History of Position:

Held the position of Commerical Director of BKI since 2013, previously Director of Marketing & Development cum officer in lieu of Director of Finance & HR of BKI;

Work Experience:

Director Operation I Surveyor Indonesia, Director of Planning and Development Surveyor Indonesia, Corporate Secretary Surveyor Indonesia;

Educational Background:

Bachelor (International Law) of Universitas Diponegoro, Semarang;

Legal basis of appointment as Director of BKI:

Decision of Minister SOEs No. SK-175/MBU/2013 dated 5 March 2013 that was reaffirmed by the Decision of Minister SOEs No. SK-424/MBU/2013 dated 19 December 2013.

Management Report

**Timbul Tambunan**

Direktur Keuangan dan Administrasi
Director of Finance and Administration

Riwayat Posisi:

Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi BKI sejak 2014;

Pengalaman Kerja:

Komisaris Pembangunan Perumahan, Komisaris LEN (2009), Sekretaris Dewan Komisaris Pindad (2002);

Latar Belakang Pendidikan:

Magister Manajemen Sumber Daya Manusia STIE Ganesha, Sarjana Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, Jakarta;

Dasar hukum pengangkatan sebagai Direktur BKI:

Keputusan Menteri BUMN No. SK-32/MBU/2014 tanggal 5 Februari 2014.

History of Position:

Held the position of Director of Finance and Administration since 2014;

Work Experience:

Commissioner of Pembangunan Perumahan, Commissioner of LEN (2009), Secretary to the Board of Commissioners Pindad (2002);

Educational Background:

Master (Human Resource Management) of STIE Ganesha, Bachelor (Economics) of Universitas Krisnadwipayana, Jakarta;

Legal basis of appointment as Director of BKI:

Decision of Minister SOEs No. SK-32/MBU/2014 dated 5 February 2014.

Laporan Manajemen

Rencana Strategis 2015 - 2019

Strategic Plan 2015 - 2019

Pendahuluan

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengembangkan RPJMN 2015-2019. BKI ikut mengambil peran, berkonsultasi dengan berbagai pihak — termasuk namun tidak terbatas pada Menko Maritim, Deputy Menko Perekonomian, KKP, Kemenhub, serta SKK Migas — dan mengembangkan BKI *Business Plan* 2015-2019.

Dari sudut pandang sebagai badan klasifikasi, BKI melihat rencana Poros Maritim dan Tol Laut serta karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan bermuara kepada pengembangan dan penguatan industri kapal nasional.

BKI berpendapat ada tiga pilar pengembangan terpadu yang menopang percepatan pengembangan daya saing industri kapal nasional, yaitu:

- standarisasi tipe dan ukuran kapal domestik,
- revitalisasi dan klasterisasi galangan kapal nasional, serta
- standarisasi dan pengembangan komponen kapal dalam negeri.

Introduction

In 2014, the Government of Indonesia developed the 2015-2019 Medium-Term National Development Plan. BKI participated in the development, consulted various institutions — including but not limited to the Coordinating Minister of Maritime Affairs, the Vice Coordinating Minister for Economic Affairs, the Ministry for Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of Transportation, and the Oil & Gas Task Force — and developed the BKI 2015-2019 Business Plan.

As a classification society, BKI believes that the Maritime Axe ideology and the Sea Toll program as well as Indonesia's characteristics as an archipelagic state are brought together in the development and strengthening of the national shipbuilding industry.

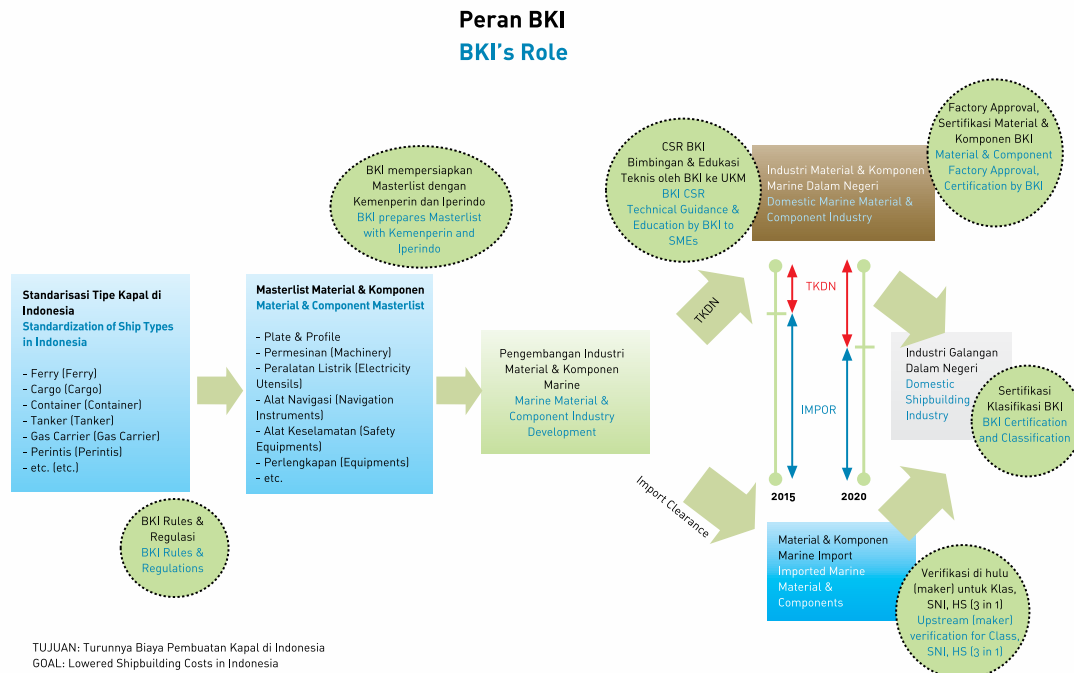
BKI believes that there three pillars of integrated development that accelerate the development of the national shipbuilding competitiveness, namely:

- the standardization of types and sizes of domestic ships,
- the revitalization and clustering of national shipyards, and
- the standardization and development of domestic ship components.



Peran BKI

BKI's Role



BKI berkomitmen untuk mendayagunakan standarisasi kapal dan komponen kapal dalam negeri dengan tujuan ikut menurunkan biaya pembuatan kapal di Indonesia. Prosesnya adalah sebagai berikut:

- BKI mengembangkan dan menerapkan Rules & Regulations BKI untuk merumuskan standarisasi tipe kapal di Indonesia;
- bersama Kemenperin dan Iperindo, BKI mempersiapkan master list untuk pembuat kapal dalam negeri;
- melalui kegiatan CSR berupa bimbingan dan edukasi teknis kepada UKM, BKI mendorong pengembangan tingkat kandungan dalam negeri dalam pengembangan industri material dan komponen kelautan;
- melalui *factory approval*, sertifikasi material dan komponen kelautan, BKI menarik industri material dan komponen kelautan dalam negeri agar berkembang lebih cepat sesuai standar Indonesia;
- melalui verifikasi di hulu (maker) dalam hal kelas, SNI, dan HS, BKI memastikan kesesuaian komponen impor dengan standar Indonesia; kemudian
- melalui sertifikasi dan klasifikasi, BKI menjaga kinerja industri galangan kapal dalam negeri sesuai dengan standar Indonesia.

BKI is committed to utilize the standardization of domestic ships and ship components to lower shipbuilding costs in Indonesia, with the following process:

- BKI develops and implements BKI Rules & Regulations to formulate the standardization of ship types in Indonesia;
- together with the Ministry of Industry and Iperindo, BKI prepares a master list for domestic shipbuilding;
- through CSR programs in the form of advocacy and technical education of SMEs, BKI drives the increase of domestic components and the development of marine material and component industries;
- through factory approval, material certification, and marine components, BKI attracts domestic marine material and component industries to develop faster with Indonesian standards;
- through upstream class verification at the level of makers, SNI, and HS, BKI ensures the suitability of imported components with Indonesian standards; and
- through certification and classification, BKI guards the performance of domestic shipyards within Indonesian standards.

Laporan Manajemen

Rencana Strategis 2015 - 2019

Strategic Plan 2015 - 2019

Road to IACS

BKI menyadari adanya standar internasional yang harus dihormati dalam bidang klasifikasi, statutoria, dan *independent assurance*, dan dalam standar ini — sesuai laporan tahunan 2014 PSC Tokyo MOU — *Flag State* Indonesia masih ditempatkan di dalam Black List. BKI pun masih dikategorikan sebagai badan klasifikasi Medium Performance.

Perkembangan ke posisi yang lebih baik telah terjadi sejak tahun 2011 untuk *Flag State* and bahkan sejak tahun 2009 untuk kinerja. Akan tetapi, BKI meyakini pentingnya mengejar status anggota *International Association of Classification Society (IACS)* untuk mendorong Indonesia ke posisi White List dan mencapai kinerja *High Performance*.

Upaya menjadi anggota IACS dijalankan dalam dua tahap, dengan tolak ukur QMS Certificate, VCA, dan kemudian IACS QSCS.

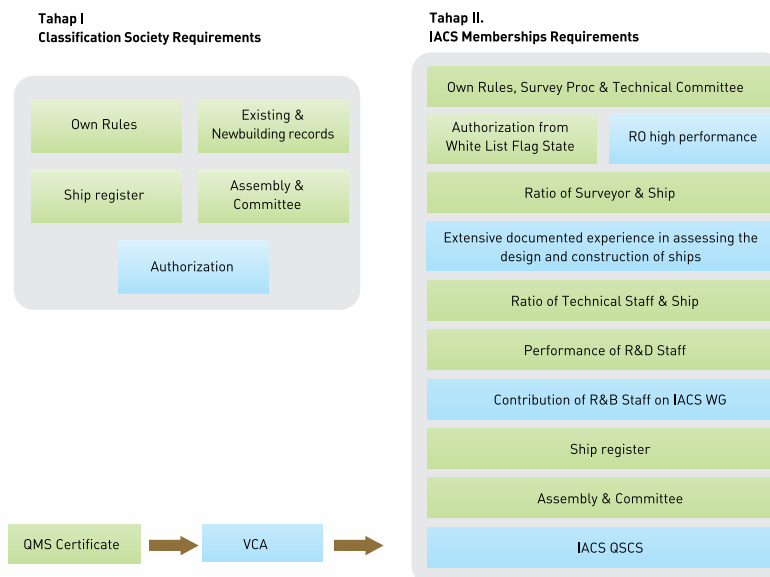
Road to IACS

BKI is aware that there is an international standard to follow in the fields of classification, statutory, and independent assurance, and that within this standard — according to the 2014 PSC Tokyo MOU annual report — the Indonesian *Flag State* is still placed within the Black List. BKI itself is still categorized as a Medium Performance classification society.

The move towards a better position has started in 2011 for the *Flag State* and already in 2008 for the performance. Nevertheless, BKI believes that it is crucial to become a member of the *International Association of Classification Society (IACS)* to help raise Indonesia into the White List and to reach the status of High Performance.

The road towards becoming an IACS member consists of two stages, with the parameters of the QMS Certificate, the VCA and followed by the IACS QSCS.

ROAD TO IACS



Peningkatan Pelayanan

Kinerja BKI sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang klasifikasi, statutoria, dan *independent assurance* pada dasarnya diwujudkan dalam Service Level Agreement

Service Improvement

BKI's performance as a company that is engaged in classification, statutory and independent assurance is essentially manifested in the Service Level Agreement

Management Report

(SLA). Untuk meningkatkan kualitas layanan, BKI mempersiapkan hal-hal berikut:

- layanan jasa tersedia 24/7;
- jaringan kantor pelayanan terus diperluas;
- *drawing approval* dilakukan dengan *e-Drawing System*; serta
- website perusahaan memberikan kesempatan untuk mengunduh *BKI Rules/Guidelines* secara cuma-cuma, di samping membuka akses untuk mengetahui status survey, audit, drawing ataupun invoice.

Visi, Tujuan Korporasi dan Grand Strategy

Pada tahun 2019, BKI diharapkan mencapai visi “Menjadi Badan Klasifikasi dan Independent Assurance Berkelas Dunia” serta tujuan korporasi berupa:

1. tingkat pendapatan sebesar Rp 2.880 M;
2. tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun 33%; serta
3. proporsi pendapatan jasa klasifikasi dibandingkan jasa non-klasifikasi 54:46.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BKI menjalankan grand strategy yang terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. intensifikasi usaha klasifikasi, terutama dengan
 - a. memberdayakan potensi pelanggan terdaftar BKI melalui diferensiasi layanan baru, yaitu sertifikasi komponen dan material;
 - b. merealisasi potensi pasar kapal yang belum tergarap, termasuk kapal dengan kondisi standar di bawah A-100; serta
 - c. meningkatkan kualitas proses bisnis internal untuk memperoleh sertifikasi IACS;
2. peningkatan portofolio usaha non klasifikasi, yaitu peningkatan jumlah pekerjaan baru dan konsumen baru untuk layanan independent assurance pada sektor kelautan, industri, dan energi, dengan fokus layanan dengan nilai tambah tertinggi.

Dalam rangka menerapkan grand strategy ini, BKI akan menjalankan program kerja untuk menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi SDM, serta program investasi untuk menambah dan meningkatkan peralatan dan perangkat serta sistem teknologi informasi.

(SLA). To improve the service level, BKI is preparing the following:

- 24/7 availability of service
- enlarged network of service offices
- drawing approval is conducted with an e-Drawing System; and
- the corporate website provides access to information about surveying, auditing, drawing, and even invoicing progress.

Vision, Corporate Aim and Grand Strategy

By 2019, BKI is expected to reach the vision of “Becoming a World-Class Classification Society and Independent Assurance Provider” with the corporate aims of:

1. I revenue rates of IDR 2,880 B;
2. annual average growth rate of 33%; and
3. classification service and non-classification service revenue proportion of 54:46.

To meet this vision, BKI implements a grand strategy that consists of two parts, namely:

1. intensify the classification business, particularly by
 - a. realizing listed potential customers of BKI through new service differentiation, namely component and material certification;
 - b. realizing the market potential of ships that have been overlooked, including ships with conditions below the A-100 standard; and
 - c. improve the internal business process quality to obtain the IACS certificate;
2. enhance the non-classification business portfolio, by increase the number of new jobs and new customers for the independent assurance services in the maritime, industry, and energy sectors, with the focus on highest added-value services.

In the course of implementing this grand strategy, BKI will run a work program to increase the number and enhance the competence of its human resource, and an investment program to add and improve the instruments and equipments and the information technology system.

Laporan Manajemen

Pertanggungjawaban Laporan Tahunan

Accountability of Annual Report

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2014
PT Badan Klasifikasi Indonesia (Persero)

DECLARATION MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS
ABOUT RESPONSIBILITY FOR THE 2014 ANNUAL REPORT OF
PT Badan Klasifikasi Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Badan Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

We the undersigned state that all information in the 2014 annual report of PT Badan Klasifikasi Indonesia (Persero) is included completely and are responsible for the accuracy of this annual report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truly to the best of our knowledge.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Direksi
Board of Directors



Sukatno
Komisaris Utama
President Commissioner



Rudiyanto
Direktur Utama
President Director



Faisal Ahmad
Komisaris
Commissioner



Iman Satria Utama
Direktur Klasifikasi
Classification Director



Minto Widodo
Komisaris
Commissioner



Timbul Tambunan
Direktur Keuangan dan Administrasi
Director of Finance and Administration



Erwin Rosmali
Komisaris
Commissioner



Ibrahim Gause
Direktur Komersil dan Plt. Direktur
Pengembangan Sumber Daya
Commercial Director and Acting Director
of Resources Development

Management Report



Profil Korporasi

Mengintensifkan Jasa Klasifikasi, Memperluas Portofolio Jasa Komersial

Intensifying Classification Services,
Expanding the Commercial Services Portfolio



Pada tahun 2014, BKI berhasil mengintensifkan jasa klasifikasi dan statutoria dan memperluas portofolio jasa non klasifikasi atau komersial.

Corporate Profile



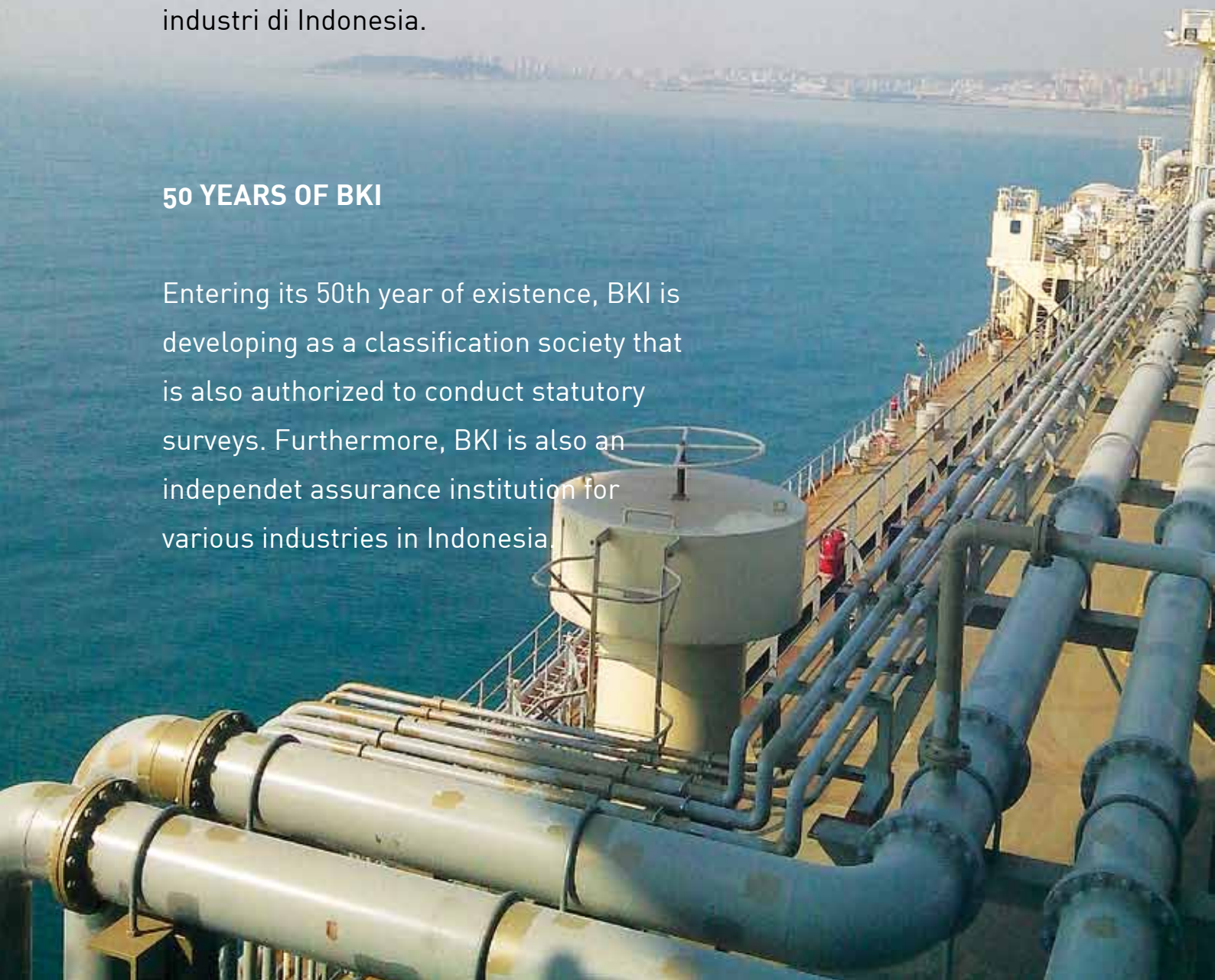
In 2014, BKI successfully intensified its classification and statutory services and expanded its non classification or commercial services portfolio.

50 TAHUN BKI

Memasuki usia 50 tahun, BKI berkembang sebagai badan klasifikasi yang juga diotorisasi melakukan survei statutoria. Di samping itu, BKI juga menjadi lembaga *independent assurance* untuk berbagai industri di Indonesia.

50 YEARS OF BKI

Entering its 50th year of existence, BKI is developing as a classification society that is also authorized to conduct statutory surveys. Furthermore, BKI is also an independent assurance institution for various industries in Indonesia.



Corporate Profile

Nama

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Alamat

Jl. Yos Sudarso Kav. 38-40
Jakarta 14320

Telepon

+62-21-4301017

Fax

+62-21-43936175

Email

ho@bki.co.id

Website

www.bki.co.id

Name

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Address

Jl. Yos Sudarso Kav. 38-40
Jakarta 14320

Telephone

+62-21-4301017

Fax

+62-21-43936175

Email

ho@bki.co.id

Website

www.bki.co.id

Profil Korporasi

Riwayat Singkat Perusahaan

1964

BKI didirikan sebagai perusahaan negara dengan Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Th.1/17/2 tanggal 26 September 1964.

1977-1978

BKI berubah status badan hukum menjadi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1977, serta membuat anggaran dasar di hadapan Notaris Imas Fatimah SH dengan Akte No. 57 tanggal 19 Oktober 1978, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/345/1978 tanggal 7 November 1978, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tahun 1979.

1982

BKI merintis bidang usaha jasa konsultansi dan supervisi di bidang maritim dan industri serta bidang teknik lainnya. Rintisan ini bertujuan mengembangkan sisi komersial perusahaan, sehingga bidang usaha ini juga disebut bidang usaha jasa komersial.

1984-1985

Perubahan Anggaran Dasar yang dicatat dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 180 tanggal 30 November 1984 dan No. 110 tanggal 26 Juli 1985, disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C.2-5322HT.0104 tanggal 24 Agustus 1985, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 97 tahun 1985.

1995

Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris Neneng Salmiah dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 12 Maret 1995.

1998-1999

Perubahan Anggaran Dasar yang dicatat dalam Akte Notaris Neneng Salmiah, SH, M.Hum, diubah dengan Akta No. 38 tanggal 14 September 1998, disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-20.099 HT.01.04 tanggal 15 Oktober 1998, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 35 tahun 1999.

Brief History of the Company

1964

BKI is established as a state-owned company with the Decision of the Sea Transport Minister No. Th. 1/17/2 of 26 September 1964.

1977-1978

BKI changes its legal status to become PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) based on Government Regulation No. 1 of 1977, and officiated its articles of association in front of Notary Imas Fatimah SH as documented in Act No. 57 of 19 October 1978, that was approved with the Decision of the Minister of Justice No. Y.A.5/345/1978 of 7 November 1978, and announced in the State Gazette No. 58 of 1979.

1982

BKI pioneers its consultancy and supervision service business in the fields of maritime and industry and other engineering services. The pioneering efforts are meant to develop the commercial side of the company. Therefore, this field of business is also called commercial service business.

1984-1985

Changes in the articles of association are recorded in the Act of Notary Imas Fatimah, SH No. 180 of 30 November and No. 110 of 26 July 1985, which were approved by the Decision of the Minister of Justice No. C.2-5322HT.0104 of 24 August 1985, and announced in the State Gazette No. 97 of 1985.

1995

Changes of the articles of association are made in front of Notary Neneng Salmiah in the form of the Meeting Decision Statement Act of 12 March 1995.

1998-1999

Changes in the articles of association are recorded in the Act of Notary Neneng Salmiah, SH, M.Hum. No. 38 of 14 September 1998, that was approved by the Decision of the Minister of Justice No. C.2-20.099 HT.01.04 of 15 October 1998, and announced in the State Gazette No. 35 of 1999.

Corporate Profile

Kegiatan Usaha

Anggaran Dasar BKI yang terakhir menyatakan perusahaan bergerak dalam bidang usaha jasa klasifikasi dan bidang jasa non klasifikasi.

Ruang Lingkup Jasa Klasifikasi BKI

- I. Penerimaan Kelas dan Mempertahankan Kelas
 - a. Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal
 - b. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai
 - c. Keagenan dan atau perwakilan badan klasifikasi atau konsultan asing
- II. Jasa Statutoria
 - a. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun dari pemerintah negara lain
 - b. Melakukan survei dan sertifikasi atas nama Pemerintah Mongolia, serta atas Pemerintah Panama, Belize & Honduras dalam kerjasama dengan IBS
 - c. Melakukan *drawing/plan approval* yang meliputi SOPEP/SMPEP, *damage control plan*, *sewage treatment plan*, *garbage management plan*, *cargo securing manual*, *fire control & safety plan*, *P&A manual* untuk *chemical tanker*, *operation manual*, *stability calculation/booklet*
 - d. Melakukan *compliance survey & certification*, yang meliputi *Marpol Annex I s/d VI*, *Anti Fouling System (AFS)*, *Performance Standard for Protective Coating (PSPC)*, *Cargo Ship Safety Equipment Certification*, *Cargo Ship Safety Construction Certification*, *ISM Certificate (DOC & SMC)*, *ISPS Certificate (ISSC)*, *Loadline Certificate (ILLC & KM.3)*, *Cargo Gear Certification*, dan *CAS Certification*
- III. Jasa Sertifikasi Material dan Komponen
 - a. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen
 - b. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las, dan ahli las lainnya
 - c. *Industrial Certification*

BKI melakukan klasifikasi kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 7 tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 61 tahun 2014 tentang kewajiban bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi.

Business Activities

The most recent articles of association of BKI state that the company is engaged in the businesses of classification services and non-classification services.

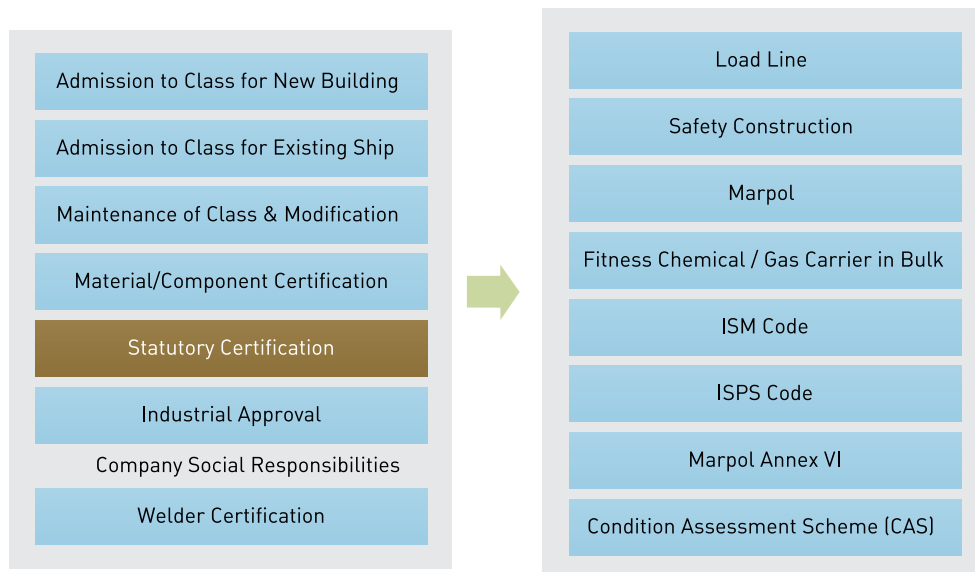
Range of BKI Classification Services

- I. Admission to Class and Maintenance of Class
 - a. Inspection of construction, supervision and testing as well as issuance of class certificates and ship registration
 - b. Inspection and testing of floating vessels and offshore construction facilities
 - c. Agency and or representation of foreign classification society or consultant
- II. Statutory Services
 - a. Statutory inspection and certification with the authorization from the Government of Indonesia or governments of other countries
 - b. Survey and certification on behalf of the Government of Mongolia, and on behalf of the Governments of Panama, Belize & Honduras in collaboration with IBS
 - c. Drawing/Plan approval including SOPEP/SMPEP, damage control plan, sewage treatment plan, garbage management plan, cargo securing manual, fire control & safety plan, P&A manual untuk chemical tanker, operation manual, stability calculation/booklet
 - d. Compliance survey & certification including Marpol Annex I s/d VI, Anti Fouling System (AFS), Performance Standard for Protective Coating (PSPC), Cargo Ship Safety Equipment Certification, Cargo Ship Safety Construction Certification, ISM Certificate (DOC & SMC), ISPS Certificate (ISSC), Loadline Certificate (ILLC & KM.3), Cargo Gear Certification, dan CAS Certification
- III. Material and Component Certification Services
 - a. Testing and certification of material and components
 - b. Testing and quality certification of welders, welding inspector, other welding experts
 - c. Industrial Certification

BKI conducts ship classification based on the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. 7 of 2013 that has been amended by the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. 61 of 2014 about the obligation of Indonesian flagged ships to comply to rules of the classification society.

Profil Korporasi

Gambar Kompetensi Bisnis Jasa Klasifikasi Classification Service Business Competence



Sementara itu, statutoria dilakukan atas dasar otorisasi pemerintah, terutama Pemerintah Republik Indonesia, dan hingga akhir tahun 2014 otorisasi statutoria yang diterima BKI dari Pemerintah RI adalah sebagai berikut:

Statutory is conducted based on government authorization, particularly the Government of Indonesia, and by the end of 2014 the authorization to conduct statutory services received by BKI from the Government of Indonesia is as follows:

Tabel Otorisasi Statutori dari Pemerintah RI
Table Statutory Authorization from Government of Indonesia

No	Jenis Penugasan Type of Authorization	No. Penunjukan No. of Mandate	Lingkup Penunjukan Scope of Statutory
1	Load Line	No. DKP/46/43/12 Tgl.12.6.1976 (ILLC) No. PY.66/1/1-93 Tgl. 28-8-1993 (PGMI)	Survey dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI / Full Survey and Certification by BKI
2	Safety Construction	No.PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995	Survey dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI / Partial Survey and Certification by BKI
3	Marpol	No.PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995	Survey dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI / Partial Survey and Certification by BKI
4	Fitness Chemical / Gas Carrier in Bulk	No.PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995	Survey dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI / Partial Survey and Certification by BKI
5	ISM Code	No.PY/1/7-96 Tgl. 12-7-1996	Survey dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI / Partial Survey and Certification by BKI
6	ISPS Code	No. KL.93/2/02-04 Tgl. 14-0502004 (Kpl) No. KL.93/2/11-04 Tgl. 23-06-2004 (PF) BKl sbg Recognized Security Org. (RSO)	Survey dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI / Partial Survey and Certification by BKI
7	Marpol Annex VI	No.PY.67/1/7.05 Tgl. 6 April 2015	Survey dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI / Partial Survey and Certification by BKI
8	Condition Assessment Scheme (CAS)	No. UM.485/3/13/DII-05 Tgl 27-06-2005	Survey dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI / Partial Survey and Certification by BKI

Ruang Lingkup Jasa Non Klasifikasi BKI

Perusahaan memiliki kompetensi bisnis untuk melakukan 15 jenis layanan *independent assurance*; layanan tersebut terbagi ke dalam tiga sektor.

Scope of Non-classificaiton Services of BKI

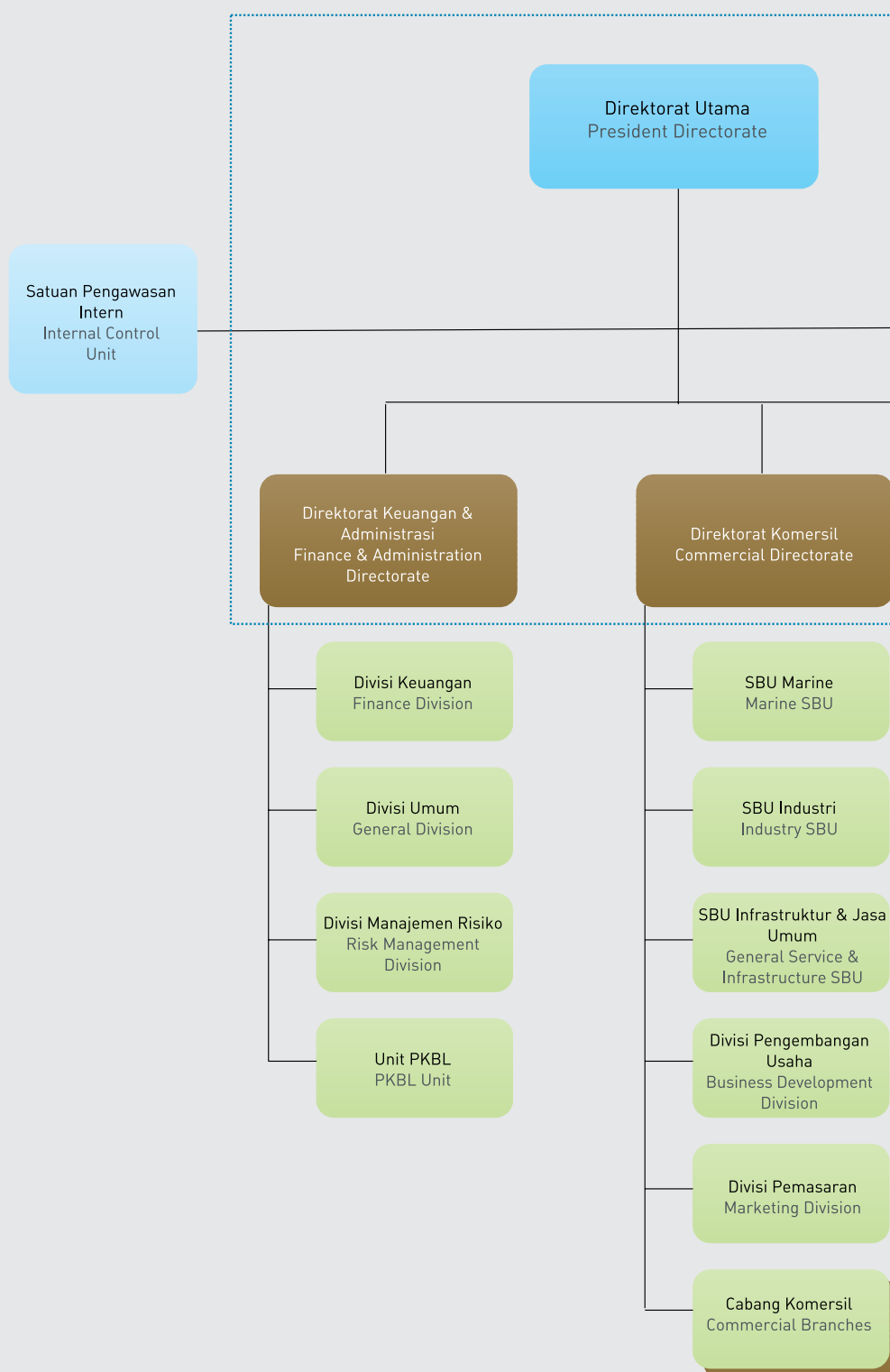
The Company has the business competence to conduct 15 types of independent assurance services, which are divided into three sectors;

Corporate Profile

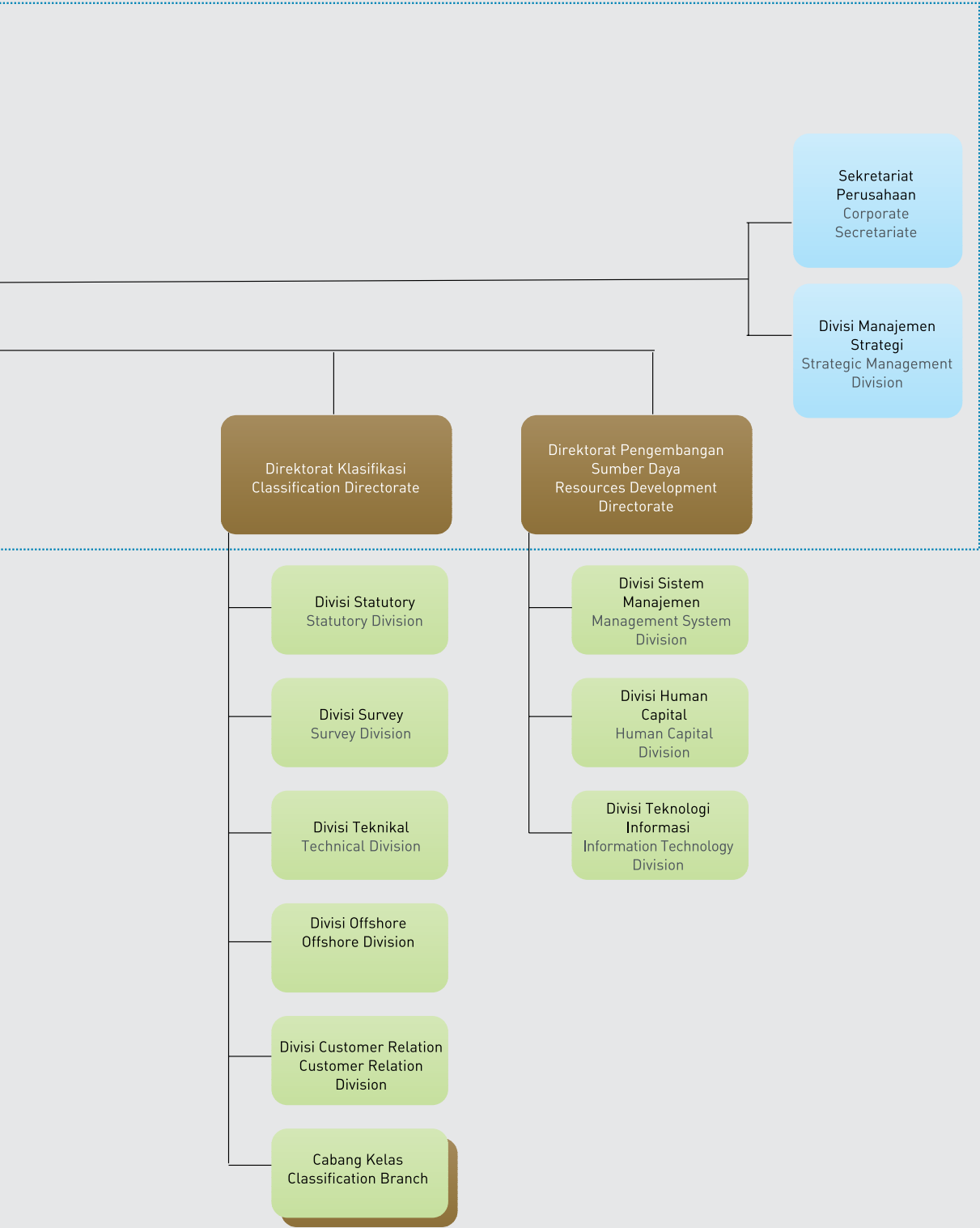
Kompetensi / Competence	Marine	Industry	Energy
Identifikasi & Survey	Ship condition survey, etc	Lashing Survey, etc	Petroleum Survey, etc
Mapping	Marine mapping	Pembuatan Peta Dasar	Studi Potensi Sumberdaya Migas, etc
Inspection	Floating object inspection, etc	Crane, forklift, loader, truck, etc	Storage tank inspection, etc
Test	WPS and welder test, etc	Wich load testing, etc	WPS and welder test, etc
Laboratory analysis	Analisa Air Laut, etc	Mechanical testing laboratory, etc	Analisa Batubara, Minyak, Material
Assesment	Port assesment, etc	Remaining Life Assessment, etc	Facilities audit, etc
Verification and evaluation	Evaluasi kenaikan sarat kapal, etc	Verifikasi Harga, etc	Verifikasi Penjualan Batubara, etc
Monitoring	Project Monitoring, etc	Monitoring Corrosion, etc	Monitoring Penjualan LNG, etc
Consultancy	New buiding design, etc	Konsultan K-3, etc	Sistem Pemantauan Lifting Migas, etc
Projecy management	Planned Maintenance System, etc	Project Supervision and Management, etc	Studi Potensi Sumberdaya MIGAS, etc
Certification	Workshop certification, etc	Lifting gear inspection & Certification	Pipeline inspection & certification
Training	Marine inspector training, etc	Welding Inspector, etc	Rigging and Signelman, etc
Investigation	Insurance survey, etc	Failure Analysis, etc	Soil Investigation, etc
Supervision	New buiding supervision, etc	Project Supervision and Management, etc	Penyaksian Inspeksi Batubara, etc
Manpower supply	Operation and Maintenance, etc	Industrial Inspector, etc	Project Management Team, etc

Struktur Organisasi

Organizational Structures



Corporate Profile



Profil Korporasi

Visi & Misi Perusahaan Corporate Vision & Mission



Nilai Perusahaan

- Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Etos kerja yang tinggi
- Reputasi yang senantiasa ditingkatkan, dijaga dan dipelihara
- Tertib dalam menerapkan kebijakan manajemen maupun sikap tindak pribadi
- Ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi yang harus dikuasai
- Baik dalam pelayanan dan hasil kerja

BKI menjalankan program perubahan budaya kerja dan implementasi budaya kerja yang baru, sehingga nilai perusahaan diwujudkan secara efektif oleh setiap karyawan.

Corporate Values

- Obey God Almighty
- High work ethos
- Always enhance, protect and maintain reputation
- Disciplined in implementing management policies as well as personal conduct
- Scientific knowledge and advanced technologies have to be mastered
- Proper services and work results

BKI manages a work culture change program and implements a new work culture, so that the corporate values are effectively applied by every personnel.

Visi 2015-2019

Menjadi badan klasifikasi dan *independent assurance* berkelas dunia

Misi 2015-2019

1. Memberikan nilai tambah terbaik bagi pelanggan jasa klasifikasi dan statutoria melalui layanan, operasi, dan riset rules yang berstandar internasional serta berbasis kualitas, keselamatan dan tanggung jawab sosial — lingkungan kelautan (klasifikasi)
2. memaksimalkan sumber daya BKI dengan segenap potensinya agar dapat menjadi *market leader* dalam bisnis *independent marine assurance* (non klasifikasi)

Vision 2015-2019

To become a world-class classification society and independent assurance provider

Mission 2015-2019

1. To provide the best possible added value to customers of the classificaiton and statutory services through international standard handling, operation, and rules research, in terms of quality, safety and social responsibility as well as responsibility towards the marine environmen (classification)
2. to maximize the resources of BKI towards its full potential to become the market leader in the independent marine assurance business (non-classification)

Moto Perusahaan

Terpercaya, dengan maksud:

1. mutu jasa BKI benar-benar berkualitas tinggi dan jasa dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu;
2. setiap pegawai perusahaan memiliki kualifikasi yang dapat diandalkan pada masing-masing bidang tugas atau profesinya;
3. BKI menjadi merek dagang yang dipahami sebagai produk unggulan.

Terpercaya juga menjadi rumusan falsafah perusahaan yang dikembangkan dengan paradigma:

1. mengutamakan mutu dan pelayanan jasa berdasarkan komitmen yang tinggi terhadap masalah keselamatan;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. tanggap dan peduli terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan keselamatan kapal.

Corporate Motto

Trustworthy, which means:

1. BKI's quality of services is truly high and services are conducted efficiently and on time;
2. every employee must have reliable qualification in his or her scope of duty or profession;
3. BKI becomes a trademark that his perceived as a prime quality product.

Trustworthy is also the essence of hte corporate philosophy, which has been developed with the paradigm of:

1. prioritizing quality and services based on utmost commitment towards safety;
2. improving the quality of human resources consistently and continuously;
3. responsive and aware about developments in science and technology, particularly those that are related to ship safety.

Profil Korporasi

Sumber Daya Manusia

Karyawan yang kompeten, profesional dan berdedikasi terhadap pencapaian tujuan merupakan kunci keberhasilan setiap perusahaan, termasuk BKL. Namun, sebagai badan klasifikasi, BKL membutuhkan kompetensi dan profesionalisme yang khas dan terkait dengan tujuan meningkatkan kepastian dan keselamatan industri perkapalan dan industri pelayaran. Karena itu, perekrutan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kebudayaan perusahaan BKL memastikan para karyawan memiliki visi tentang peran penting klasifikasi, statutoria, serta *assurance* dalam industri perkapalan dan industri pelayaran.

Human Resources

Competent and professional employees that are dedicated towards reaching aims are key in companies' success, including BKL's. However, as a classification society, BKL requires unique competence and professionalism that are related to the aim of improving certainty and safety of the shipbuilding industry and the shipping industry. Therefore, recruitment, education and training, and the development of BKL's corporate culture ensure that the employees have a vision about the importance of classification, statutory, and assurance in the industries of shipbuilding and shipping.

Komposisi Sumber Daya Manusia

Human Resource Composition

Realisasi Turn Over Pegawai Sesuai Fungsi s/d 31 Desember 2014
Employee Turn Over Based on Function up to 31 Desember 2014

No.	Keterangan Note	Posisi / Position as Per 1/1/2014	Diterima Admitted				Keluar Excused				Posisi / Position as Per 12/31/2014	
			R	AS/AF	M	JML	B	AS/AF	M	JML		
I.	Pegawai Tetap / Permanent Employees:											
1	Operasional / Operational	429	29	2	9	40	4	0	9	13	456	
2	Supporting / Supporting	119	3	2	0	5	11	0	0	11	113	
	Sub Total I	548	32	4	9	45	15	0	9	24	569	
II.	Kontrak Kerja / Job Contract:											
1	Operasional / Operational	76	7	3	0	10	9	0	0	9	77	
2	Supporting / Supporting	114	18	1	0	19	10	2	0	15	118	
	Sub Total II	190	25	4	0	29	22	2	0	24	195	
III.	Kontrak Proyek / Project Contract :											
1	Operasional / Operational	78	53	0	0	53	0	0	0	0	131	
2	Supporting / Supporting	78	45	0	0	45	0	0	0	0	121	
	Sub Total III	154	98	0	0	96	0	0	0	0	252	
	Total I+II+III											
1	Operasional / Operational	583	89	5	9	103	13	0	9	22	664	
2	Supporting / Supporting	309	66	3	0	69	24	2	0	26	352	
	Total (I+II+III)	892	155	8	9	172	37	2	9	48	1.016	

Catatan / Note: Tidak termasuk 4 (empat) orang Direksi / Not including 4 (four) Directors

- R = Rekrutmen / Recruitment

- M = Mutasi / Mutation

- B = Berhenti / Dismissed

- AS= Alih Status / Changed Status

Corporate Profile

Realisasi Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan s/d 31 Desember 2014
Composition of Employees Based on Educational Level up to 31 Desember 2014

No.	Keterangan Note	S3	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	Jumlah Total
I. Pegawai Tetap / Permanent Employees:									
1	Operasional / Operational	3	20	324	27	82	0	0	456
2	Suporting / Supporting	0	7	46	10	43	5	2	113
Sub Total I		3	27	370	37	125	5	2	569
II. Kontrak Kerja / Job Contract:									
1	Operasional / Operational	0	0	41	13	23	0	0	77
2	Suporting / Supporting	0	0	19	5	86	3	6	118
Sub Total II		0	0	60	18	108	3	6	195
III. Kontrak Proyek / Project Contract :									
1	Operasional / Operational	0	2	78	21	30	0	0	131
2	Suporting / Supporting	0	2	30	1	87	1	0	121
Sub Total III		0	4	108	22	117	1	0	252
Total I+II+III									
1	Operasional / Operational	3	22	443	61	135	0	0	664
2	Suporting / Supporting	0	9	95	16	215	9	8	352
Total (I+II+III)		3	31	538	77	350	9	8	1.016

Catatan / Note : tidak termasuk 4 (empat) orang Direksi / not including 4 (four) Directors

Realisasi Turn Over Pegawai Sesuai Usia s/d 31 Desember 2014
Turn Over of Employees Based on Age up to 31 December 2014

No.	Keterangan Note	Usia / Age												Posisi Position					
		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-50				51-54		55-60	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
I.	Pegawai Tetap / Permanent Employees:																		
1	Operasional / Operational	8	4	80	11	68	17	78	8	48	4	68	0	35	8	18	1	403	53
2	Suporting / Supporting	2	1	1	2	3	9	10	4	19	7	20	8	10	10	3	4	68	45
	Sub Total I	10	5	81	13	71	26	88	12	67	11	88	8	45	18	21	5	471	98
II.	Kontrak Kerja / Job Contract:																		
1	Operasional / Operational	1	0	10	1	30	0	18	1	5	0	4	0	0	0	5	0	73	2
2	Suporting / Supporting	16	4	17	10	20	5	17	2	6	1	15	0	2	0	5	0	98	22
	Sub Total II	17	4	27	11	50	5	35	3	11	1	19	0	2	0	10	0	171	24
III.	Kontrak Proyek / Project Contract :																		
1	Operasional / Operational	32	0	50	1	26	1	8	0	6	0	2	0	2	0	3	0	129	2
2	Suporting / Supporting	13	1	44	3	24	1	17	0	8	0	7	0	2	0	1	0	116	5
	Sub Total III	45	1	94	4	50	2	25	0	14	0	9	0	4	0	4	0	245	7
	Total I+II+III																		
1	Operasional / Operational	41	4	140	13	124	18	104	4	59	0	74	0	37	8	26	1	605	57
2	Suporting / Supporting	31	6	62	15	47	15	44	8	33	8	42	8	14	10	9	4	282	72
	Total (I+II+III)	72	10	202	28	171	33	148	12	92	8	116	8	51	18	35	5	887	129

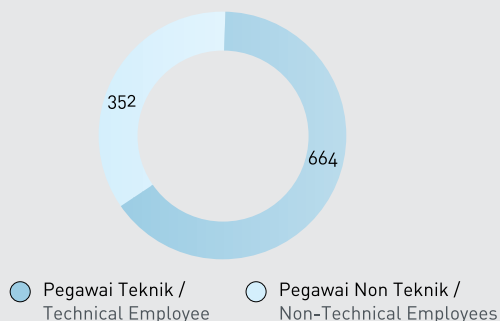
Catatan: tidak termasuk 4 (empat) Direksi / not including 4 (four) Directors

L = Laki-laki / Men

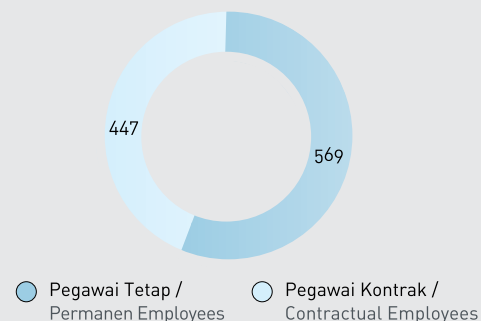
P = Perempuan / Women

Profil Korporasi

Perbandingan Karyawan Teknik dan non Teknik 2014
Comparison Between Technical and Non-Technical Employees 2014



Perbandingan Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak 2014
Comparison Between Permanent and Contractual Employees 2014



Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2014, BKI melanjutkan upaya pendidikan dan pelatihan dalam rangka memenuhi standar IACS-QSCS dan memperluas cakupan pelimpahan statutoria dari Pemerintah RI. Secara ringkas, pendidikan dan pelatihan mencakup 146 peserta bidang teknik kelas, 297 peserta bidang teknik komersial, 524 bidang manajemen, serta 38 peserta pelatihan/sosialisasi QHSE dan 31 peserta pelatihan/orientasi pegawai baru.

Education and Training

In 2014, BKI has continued its education and training efforts in the course of meeting the IACS-QSCS standards and to enlarge the scope of statutory mandate by the Government of Indonesia. Briefly, education and training included 146 classification techniques participants, 297 commercial techniques participant, 524 management participants, and 38 QHSE training/socialization participants as well as 31 new employee training/orientation participants.

Pelatihan Pegawai Tahun 2014
Training of Employees in 2014

No.	Uraian Description	Jumlah Amount
I. Bidang Klasifikasi / In the field of Classification		
1	Principal Surveyor	0
2	Senior Surveyor	0
3	Surveyor	40
4	Asisten Surveyor	28
II. Bidang Marine & Industry / In the field of Marine & Industry		
1	Ahli Radiography Level I	0
2	Ahli Radiography Level II	18
3	NDT Level I	0
4	NDT Level II	28
5	Welding Inspector	20
6	Welding Inspector AWS	0
7	Welding Engineering	1
8	AK-3 Umum (DEPNAKER)	52
9	Crane Inspector (DEPNAKER)	0
10	Crane Inspector (MIGAS)	18
11	Inspector Perpipa	0
12	Inspector Casing & Tubing	0
13	Inspector Tangki Timbun	4
14	Petugas Proteksi Radiasi	0
15	Offshore Pipeline	20
16	Cathodle/Corrosion Inspector	0
17	Sea Survival	20
18	Pembinaan Pemeriksaan Teknis & Pengujian Katup Pengaman	0
19	HUET	53
20	Pressure Vessel Savety	30

Corporate Profile

No.	Uraian Description	Jumlah Amount
III.	Bidang Sertifikasi / In the field of Certification	
1	Safety Auditor	38
2	Quality Auditor	1
3	ISPS Code	27
IV.	Sistem Informasi / Information System	0
V	Akuntan / Accountant	0

Di samping pelatihan rutin, BKI juga mengadakan pelatihan khusus untuk secara langsung menunjang perkembangan usahanya.

In addition of routine training, BKI also conducts special training that is directly supporting its business development.

Program Diklat Utama Pegawai PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Periode: Januari s.d Desember 2014
Main Employee Education and Training Program of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Period: January up to December 2014

No	Jenis Program Diklat Tahun 2014 Type of Education and Training Program 2014	Jumlah Personil 2013 Number of Personnel 2013	Jumlah Personil 2014 Number of Personnel 2014
1	Orientation for New Joining Employee	35	31
2	Assistant Surveyor Training Level	10	28
3	Surveyor Training	15	40
4	Senior Surveyor Training	0	0
5	Crane Migas	0	18
6	Job Training BKI Singapore 3 (three) months	0	0
7	Marine Surveyor	4	2
8	MT Level-II & PT Level II	0	19
9	UT Level II	0	9
10	RT Level II	0	18
11	Rotating Migas	0	4
12	Pipeline Migas	0	20
13	Pressure Vessel Migas	6	15
14	Sea Survival, HUET, T-Bosiet	0	53
15	Pipe Stress Analysis	0	2
16	AK3 DEPNAKER	4	52
17	Storage Tank Migas	8	4
18	Pressure Safety Valve Migas	10	30
19	Welding Inspector	0	20
20	Auditor ISM & ISPS Code	27	0
21	Auditor ISM Code	0	0
22	Auditor ISPS	0	27
23	Manajemen Perkantoran	9	8
24	Manajemen SDM	7	22
25	Manajemen Pemasaran	0	1
26	Manajemen Proyek	4	28
27	Risk Manajemen + Leadership Training	0	0
28	Perpajakan + Akuntansi + FinOpS (In House Training)	51	1
29	ISO/IEC-17025 Overview and Analysis	2	0
30	ISO/IEC-17020 Overview and Analysis	8	0
31	ISO 9001:2008	14	0
32	Tugas Belajar S2 dan S3 di Luar Negeri	3	4
33	Workshop Seminar Dalam Negeri	261	26
34	Workshop Seminar Luar Negeri	5	6
35	Metodologi Riset Klas & Statutoria	0	0

Profil Korporasi

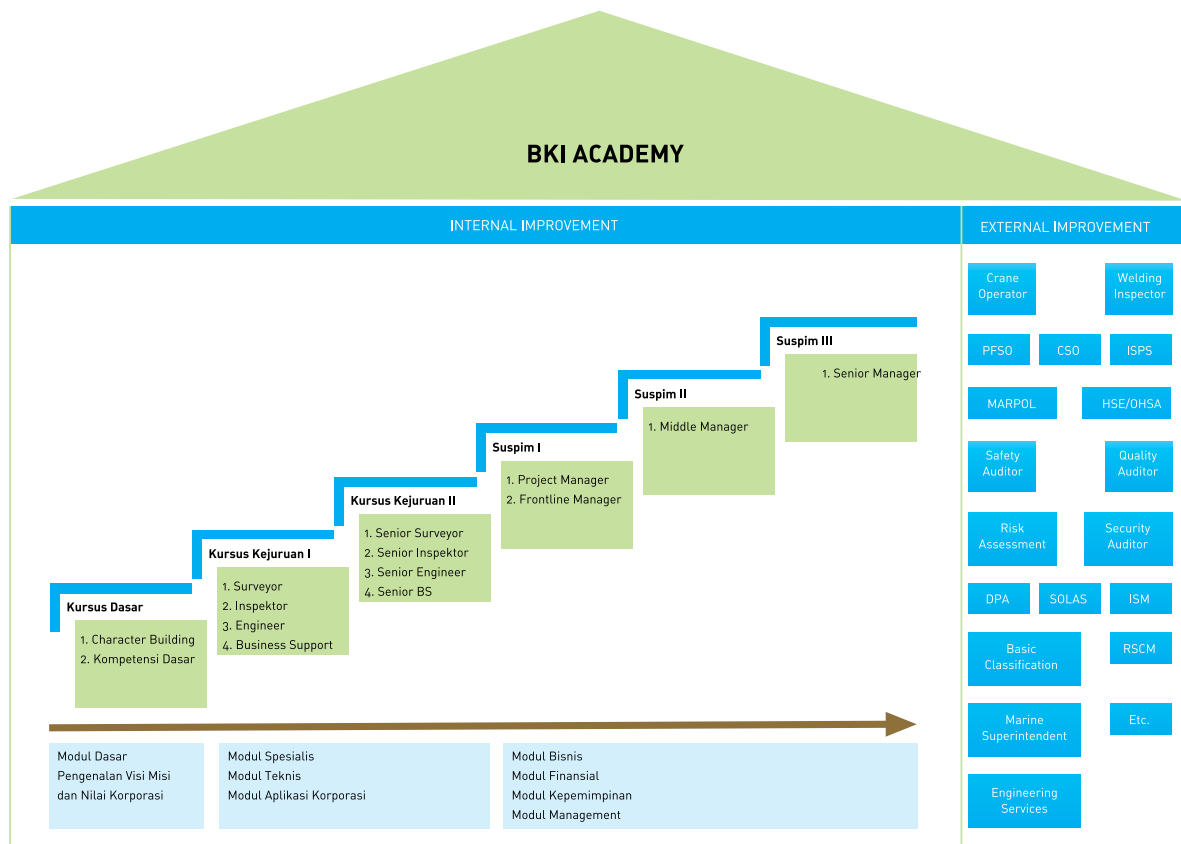
No	Jenis Program Diklat Tahun 2014 Type of Education and Training Program 2014	Jumlah Personil 2013 Number of Personnel 2013	Jumlah Personil 2014 Number of Personnel 2014
36	In-House Training Inspector (HAKIT)	9	0
37	HSE Training	2	38
38	Electrical (MIGAS)	3	13
39	IT Training	4	1
40	Auditor Training (Internal Audit)	3	1
41	Character Building	0	357
42	Pengawasan Operasi Pertama (POP)	0	3
43	Cooting Inspector Level Muda & Madya	0	30
44	SKKNI		11
45	Oil Tanker & Bulk Carrier		25
Jumlah		504	967

BKI Academy

Dengan Program Diklat Utama yang telah berkembang begitu rupa, BKI mengambil langkah strategis yang sangat penting pada tahun 2014 dengan mempersiapkan BKI Academy. Lembaga pendidikan dan pelatihan ini berfungsi untuk mengembangkan karakter melalui pelatihan dasar dan mengembangkan sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengembangan usaha jasa sertifikasi statutoria.

BKI Academy

With its rapidly development Main Training/Education Program, BKI has made the strategic decision in 2014 to pave the ground for the BKI Academy. This education and training institution serves the purpose to develop character through basic training and to develop human resources that are required in the business development of statutory certification services.



Corporate Profile

Teknologi

BKI memanfaatkan dan mengembangkan teknologi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan (QoS). Mulai dari jaringan kantor pelayanan yang terhubung oleh VPN perusahaan hingga website perusahaan yang memberikan akses ke status survei, status audit, status drawing, dan status invoice, BKI telah lama memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanannya.

BKI bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara untuk mengembangkan rencana induk pengembangan dan tata kelola teknologi informasi perusahaan. Keduanya telah diselesaikan pada tahun 2014, sehingga seluruh sistem aplikasi TI terintegrasi.

BKI *Dashboard Mobile System* dikembangkan untuk mendukung pemantauan proses produksi jasa klasifikasi, sehingga informasi dari lapangan tersaji secara online. [sedapat mungkin ada foto penggunaan di lapangan]

BKI *One Gate System* dikembangkan untuk mendukung implementasi tata kelola, khususnya sistem informasi manajemen. Pada tahun 2014, sistem ini telah ditambah dengan fitur informasi kompetensi pegawai, informasi status kepegawaian, informasi remunerasi pegawai, serta otomatisasi notifikasi email.

Dalam segi aplikasi, perusahaan telah menyempurnakan aplikasi Finops, COps, CSOps, sehingga semakin lengkap dukungan teknologi informasi bagi manajemen dan pelanggan.

Di samping itu, BKI telah mengembangkan perangkat lunak Dewaruci yang meningkatkan kemampuan serta kejelasan dalam proses pengarsipan hasil review perekayasa, verifikasi data teknis kapal yang sedang dalam proses approval, serta transparansi proses approval itu sendiri.

Pada tahun 2014, upaya pengembangan teknologi informasi perusahaan memungkinkan:

- penambahan menu hitung tarif di website BKI,
- koneksi COps dan website sehingga tarif yang dihitung di website mencerminkan tarif sebenarnya,
- penambahan menu SOA di website BKI, serta
- penggunaan *SMS One Time Password* bagi pemilik/operator kapal yang ingin melihat tarif periodik dan penerimaan kelas di website BKI.

Technology

BKI utilizes and develops technology in the course of improving its performance and quality of service (QoS). From the service office network that are connected by the company's VPN to the company's website that provide access to survey status, audit, status, drawing status, and invoice status, BKI has been using information technology to improve its performance and quality of service for quite some time.

BKI collaborates with the largest telecommunication company in Southeast Asia to develop the masterplan of the company's information technology development and governance. Both have been completed in 2014, so that the whole IT application system is now integrated.

The BKI Dashboard Mobile System was developed to support the classification service production process monitoring, so that field information are available online.

The BKI One Gate System was developed to support the implementation of corporate governance, particularly the management information system. In 2014, this system has been complemented with features such as the employee competence information, employment status information, employee remuneration information, and automatic email notification.

In terms of applications, the company has finalized the development of Finops, COps, CSOps applications, so information technology support for management and customers has improved.

Furthermore, BKI has developed the Dewaruci software that enhances the ability of and clarity within the process of archiving results of engineering reviews, technical data verification for ships in the approval process, and the transparency of the approval process itself.

In 2014, information technology development process of the company allowed:

- the addition of the tariff calculation menu at BKI's website,
- the COps-website connection so that tariff calculations at the website reflect actual tariffs,
- the addition of the SOA menu at BKI's website, and
- the utilization of SMS One Time Passwords for ship owner/operators that want to see tariff periodically and class admission at BKI's website.

Profil Korporasi

BKI akan terus mengembangkan teknologi perusahaan, terutama teknologi informasi, dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kinerja menuju badan klasifikasi kelas dunia.

Riset dan Pengembangan

BKI memiliki Departemen Riset dan Pengembangan Teknik untuk mengembangkan peraturan (*rules*), petunjuk (*guidelines*), dan standar teknik maritim lain yang menjamin keselamatan kapal, baik dalam pembuatannya maupun dalam pengoperasiannya.

Pada tahun 2014, BKI telah menyelesaikan:

- penelitian *Bow Height* kapal barang untuk perairan Indonesia, bekerja sama dengan Laboratorium LHI Surabaya BPPT;
- penelitian terhadap *Hull Form and Speed Loss* yang dilakukan oleh personil BKI yang sedang mengikuti program Doktor di Osaka University;
- penelitian tentang *Energy Efficiency* yang dilakukan oleh personil BKI yang mengikuti program Master di NTNU, Norwegia;
- penelitian *Accident Factors of Indonesian Ship Accidents* yang dilakukan oleh personil BKI yang mengikuti program Master di ITS, Surabaya, Indonesia;
- penelitian dan pembuktian perbandingan terbalik BKI *Rules for Hull* (vol. II);
- studi korosi untuk kapal tangki minyak
- studi karakteristik gelombang perairan Indonesia

Sementara itu, juga pada tahun 2014, BKI tengah menjalankan (belum selesai):

- penelitian dan pembuktian terbalik *Rules for Hull* (vol. II);
- penelitian lanjutan *Accident Factors in Indonesian Ship Accidents* yang dilakukan personil BKI yang sedang mengikuti program Doktor di Kobe University;
- penelitian bersama Class NK Jepang terhadap persyaratan *Calm Booy Mooring*;
- pengembangan *crewboat* berbahan bakar CNG yang dilakukan bersama galangan kapal di Gresik;
- penelitian bersama Ditjenhubla tentang *Bow Height* kapal penumpang untuk perairan Indonesia.

BKI will continue to develop the company's technology, particularly information technology, in the course of increasing customer satisfaction and to improve performance towards a worldclass classification society.

Research and Development

BKI has a Research and Development Department that develops rules, guidelines, and other maritime technical standards that ensure ship safety, both in terms of shipbuilding and ship operations.

In 2014, BKI has completed:

- research on *Bow Height* for freight ships in Indonesian waters, collaborating with BPPT's Laboratorium LHI Surabaya;
- research on *Hull Form and Speed Loss*, through a personnel of BKI that is enrolled in a doctoral program at Osaka University;
- research on *Energy Efficiency*, through a personnel of BKI that is enrolled in a master program at NTNU of Finland;
- research on *Accident Factors in Indonesian Ship Accidents*, through a personnel of BKI that is enrolled in a master program at ITS Surabaya;
- research and [pembuktian perbandingan terbalik] BKI *Rules for Hull* (Vol. II);
- study on corrosion for oil tanker ships
- study on wave characteristics of Indonesian waters

Furthermore, BKI has been conducting the following ongoing research and development in 2014:

- research and [pembuktian perbandingan terbalik] BKI *Rules for Hull* (Vol. II);
- advanced research on *Accident Factors in Indonesian Ship Accidents*, through a personnel of BKI that is enrolled in a doctoral program at Kobe University;
- joint research with Class NK on *Calm Booy Mooring* requirements;
- joint-development of CNG fuelled crewboard with a shipyard in Gresik;
- joint research with Ditjenhubla on *Bow Height* for passenger ships for Indonesian waters.

Corporate Profile

Pengembangan Teknik

Pada tahun 2014, BKI telah menyelesaikan:

- *Rules for Survey, welding dan machinery* edisi Januari 2015 pada bulan Desember 2014
- *Rules for Survey, Non Metalik, Automation, Electrical, Machinery, Welding, Chemical Ships* edisi Agustus 2014 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2014.
- *Guidance for A90, A80, A70 Notations and Class Notations*.
- Jurnal Teknik BKI "Propulsi" terbit Juni 2014.
- Seminar BKI-Wartsila bulan Oktober 2014.
- Pemberian RINA BKI AWARD kepada 5 PTN bulan Juni 2014.

Lebih jauh, BKI melanjutkan pengembangan *Rules/Guidelines* untuk MODU, YACHT, Kapal Ikan, Tongkang Baja, Island Waterway, HSC, Buckling & Ultimate, Certification Loading Computer System.

Seminar

Kegiatan Seminar dan Diklat:

- Menghadiri sidang *IMO Ship Design Committee* tanggal 2 Januari 2014.
- Menghadiri *FTK Business & Professional Gathering* di Surabaya tanggal 22 Februari 2014
- Mengikuti Training *Incident Investigation* oleh ABS Singapore diikuti 2 peneliti BKI pada tanggal 25-26 Februari 2014.
- Mengadakan Seminar BKI-Imarest tentang sosialisasi Rules BKI yang dihadiri 100 orang peserta pemakai jasa BKI di Hotel Meritus, Surabaya pada tanggal 17 Maret 2014.
- Melakukan sinergi BKI dengan RINA (*Royal Institute of Naval Architecture*) sebagai *Corporate Partner* di ITS Surabaya pada tanggal 18 Maret 2014.
- Melakukan presentasi dalam RINA (*Royal Institute of Naval Architecture*) Conference di Shanghai pada bulan April 2014.
- Menghadiri Sidang TMG ke 9 dalam forum ACS di Tokyo pada bulan Mei 2014.
- Menghadiri pertemuan ISO TC8 di Shanghai pada bulan Mei 2014.
- Mengikuti Training *Environmental Condition and Load* pada tanggal 22 – 23 Mei 2014.
- Mengadakan Sidang Komite Teknik pada tanggal 9 Juni 2014 untuk memvalidasi sejumlah Rules BKI dengan dihadiri perwakilan pemilik kapal, perwakilan galangan kapal, perwakilan asuransi, perwakilan

Technical Development

In 2014, BKI has completed:

- Rules for Survey, Welding and Machinery edition January 2015 that was completed in December 2014;
- Rules for Survey Non Metallic, Automation, Electrical, Machinery, Welding, Chemical Ships edition August 2014 that was published in August 2014;
- Guidance for A90, A80, A70 Notations and Class Notations
- BKI Technical Journal on "Propulsion" published in June 2014.
- BKI-Wartsila Seminar October 2014
- Awarding of RINA-BKI Award to 5 State Universities in June 2014

Furthermore, BKI has conducted ongoing development in terms of developing Rules/Guidelines for MODU, YACHT, Fishing Vessel, Steel Barge, Island Waterway, HSC, Buckling & Ultimate, Certification Loading Computer System.

Seminar

Seminar and Education & Training Activities:

- Attending the IMO Ship Design Committee conference on 2 January 2014
- Attending the PTK Business & Professional Gathering in Surabaya on 22 February 2014
- Enrolling 2 researchers of BKI in the Training Incident Investigation course of ABS Singapore, 25-26 February 2014
- Holding the BKI-Imarest Seminar on BKI Rules that is attended by 100 participants, representing customers of BKI, at the Maritus Hotel, Surabaya, on 17 March 2014
- Synergizing BKI and RINA (*Royal Institute of Naval Architecture*) as Corporate Partner at ITS Surabaya on 18 March 2014
- Presenting at the RINA Conference in Shanghai, April 2014
- Attending the Ninth TMG Conference in the ACS Forum in Tokyo, May 2014
- Attending the ISO TCB meeting in Shanghai, May 2014
- Enrolling in the Environmental Condition and Load Training, 22-23 May 2014
- Holding the Technical Committee Conference on 9 June 2014 to validate a number of BKI Rules, attended by representatives of ship owners, shipyards, insurance companies, the Government, and academics
- Holding the BKI-ACS seminar on 17 June 2014 in Jakarta, attended by 200 participants

Profil Korporasi

- Pemerintah dan perwakilan Akademisi.
- Mengadakan Seminar BKI – ACS tanggal 17 Juni 2014 di Jakarta yang dihadiri oleh 200 peserta.
- mengadakan Lomba Penulisan Skripsi (Beasiswa penelitian S1) dan telah diumumkan pemenangnya pada tanggal 25 Juni 2014.
- Mengadakan *In-house training Oil Tanker dan Bulk Carrier* tanggal 26-27 Juni 2014 kerjasama dengan DnV GL Academy yang diikuti 25 *Senior Surveyor* BKI.
- Mengadakan Training *Marine Investigation Course* yang diselenggarakan oleh KNKT pada tanggal 24 – 27 Juni 2014.
- Mengikuti *Workshop for The Implementation of Marpol Annex-VI for Emission Reduction and Green House Gases From Ships, Under the Directorate General of Sea Transportation, Indonesia (DGST) – Maritimer and Port Authority of Singapore (MPA) Training* pada tanggal 23 – 27 Juni 2014.
- Mengirimkan Sdr. Hardika untuk melanjutkan studi S2 di Southampton University, July 2014.
- Mengikuti pertemuan *International Ship and Offshore Structure Congress (ISSC)* sebagai anggota Aubkomite Natural Gas & Transport pada tanggal 15 dan 16 September 2014 di Delf University of Technology, Belanda.
- Mengikuti seminar *International Ship Stability Workshop 2014 (ISSW)*, pada tanggal 29 September 2014 di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai pembicara.
- Presentasi di konferensi TEAM di Istambul, Turki bulan September 2014
- Presentasi di ICSOT di Makassar, November 2014
- Mengikuti sidang ACS-EC 22 di Kobe, November 2014
- Presentasi Martee di Surabaya, 24-26 Oktober 2014
- Mengikuti sidang IMO MSC pada 17-21 November 2014 di London.
- Holding the Honor Thesis Award (research scholarships for undergraduates), winners announced on 25 June 2014
- Conducting In-House Training on Oil Tankers and Bulk Carries, 26-27 June 2014, in collaboration with DnV GL Academy, involving 25 Senior Surveyors of BKI
- Organizing the Marine Investigation Course Training that was held by KNKT on 24-27 June 2014
- Participated in the Workshop for the Implementation of Marpol Annex-VI for Emission Redcution adn Green House Gases From Ships, under the Directorate General of Sea Transportation (DGST) Indonesia - Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) Training, 23-27 June 2014
- Sending Mr. Hardika to continue his graduate studies at the Southampton University, July 2014
- Attending the International Ship and Offshore Structure Congress (ISSC) Meeting as a member of the Natural Gas & Transport Sub-committee, 15-16 September 2014, at the Delft University of Technology, the Netherlands
- Presented at the 2014 International Ship Stability Workshop (ISSWI), 29 September 2014 in Kuala Lumpur
- Presented at the TEAM Conference in Instanbul, Turkey, September 2014
- Presented at ICSOT in Makassar, November 2014
- Attended the ACS-EC 22 Conference in Kobe, November 2014
- Presented at Martee in Surabaya, 24-26 October 2014
- Attended the IMO MSC Conference, 17-21 November 2014, in London

Jaringan Kerjasama

Sesama BUMN

BKI bekerja sama dengan BUMN pengguna jasa BKI, di antaranya ASDP, Pelni, Pusri, Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV dan Rukindo, dengan ruang lingkup pendidikan dan pelatihan, jasa konsultansi, asistensi supervisi, sertifikasi, dan jasa lain yang relevan.

Kerjasama dengan Mitra Usaha Lain

- a. Di bidang klasifikasi telah dilakukan kerjasama antara BKI dengan asosiasi terkait, antara lain INSA (pelayaran), GAPASDAP, IPERINDO (galangan) dan asosiasi asuransi dalam meningkatkan industri pelayaran nasional, termasuk peran BKI sebagai badan klasifikasi;

Partnership Networking

With Fellow SOEs

BKI partners with SOEs that are customers of BKI's services, including among others ASDP, Pelni, Pusri, Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV and Rukindo, with the scope of education and training, consultancy services, supervision assistance, certification, and other related services.

With Other Business Partners

- a. In the field of classification: partnership of BKI with related associations, including among others INSA (shipping), GAPASDAP, IPERINDO (shipyard), and insurance associations in the course of developing the national shipping industry, including strengthening the role of BKI as a classification society;

Corporate Profile

- b. Di bidang klasifikasi telah dilakukan kerjasama dengan *American Bureau of Shipping* (ABS), *Korean Register* (KR), dan *Nippon Kaiji Kyokai* (NK) terkait dengan pengembangan Rules & Regulation;
- c. Di bidang statutoria telah dilakukan kerjasama dengan *Istmuz Bureau of Shipping* (IBS) untuk melakukan survey statutoria bagi kapal-kapal berbenda Panama dan Belize di perairan Indonesia;
- d. Di bidang komersial telah dilakukan kerjasama dalam kegiatan usaha dengan beberapa mitra usaha strategis, seperti misalnya TUV Rheinland, TUV Nord, dan Bureau Veritas Indonesia;
- e. Di bidang komersial juga telah dilakukan kerjasama dengan ABS, BV, dan DNV, terkait dengan penelitian dan pengembangan energi alternatif;
- f. Pertukaran informasi di lingkungan *Association of Asian Classification Societies* (ACS) dalam rangka partisipasi aktif terhadap peraturan yang dibahas dalam forum IMO;
- g. Kerjasama dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terkait inspeksi peti kemas berbasis IT;
- h. Kerjasama dengan perguruan tinggi ITS, UnHas, dan UI dalam bidang penelitian dan pengembangan Rules BKI.

- b. in the field of classification: partnership with American Bureau of Shipping (ABS), Korean Register (KR), and Nippon Kaiji Kyokai (NK) related to the development of Rules & Regulation;
- c. in the field of statutory: partnership with Istmuz Bureau of Shipping (IBS) to conduct statutory surveys for Panama and Belize flagged ships in Indonesian waters;
- d. in the field of commercial services: business partnerships with several strategic business partners such as TUV Rheinland, TUV Nord, and Bureau Veritas Indonesia;
- e. in the field of commercial services: partnership with ABS, BV, and DNV related to research and development of alternative energy;
- f. exchange of information with the Association of Asian Classification Societies (ACS) in the course of actively participating in the discussion of rules at IMO fora;
- g. partership with the Indonesian association of logistics and freightforwarding (ALFI) related to the IT-based inspection of containers;
- h. partnership with the tertiary education institutions of ITS, UnHas, and UI related to the research and development of BKI Rules.

Kerjasama Luar Negeri

Hingga akhir tahun 2014, perjanjian kerjasama dengan badan klasifikasi asing anggota IACS yang masih berjalan adalah sebagai berikut:

Foreign Partnership

Until year-end of 2014, active partnerships with foreign classification societies members of IACS included:

Perjanjian kerjasama bidang kegiatan klasifikasi
Cooperation agreement in the field of classification

No	Nama Badan Klasifikasi Name of Calssification Society	Negara Country	Bentuk Kerjasama Form of Partnership
1	American Bureau of Shipping	USA	Dual Class
2	Bureau Veritas	Prancis	Dual Class
3	China Classification Society	RRC	Mutual Representation
4	Det Norske Veritas	Norwegia	Dual Class
5	Germanisher Lloyd	Jerman	Mutual Representation
6	Hellenic Register of Shipping	Yunani	Mutual Representation
7	Indian Register of Shipping	India	Mutual Representation
8	Korean Register of Shipping	Korea Selatan	Mutual Representation
9	Korean Classification Society	Korea Utara	Mutual Representation
10	Lloyd's Register of Shipping	Inggris	Dual Class
11	Nipon Kaiji Kyokai	Jepang	Mutual Representation
12	Registrul Naval Roman	Rumania	Mutual Representation
13	Rinave Portugeusa	Portugal	Mutual Representation
14	Ships Classification Malaysia	Malaysia	Mutual Representation
15	Vietnam Register	Vietnam	Mutual Representation
16	Polski Rejestr Statko'w	Polandia	Mutual Representation
17	Registro Italiano Navale	Italia	Dual Class
18	Istmus Bureau Of Shipping	Panama	Mutual Representation

Profil Korporasi

Pemegang Saham

Seluruh (100%) saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam RUPS, Pemerintah diwakili oleh Kementerian BUMN.

Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, Perusahaan Ventura

BKI tidak memiliki ataupun memiliki saham pada entitas anak, perusahaan asosiasi, atau perusahaan ventura.

Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya

BKI belum melakukan pencatatan saham ataupun efek lainnya di bursa.

Pemeringkat Efek, Lembaga dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal

BKI belum menggunakan jasa pemeringkat efek, lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal.

Shareholder

All (100%) shares of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) are owned by the Government of Indonesia. The Government of Indonesia is represented in the GMS by the Ministry of SOEs.

Subsidiary, Associated Company, Venture Capital Company

BKI does not own shares of subsidiaries, associated companies, or venture capital companies.

Chronology of Listing of Shares or Other Securities

BKI has not conducted listing of shares or other securities at any bourse.

Securities Rating Agency, Capital Market Support Institution or Professional

BKI has used services of neither securities rating agencies nor capital market support institutions or professionals.

Corporate Profile

Pejabat Senior Kantor Pusat / Head Office Senior Officials



Saifuddin Wijaya
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



Arief Budi Permana, IR
Kepala Divisi Statutory
Head of Statutory
Division



Jamaluddin Gani
Kepala Satuan Pengawas
Intern
Head of Internal Control Unit



Zilzal HM, IR
Kepala Divisi Survey
Head of Survey Division



Agus Widjaja, IR
Kepala Divisi Manajemen
Strategi
Head of Strategic
Management Division



Hadi Soetrisno, IR
Kepala Divisi Teknikal
Head of Technical
Division



Taufik Hidayat, S.E., M.M.
Kepala Divisi Keuangan
Head of Financial Division



Abdul Ghofar, IR
Kepala Divisi Offshore
Head of Offshore Division



Nasaruddin, S.E.
Kepala Divisi Umum
Head of General
Division



Sugeng Yulianto, IR
Kepala Divisi Hubungan
Pelanggan
Head of Customer
Relation Division



Sudirman
Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management
Division



Jeffrey B Massie, IR
Kepala Divisi Sistem Manajemen
Head of Management System
Division



Agung Prihanto, IR
Kepala Divisi
Pengembangan
Usaha
Head of Business
Development Division



Asep Sutrisna S, S.H., M.M.
Kepala Divisi Human Capital
Head of Human Capital Division



Herry Sudradjat, S.H., M.M.
Kepala Divisi Pemasaran
Head of Marketing Division



Rahmadi S, IR
Kepala Divisi Teknologi
Informasi
Head of Information
Technology Division

Profil Korporasi

Alamat Kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) / Office Address of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat / Head Office

Jl. Yos Sudarso Kav. 38-40, Tanjung Priok, Jakarta Utara – 14320

Phone : (62-21) 4301017, 4301703, 4300993 Fax : (62-21) 43936175

e-mail : ho@bki.co.id

Jaringan Pelayanan Service Network	Klasifikasi dan Statutoria Classification and Statutory	Komersil Commercial
Belawan	Jl. Veteran No. 218 Belawan Medan – 20411 Phone : (62-61) 6941025 Fax : (62-61) 6941276 e-mail : bn@bki.co.id	Jl. Veteran No. 218 Belawan Medan – 20411 Phone : (62-61) 6941157, 6940370 Fax : (62-61) 6941276 e-mail : bnc@bki.co.id
Batam	Graha BKI, Jl. Yos Sudarso Kav. 5 Batam – 29421 Phone : (62-778) 433388, 429023, 429024, 451288 Fax : (61-778) 429020 e-mail : bm@bki.co.id	Graha BKI, Jl. Yos Sudarso Kav. 5 Batam – 29421 Phone : (62-778) 428284, 428438 Fax : (61-778) 429021 e-mail : bmc@bki.co.id
Pekanbaru	Jl. Arifin Achmad No. 40 Pekanbaru – 28282 Phone : (62-761) 8417295, 8417296 Fax : (62-761) 8417294 e-mail : pr@bki.co.id	Jl. Arifin Achmad No. 40 Pekanbaru – 28282 Phone : (62-761) 8417291, 8417292, 7662170 Fax : (62-761) 8417293, 7662180 e-mail : prc@bki.co.id
Jambi	Jl. Raden Bahrhun No, E11 RT. 11 / RW. 04 Kel. Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Jambi Phone : (62-741) 671107 Fax : (62-741) 671108 e-mail : jb@bki.co.id	Jl. Raden Bahrhun No, E11 RT. 11 / RW. 04 Kel. Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Jambi Phone : (62-741) 671107 Fax : (62-741) 671108 e-mail : jbc@bki.co.id
Palembang	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 226, 5 Ilir Palembang – 30115 Phone : (62-711) 713172, 713680 Fax : (62-711) 713173 e-mail : pb@bki.co.id	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 226, 5 Ilir Palembang – 30115 Phone : (62-711) 713171, 713172, 713680, 717151 Fax : (62-711) 713173 e-mail : pb@bki.co.id
Cilegon	Jl. Raya Bojonegara KM. 2 Ds Karang Tengah, Kec. Cibeber Cilegon, Banten – 42422 Phone : (62-254) 5751683, 8488692 Fax : (62-254) 5751682 e-mail : cg@bki.co.id	Jl. Raya Bojonegara KM. 2 Ds Karang Tengah, Kec. Cibeber Cilegon, Banten – 42422 Phone : (62-254) 5751683, 8488692 Fax : (62-254) 5751682 e-mail : cg@bki.co.id
Tanjung Priok	Jl Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok Jakarta utara – 14320 Phone : (62-21) 4301017, 4301703, 4300993, 4353291 Fax : (62-21) 4301702 e-mail : tp@bki.co.id	

Corporate Profile

Jaringan Pelayanan Service Network	Klasifikasi dan Statutoria Classification and Statutory	Komersil Commercial
Cirebon	Jl. Tuparev KM. 3 Cirebon – 45153 Phone : (62-231) 201816 Fax : (62-231) 205266 e-mail : cn@bki.co.id	Jl. Tuparev KM. 3 Cirebon – 45153 Phone : (62-231) 201816 Fax : (62-231) 205266 e-mail : cnc@bki.co.id
Semarang	Jl. Pamularsih No. 12 Semarang – 50148 Phone : (62-24) 7610399 Fax : (62-24) 7610422 e-mail : sm@bki.co.id	Jl. Pamularsih No. 12 Semarang – 50148 Phone : (62-24) 7610744 Fax : (62-24) 7610422 e-mail : smc@bki.co.id
Cepu	Perumahan Cepu Indah Regency Blok D No. 10 RW. 17, Kec. Cepu, Kab. Blora, Cepu Phone : (62-296) 4260165 Fax : (62-296) 4260165 e-mail : cu@bki.co.id	Perumahan Cepu Indah Regency Blok D No. 10 RW. 17, Kec. Cepu, Kab. Blora, Cepu Phone : (62-296) 4260165 Fax : (62-296) 4260165 e-mail : cuc@bki.co.id
Cilacap	Perum. Yaktapena Blok E No. 1 Donan Cilacap Phone : (62-282) 537777 Fax : (62-282) 537777 e-mail : cp@bki.co.id	Perum. Yaktapena Blok E No. 1 Donan Cilacap Phone : (62-282) 537777 Fax : (62-282) 537777 e-mail : cpc@bki.co.id
Surabaya	Jl. Kalianget No. 14 Surabaya – 60165 Phone : (62-31) 3295448, 3295449, 3295450, 3295451, 3295456 Fax : (62-31) 3294520, 3205451 e-mail : sb@bki.co.id	Jl. Kalianget No. 14 Surabaya – 60165 Phone : (62-31) 3295448, 3295449, 3295450, 3295451, 3295456 Fax : (62-31) 3294520, 3205451 e-mail : sbc@bki.co.id
Pontianak	Jl Gusti Hamzah No. 211 Pontianak – 78116 Phone : (62-561) 739579 Fax : (62-561) 743107 e-mail : pk@bki.co.id	Jl Gusti Hamzah No. 211 Pontianak – 78116 Phone : (62-561) 739579 Fax : (62-561) 743107 e-mail : pkc@bki.co.id
Banjarmasin	Jl. Skip Lama No. 19 Banjarmasin – 70117 Phone : (62-511) 3358311, 3350983 Fax : (62-511) 3350175 e-mail : bj@bki.co.id	Jl. Skip Lama No. 19 Banjarmasin – 70117 Phone : (62-511) 3367361 Fax : (62-511) 3350175 e-mail : bjc@bki.co.id

Profil Korporasi

Jaringan Pelayanan Service Network	Klasifikasi dan Statutoria Classification and Statutory	Komersil Commercial
Balikpapan		Jl. M.T. Haryono No. 8 Ring Road Balikpapan - 76111 Phone : (62-542) 876637, 876641 Fax : (62-562) 876639 e-mail : bpc@bki.co.id
Samarinda	Jl. Cipto Mangunkusumo Ruko Rapak Indah No. 10 Samarinda Seberang, Samarinda – 75132 Phone : (62-541) 261423 Fax : (62-541) 261425 e-mail : sd@bki.co.id	
Makassar	Jl. Sungai Cerekang No. 28 Makassar – 90115 Phone (62-411)3611993 Fax : 62-411) 36515460 e-mail : ms@bki.co.id	Jl. Sungai Cerekang No. 28 Makassar – 90115 Phone (62-411)3611993 Fax : 62-411) 36515460 e-mail : msc@bki.co.id
Bitung	Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet Bitung – 95516 Phone : (62-438) 38720, 38721 Fax : (62-438) 21828 e-mail : bt@bki.co.id	Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet Bitung – 95516 Phone : (62-438) 34273 Fax : (62-438) 21828 e-mail : btc@bki.co.id
Ambon	Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo Ambon – 97232 Phone : (62-911) 362805, 362806 Fax : 62-911) 361105 e-mail : ab@bki.co.id	Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo Ambon – 97232 Phone : (62-911) 362805, 362806 Fax : 62-911) 361105 e-mail : abc@bki.co.id
Sorong	Jl. Jend. Sudirman No. 140 Sorong – 98414 Phone : (62-951) 322600 Fax : (62-951) 323870 e-mail : sr@bki.co.id	Jl. Jend. Sudirman No. 140 Sorong – 98414 Phone : (62-951) 322600 Fax : (62-951) 323870 e-mail : src@bki.co.id
Singapura	7500A Beach Road #11-301, The Plaza Singapore – 199597 Phone : 65-68830651, 68830634, 68830643 Fax : 65-63393631 e-mail : sg@bki.co.id, class@bki.com.sg	

Corporate Profile

Jaringan Pelayanan Service Network	Klasifikasi dan Statutoria Classification and Statutory	Komersil Commercial
Strategic Business Unit (SBU) Marine		Jl Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok Jakarta utara – 14320 Phone : (62-21) 4300139, 4300932 Fax : (62-21) 43937409 e-mail : mns@bki.co.id
Strategic Business Unit (SBU) Energy		Jl Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok Jakarta utara – 14320 Phone : (62-21) 43912070 Fax : (62-21) 43937415 e-mail : ifs@bki.co.id
Strategic Business Unit (SBU) Industry		Jl Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok Jakarta utara – 14320 Phone : (62-21) 4300762, 43938304, 43912806, 43910822 Fax : (62-21) 43900972 e-mail : ids@bki.co.id
Strategic Business Unit (SBU) Off Shore		Jl Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok Jakarta utara – 14320 Phone : (62-21) 4301017, 4301703, 4300993 Fax : (62-21) 43936175 e-mail : osh@bki.co.id

Analisa & Pembahasan Manajemen

Berkembang Menuju Badan Klasifikasi Kelas Dunia

Developing Towards a World-class
Classification Society



Pada tahun 2014, BKI meningkatkan kepatuhan terhadap standar IACS dalam rangka menuju badan klasifikasi kelas dunia

Management Discussion & Analysis



In 2014, BKI enhance compliance to IACS standards towards becoming a worldclass classification society

Analisa & Pembahasan Manajemen

Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha

Operational Overview Per Business Segment



Tinjauan Operasi

Pendahuluan

Operasi BKL terbagi atas layanan klasifikasi dan statutoria serta layanan non-klasifikasi atau komersil.

Layanan klasifikasi terbagi atas klasifikasi kelas tunggal dan klasifikasi kerja sama asing; masing-masing terbagi lagi atas kegiatan survei, *drawing approval*, dan kegiatan yang terkait statutori.

Review of Operations

Introduction

The operations of BKL are divided into classification and statutory services and non-classification or commercial services.

The classification services are divided into single class classification and joint foreign class classification; each are further divided into survey, drawing approval, and activities related to statutes.

Management Discussion & Analysis

Adapun layanan komersil terbagi atas jasa pengujian, inspeksi, rekayasa teknik, marine, serta kegiatan lain-lain dan *share partner*.

BKI tidak melakukan proses produksi ataupun pengolahan bahan baku. Perkembangan operasionalnya ditentukan oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlengkapan dan sistem pendukungnya.

Klasifikasi

Pada tahun 2014, layanan klasifikasi klas tunggal mencapai 322.230.828 poin; tumbuh 18,95% dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh kegiatan drawing approval yang tumbuh dari 42.216 poin pada tahun 2013 menjadi 55.547 poin pada tahun 2014, atau tumbuh 31,58%.

Sementara itu, layanan klasifikasi kerja sama asing mencapai 56.579.544 poin; tumbuh 267,71% dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh klasifikasi klas ganda dalam negeri yang tumbuh dari 13.676.286 poin menjadi 37.959.599 poin, atau tumbuh 287,48%. Peningkatan yang pesat ini disebabkan terutama oleh adanya pelaksanaan survey dengan ABS (*American Bureau of Shipping*) atas proyek FPSO yang nilainya cukup material.

Selengkapnya, perkembangan produksi layanan klasifikasi 2013-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Commercial services are divided into testing, inspection, engineering, marine, and others as well as share partnering.

BKI conducts neither production processes nor raw material processing. The development of its operations is defined by the enhancements of its human resources, tools and supporting systems.

Classification

In 2014, single class classification services reached 322,230,828 points, representing a growth of 18.95% compared to 2013. The growth was mainly driven by drawing approval activities, which grew from 42,216 points in 2013 to 55,547 points in 2014, or 31.58%.

Joint foreign class classification reached 56,579,544 points; representing growth of 267.71% compared to 2013. The growth was mainly driven by domestic double class classification activities that increased from 13,676,286 points to reach 37,959,599 points, or by 287.48%. The rapid increase was mainly caused by a survey on an FPSO project with material value that was conducted together with the American Bureau of Shipping.

Details of the 2013-2014 classification services production development are presented in the following table:

Realisasi Produksi Jasa Klasifikasi (dalam poin) Classification Services Production Achievement (in points)	2014	2013	▲
Kelas Tunggal BKI (Dalam Negeri) / Single Class BKI (Domestic)	303,627,645	254,476,695	19,31%
Kelas Tunggal BKI (Luar Negeri) / Single Class BKI (Abroad)	322,230,828	270,889,699	18,95%
Kelas Tunggal BKI oleh Badan Klasifikasi Asing (Luar Negeri) / Single Class BKI by Foreign Classification Society (Abroad)	26,809	23,674	13,24%
Kelas Ganda (Dalam Negeri) / Double Class (Domestic)	37,959,599	13,676,286	177,56%
Kelas Ganda (Luar Negeri) / Double Class (Abroad)	18,593,136	13,059,401	42,37%
Kelas Asing di Indonesia / Foreign Class in Indonesia	-	11,174	-100%

Analisa & Pembahasan Manajemen

Laba usaha klasifikasi

Rp 161,83 M

Net income of classification

IDR 161.83 B



Komersil

Pada tahun 2014, layanan komersil atau non-klasifikasi mencapai 286.534.712 *mandays*; tumbuh 149,45% dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh jasa rekayasa teknik yang tumbuh dari 7.913.416 *mandays* menjadi 71.878.781 *mandays*, atau tumbuh 908,32%. Peningkatan yang drastis ini disebabkan terutama oleh didapatkannya proyek-proyek baru komersil yang merupakan pengembangan produk jasa komersil, misalnya *Under Water Survey* sektor Migas dan sertifikasi pada industri umum.

Selengkapnya, perkembangan produksi layanan komersil 2013-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Realisasi Produksi Jasa Komersial (dalam mandays) Commercial Services Production Achievement (in mandays)	2014	2013	▲
Pengujian / Testing	90.103.255	64.963.926	38,70%
Inspeksi / Inspection	110.695.593	67.400.514	64,24%
Rekayasa Teknik / Engineering	71.878.781	7.913.416	908,32%
Perkapalan / Marine	13.714.083	69.365.549	-80,23%
Lain-lain / Others	143.000	3.314.846	-95,69%
Share Partner	-	(21.229.810)	-

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen (tidak diaudit)

Pada tahun 2014, pendapatan neto klasifikasi mencapai Rp 474,69 M sedangkan pendapatan neto komersil mencapai Rp 281,97 M.

Total biaya klasifikasi mencapai Rp 312,87 M sedangkan total biaya komersil mencapai Rp 249,10 M.

Laba usaha klasifikasi mencapai Rp 161,83 M sedangkan laba usaha komersil mencapai Rp 32,86 M.

Rasio laba usaha dibandingkan pendapatan neto untuk klasifikasi adalah 34,09% sedangkan untuk komersil adalah 11,65% dan pada tahun 2013, rasio laba usaha untuk klasifikasi dan untuk komersil adalah berturut-turut 31,33% dan 11,62%. Dengan perolehan margin perusahaan tersebut masih lebih baik dibandingkan suku bunga deposito yang berlaku.

Commercial

In 2014, the commercial or non-classification services reached 286,534,712 *mandays*; increasing by 149.45% compared to 2013. The growth was mainly driven by engineering services production that increased from 7,913,416 *mandays* to become 71,878,781 *mandays*, or by 908.32%. The drastic increase was mainly caused by commercial services product development that resulted in the acquisition of new products, such as for instance *under water surveys* in the oil and gas sector and certification in the industrial sector.

Selengkapnya, perkembangan produksi layanan komersil 2013-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Segment Revenues and Profitability (not audited)

In 2014, classification revenue of reached IDR 474.69 B whereas commercial revenue reached IDR 281.97 B.

Total costs of classification reached IDR 312.87 B whereas total costs of commercial reached IDR 249.10 B.

Net income of classification reached IDR 161.83 B whereas net income of commercial reached IDR 32.86 B.

The net income versus revenue margin was 34.09% for classification and 11.65% for commercial; in 2013, the net income versus revenue margin was for classification and for commercial was respectively 31.33% and 11.62%. The margins remained higher than prevailing time deposit interest rates.

Management Discussion & Analysis

Jumlah aset lancar

Rp 455,37 M

Total current assets

IDR 455.37 B



Analisis Kinerja Keuangan

Aset

Pada tahun 2014, total aset mencapai Rp 597,19 M, naik 47,29% dibandingkan total aset tahun 2013 yang mencapai Rp 405,46 M. Kenaikan ini didorong terutama oleh pertumbuhan jumlah aset lancar.

Jumlah aset lancar mencapai Rp 455,37 M, naik 65,91% dibandingkan jumlah aset lancar tahun 2013 yang mencapai Rp 274,46 M. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh pertumbuhan piutang usaha dan tagihan bruto sebagai dampak peningkatan pendapatan. Piutang usaha meningkat dari Rp 158,18 M ke Rp 233,45 M (naik 47,58%). Tagihan bruto meningkat dari Rp 0,30 M ke Rp 39,16 M (naik 14x).

Jumlah aset tidak lancar mencapai Rp 141,82 M, naik 8,26% dibandingkan jumlah aset tidak lancar tahun 2013 yang mencapai Rp 131,00 M. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh pertumbuhan aset tetap, yaitu dari Rp 127,71 M menjadi Rp 137,99 M (naik 8,05%) karena adanya investasi.

Liabilitas

Pada tahun 2014, total liabilitas mencapai Rp 137,91 M, naik 79,43% dibandingkan total liabilitas tahun 2013 yang mencapai Rp 76,86 M. Kenaikan ini didorong terutama oleh pertumbuhan jumlah liabilitas lancar.

Jumlah liabilitas lancar meningkat 93,45% dari Rp 62,6 M pada tahun 2013 menjadi Rp 121,10 M pada tahun 2014. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan:

- utang usaha dari Rp 2,10 M pada tahun 2013 menjadi Rp 8,24 M pada tahun 2014 (naik 2,9x);
- utang lain-lain dari Rp 10,71 M pada tahun 2013 menjadi Rp 17,11 M pada tahun 2014 (naik 59,76%);
- utang biaya dari Rp 14,36 M pada tahun 2013 menjadi Rp 28,94 M pada tahun 2014 (naik 101,53%);
- utang pajak dari Rp 31,07 M pada tahun 2013 menjadi Rp 59,74 M pada tahun 2014 (naik 92,27%); dan
- utang bruto dari Rp 4,61 M pada tahun 2013 menjadi Rp 9,05 M pada tahun 2014 (naik 96,31%).

Analysis of Financial Performance

Assets

In 2014, total assets reached IDR 597.19 B, increasing by 47.29% compared to total assets of 2013 that reached IDR 405.46 B. The increase was mainly driven by the growth of current assets.

Total current assets reached IDR 455.37 B, increasing by 65.91% compared to total current assets of 2013 that reached IDR 274.46 B. The increase was mainly driven by the growth of receivables as a consequence of the increase of revenues. The receivables account increased from IDR 158.18 B to IDR 233.45 B (a 47.58% increase).

Total non-current assets reached IDR 141.82 B, increasing by 8.26% compared to total non-current assets of 2013 that reached IDR 131.00B. The increase was mainly driven by the growth of fixed assets, namely from IDR 127.71 B to IDR 137.99 B (an 8.05% increase) that was caused by investments.

Liabilities

In 2014, total liabilities reached IDR 137.91 B, increasing by 79.43% compared to total liabilities of 2013 that reached IDR 76.86 B. The increase was mainly driven by the growth of current liabilities.

Total non current liabilities increased by 93.45% from IDR 62.6 B in 2013 to IDR 121.10 B in 2014. The increase was driven by the growth of:

- account payables from IDR 2.10 B in 2013 to IDR 8.24 B in 2014 (a 2.9x increase);
- other payables from IDR 10.71 B in 2013 to IDR 17.11 B in 2014 (a 59.76% increase);
- debt costs from IDR 14.36 B in 2013 to IDR 28.84 B in 2014 (a 101.53% increase);
- tax payables from IDR 31.07 B in 2013 to IDR 59.74 B in 2014 (a 92.27% increase); and
- gross debt from IDR 4.61 B in 2013 to IDR 9.05 B in 2014 (a 96.31% increase).

Analisa & Pembahasan Manajemen

Total pendapatan komprehensif lainnya

Rp 1,46 M

Total other comprehensive income

IDR 1.46 B



Adapun jumlah liabilitas jangka panjang meningkat 19,98% dari Rp 16,82 M pada tahun 2013 menjadi Rp 14,02 M pada tahun 2014. Liabilitas jangka panjang BKL pada tahun 2013 dan 2014 berupa hanya provisi imbalan karyawan jangka panjang.

Manfaat dari peningkatan liabilitas ini adalah tersedianya modal kerja untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak melakukan pinjaman yang mengikat dengan pihak ketiga.

Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat dari Rp 451,98 M pada akhir tahun 2013 menjadi Rp 459,28 M pada akhir tahun 2014, atau naik 1,62%. Pertumbuhan tersebut didorong terutama oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, yaitu dari Rp 150 M pada tahun 2013 menjadi Rp 255 M pada tahun 2014, atau naik 70,00%.

Dampak Manfaat dari pertumbuhan ekuitas ini adalah perusahaan dapat menggunakan dana ini untuk kegiatan peningkatan/pertumbuhan kinerja.

Pendapatan, Beban, Laba, Pendapatan Komprehensif Lainnya, Total Laba Komprehensif

Pada tahun 2014, pendapatan mencapai Rp 756,66 M, naik 36,29% dari pendapatan tahun 2013 yang mencapai Rp 555,20 M.

Laba kotor mencapai 588,87 M, naik 30,39% dari pendapatan tahun 2013 yang mencapai Rp 451,62 M. Laba usaha mencapai Rp 194,69 M, naik 42,98% dari laba usaha tahun 2013 yang mencapai Rp 136,17 M. Laba bersih mencapai Rp 145,17 M, naik 38,11% dari laba bersih tahun 2013 yang mencapai Rp 105,11 M.

Total pendapatan komprehensif lainnya mencapai Rp 1,46 M, naik 18,70% dari total pendapatan komprehensif lainnya pada tahun 2013 yang mencapai Rp 1,23 M.

Furthermore, total non-current liabilities increased by 19.98% from IDR 16.82 B in 2013 to IDR 14.02 B in 2014. The non-current liabilities of BKL in 2013 and 2014 comprised only employee long-term benefits provisions.

The impact of the increased liabilities is the availability of working capital for the company's operations while avoiding secured loans.

Equity

Total equity increased from IDR 451.98 B at the end of 2013 to become IDR 459.28 B at the end of 2014, increasing by 1.62%. The growth was mainly driven by the increase of placed and paid-in capital, namely from IDR 150 B in 2013 to IDR 255 B in 2014, or an increase of 70%.

The impact of the equity growth was allowing the company to tap into the fund to finance performance enhancement activities.

Revenues, Costs, Profit, Other Comprehensive Income, and Total Comprehensive Income

In 2014, revenues reached IDR 756.66 B, increasing by 36.29% from the revenues of 2013 that reached IDR 555.20 B.

Gross profit reached IDR 588.86B, increasing by 30.39% from the gross profit of 2013 that reached IDR 451.62 B. Operational profit reached IDR 194.69 B, increasing by 42.98% compared to operational profit of 2013 that reached IDR 136.17 B. Net profit reached IDR 145.17 B, increasing by 38.11% from net profit of 2013 that reached IDR 105.11 B.

Total other comprehensive income reached IDR 1.46 B, increasing by 18.70% from total other comprehensive income of 2013 that reached IDR 1.23 B.

Management Discussion & Analysis

Total laba komprehensif

Rp 146,63 M

Total comprehensive profit

IDR 146.63 B



Adapun total laba komprehensif pada tahun 2014 mencapai Rp 146,63 M, naik 37,87% dari total laba komprehensif pada tahun 2013 yang mencapai Rp 106,35 M.

Penyebab utama dari perkembangan kemampulabaan ini adalah berhasilkan kegiatan operasional perusahaan dimana pertumbuhan pendapatan diikuti dengan efisiensi biaya.

Arus Kas

Pada 31 Desember 2014, BKI mencatat kas & setara kas sebesar Rp 173,58 M, naik 62,32% dibandingkan kas & setara kas pada 31 Desember 2013 yang mencapai Rp 106,94 M. Kenaikan arus kas sebesar Rp 66,65 M ini didorong terutama oleh peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, yaitu sebesar Rp 47,94 M, dari Rp 68,65 M menjadi Rp 116,59 M, atau naik 69,83%. Saldo dan setara kas tersebut dapat menutupi 3 bulan kegiatan operasional perusahaan.

Kemampuan Membayar Utang

Pada tahun 2014, kemampuan membayar utang BKI secara umum tetap terjaga. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- Current ratio 2014 adalah 376,04% yang berarti liabilitas jangka pendek dijamin dengan aset lancar yang hampir empat kali lebih besarnya; adapun *acid test ratio* untuk 2014 sama dengan *current ratio*, yaitu 376,04%, sehingga liabilitas jangka pendek dijamin dengan kas, piutang, serta investasi jangka pendek yang hampir empat kali besarnya; bahkan, lebih jauh, dengan *cash ratio* mencapai 143,34%, BKI mampu menyelesaikan liabilitas jangka pendek dengan aset lancar tanpa mengandalkan *inventory* ataupun piutang.
- *Debt/Equity Ratio* (DER) 2014 adalah 30,03% sedangkan DER 2013 adalah 23,35%; peningkatan DER pada umumnya dikaitkan dengan penurunan kemampuan membayar utang, namun perlu dipahami bahwa

Total comprehensive profit reached IDR 146.63 B in 2014, increasing by 37.87% compared to total comprehensive profit of 2013 that reached IDR 106.35 B.

The improvement of profitability was mainly caused by the successful implementation of cost efficiency in operational activities.

Cash Flow

On 31 December 2014, BKI recorded cash & cash equivalents to the amount of IDR 173.58 B, increasing by 62.32% compared to cash & cash equivalents at 31 December 2013 that reached IDR 106.94 B. The IDR 66.65 B increase of cash flow was mainly driven by the IDR 47.94 B increase of cash flow from operational activities, namely from IDR 68.65 B to IDR 116.59 B, or increasing by 69.83%. The balance of cash & cash equivalents supports three months of operational activities.

Solvency

Throughout 2014, the solvency of BKI was well maintained. The details are as follows:

- Current ratio of 2014 was 376.04%, which means that current liabilities are secured by almost four times larger current assets; the 2014 acid test ratio is equivalent to the current ratio, namely 376.04%, so that current liabilities are secured by cash, receivables, and short-term investments that combined are four times larger; furthermore, with a cash ratio of 143.34%, BKI is able to repay its current liabilities with its current assets relying neither on inventories nor receivables.
- The 2014 Debt/Equity Ratio (DER) was 30.03% while the 2013 DER was 23.35%; the increase of DER is mainly related to the increase of current liabilities and the addition of paid-in capital, but it is worth emphasizing that BKI's current liabilities do not include bank loans or liabilities towards financial institutions, but rather

Analisa & Pembahasan Manajemen

peningkatan ini terkait terutama dengan peningkatan liabilitas lancar dan penambahan modal disetor, dan perlu dijelaskan pula bahwa liabilitas lancar BKI tidak mencakup utang bank ataupun utang lembaga pembiayaan, melainkan utang usaha kepada share partner, utang lain-lain kepada pemasok/penyedia jasa, utang biaya, utang pajak, serta utang bruto yang sesungguhnya merupakan uang muka survei.

account payables to share partners, other payables to suppliers/service providers, cost payables, tax payables, and advances for surveys.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013, kemampuan menagih piutang BKI menurun. *Collection period 2014* adalah 113 dan *collection period 2013* adalah 104. Penurunan kemampuan menagih piutang BKI ini terkait dengan menurunnya kemampuan keuangan debitur sebagai dampak banyaknya kapal yang tidak dioperasikan karena larangan ekspor barang tambang mentah.

Collectibility

Compared to 2013, BKI's collectibility decreased in 2014. The collection period of 2014 was 113 days, whereas in 2013 it was 104 days. The decrease is related to the the lower financial capabilities of debtors due to the fact that many ships were not operated following the ban of raw mineral exports.

Struktur Permodalan

Pada tahun 2014, modal disetor BKI meningkat 70,00% dan menjadi Rp 255,00 M. Manajemen tidak perlu dan tidak melakukan restrukturisasi utang pada tahun 2014. Kebijakan peningkatan modal disetor yang berasal dari cadangan terkait sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-539/MBU/09/2014 tanggal 17 September 2014. Menteri BUMN merupakan wakil Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham tunggal BKI.

Capital Structure

In 2014, BKI's paid-in capital increased by 70.00% to become IDR 255.00 B. The Management is of the opinion that debt restructurization was not necessary and did not conduct debt restructurization in 2014. The increase of paid-in capital was financed by reserves in accordance to the Letter of the Minister of SOEs No. S-539/MBU/09/2014 of 17 September 2014. The Minister of SOEs is the representative of the Government of Indonesia as the sole shareholder of BKI.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Pada tahun 2014, BKI tidak melakukan ikatan yang bersifat material untuk investasi barang modal. Investasi tersebut mencakup:

- tanah dan bangunan sebesar Rp 2,17 M;
- kendaraan bermotor sebesar Rp 1,82 M;
- inventaris golongan I sebesar Rp 5,45 M;
- inventaris golongan II sebesar Rp 1,42 M;
- inventaris golongan III sebesar Rp 3,71 M;
- aset dalam proses sebesar Rp 10,89 M.

Manajemen menggunakan pembiayaan investasi yang bersumber dari dana internal yaitu cadangan atas pembagian laba perusahaan tahun buku 2013 dan biaya penyusutan tahun 2013.

Material Binding for Capital Good Investments

In 2014, BKI has not entered into material bindings for capital goods investment. Nevertheless, investments included:

- land and buildings at IDR 2.17 B;
- motorized vehicles at IDR 1.83 B;
- Golongan I inventories at IDR 5.45 B;
- Golongan II inventories at IDR 1.42 B;
- Golongan III inventories at IDR 3.71 B;
- assets in process at IDR 10.89 B.

The Management financed the investments with internal sources, namely reserves derived from the company's profit in the fiscal year of 2013 and amortization costs of 2013.

Management Discussion & Analysis

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Setelah tanggal laporan akuntan sampai dengan penerbitan laporan tahunan ini tidak terjadi kejadian yang mengandung informasi dan atau fakta material.

Prospek Usaha

Manajemen berpandangan prospek usaha BKI 2015 yang utama berasal dari kapal berbendera Indonesia wajib kelas. Prospek usaha tersebut dipengaruhi kondisi industri, ekonomi, dan pasar internasional.

Kondisi Industri

Pada tahun 2014, kapal-kapal berbendera Indonesia wajib kelas berjumlah 23.000 (sumber: Ditkapel 2014) dan baru 10.513 yang terdaftar dalam Register Aktif BKI.

Pada tahun 2015, jumlah kapal diperkirakan akan bertambah 10 kapal container 15.000 DWT atau 1.000 TEUs, 8 kapal barang perintis setara 208 TEUs, serta 50 kapal pelayaran rakyat (sumber: Bappenas 2015).

Karena itu, Manajemen berpendapat prospek usaha utama BKI untuk tahun 2015 berupa kapal-kapal berbendera Indonesia wajib kelas yang telah ada.

Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia. IMF memprakirakan ekonomi dunia tumbuh pada tingkat 3,50% pada tahun 2015. Bank Dunia dan IMF memprakirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,50-5,80% pada tahun 2015, sedangkan pemerintah memprakirakan tingkat pertumbuhan 5,70%.

Dengan tingkat pertumbuhan seperti ini, ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan permintaan kapal seperti dijelaskan sebelumnya terutama dari implementasi kebijakan dan program pemerintah, yaitu Kebijakan Poros Maritim dan Program Tol Laut. BKI siap untuk mendukungnya dengan jaringan pelayanan yang paling luas di Indonesia.

Kondisi Pasar Internasional

Untuk memperluas peluang di pasar internasional, BKI perlu meningkatkan status kinerjanya dan ikut mendorong peningkatan status *Flag State* Indonesia pada PSC Tokyo MOU, serta menjadi anggota IACS.

Material Information and Facts After the Date of the Auditor's Report

After the date of the auditor's report towards the publication of this annual report there were no events that relate to material information and or facts.

Business Prospects

The Management is of the opinion that BKI's business prospects of 2015 are mainly to be found in the segment of class obligatory Indonesian flagged ships. This business prospect is influenced by industrial, economic, and international market conditions.

Industrial Condition

In 2014, class obligatory Indonesian flagged ships amounted to 23,000 (source: Ditkapel 2014) and only 10,513 were registered in BKI's Active Register.

In 2015, the size of the fleet is expected to increase with addition of 10 container vessels of the size of 15,000 DWT or 1,000 TEUs, 8 Perintis bulk carriers equivalent to 208 TEUs, and 50 Pelayaran Rakyat ships (source: Bappenas 2015).

Therefore, the Management believes that the main prospect of BKI for 2015 is to be found among existing class obligatory Indonesian flagged ships.

Economic Condition

Indonesia's economic growth is expected to decelerate in line with global economic developments. The IMF predicts that global economy will grow by 3.50% in 2015. The World Bank and IMF predict that Indonesia's economy will grow at the rate of around 5.50-5.80% in 2015, while the government predicts a growth rate of 5.70%.

With this growth rate, the Indonesian economy is predicted to experience an increase in the demand for ships as mentioned before, mainly due to the implementation of government policies and programs, in particular the Maritime Axe Policy and the Sea Toll Program. BKI is ready to support the implementation with the largest service network in Indonesia.

International Market Condition

To improve its chances in the international market, BKI has to increase its state of performance and help to improve the Flag State status of Indonesia at the PSC Tokyo MOU, and become a member of IACS.

Analisa & Pembahasan Manajemen

Pada tahun 2014, status kinerja BKI tetap berada dalam kategori *medium performance* dan *Flag State* Indonesia tetap berada dalam *black list*. Akan tetapi, kinerja BKI dipandang membaik dari *excess factor* 0,09 pada tahun 2013 ke 0,08 pada tahun 2014.

Terkait keanggotaan IACS, sistem manajemen kualitas BKI telah disertifikasi oleh British Standard Institute, salah satu lembaga sertifikasi akreditasi yang ditunjuk oleh IACS untuk melakukan assessment badan klasifikasi sesuai persyaratan IACS-QSCS, dan ditargetkan mendapat IACS-QSCS *compliance* pada tahun 2015.

Prakiraan Pertumbuhan

Dengan kondisi ini, Manajemen memproyeksikan pertumbuhan pendapatan sebesar 26,08% pada tahun 2015, yang terdiri atas pertumbuhan pendapatan klasifikasi dan statutoria sebesar 15,40% dan pertumbuhan pendapatan komersil sebesar 45,44%.

Jumlah kapal terdaftar pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 21.300 unit (29,33 juta BRT) dan jumlah kapal klas berlaku mencapai 12.500 unit (20,08 juta BRT).

Perbandingan Target dan Realisasi

Auditor independen Husni, Mucharam & Rasidi (akuntan publik terdaftar) telah mengevaluasi kinerja BKI pada tahun 2014 dalam hal perbandingan target dan realisasinya. Hasil evaluasi tersebut secara singkat disajikan di sini dalam hal pendapatan dan laba.

Adapun perbandingan target dan realisasi struktur permodalan yang disajikan di sini didasari evaluasi oleh Manajemen.

Pendapatan

Realisasi pendapatan bersih tahun 2014 adalah Rp 756,66 M, sedangkan anggarannya adalah Rp 754,24 M. Dengan demikian, BKI dapat melampaui target sebesar 0,32%. Pencapaian ini didorong oleh realisasi produksi bidang klasifikasi yang mencapai 377.280.649 poin, 17,44% lebih tinggi dibandingkan anggaran sebesar 321.247.940 poin. Sementara itu, realisasi produksi komersil adalah 260.835.307 *mandays*, atau 92,91% dari anggaran sebesar 280.746.800 *mandays*.

Laba

Realisasi laba komprehensif tahun 2014 adalah Rp 146,63 M, sedangkan anggarannya adalah Rp 143,21 M. Dengan demikian, BKI dapat melampaui target sebesar 2,39%. Pencapaian ini didorong oleh realisasi laba bersih setelah pajak sebesar Rp 145,17 M — 1,37% lebih besar daripada

In 2014, BKI's performance status was still in the category of medium performance and the Flag State of Indonesia remained in the black list. However, BKI's performance improved from the excess factor of 0.09 in 2013 to 0.08 in 2014.

Related to the IACS membership, the quality management system of BKI was certified by the British Standard Institute, one of the accredited certification bodies appointed by IACS to conduct assessments of classification societies in accordance to the IACS-QSCS requirements, and is targeted to reach IACS-QSCS compliance in 2015.

Growth Predictions

Within these conditions, the Management projects a revenue growth rate of 26.08% in 2015, which consists of a 15.40% growth in classification and statutory revenues and a 45.44% growth in commercial revenues.

In 2015, registered vessels are predicted to number 21,300 units (29.33 million BRT) and the number of active class ships reaches 12,500 units (20.08 million BRT).

Target vs Realization Comparison

The independent auditor Husni, Mucharam & Rasidi (register public accountant) has evaluated the performance of BKI in 2014 in terms of target-realization comparison. The results of the evaluation is presented here in brief, focusing on revenues and profit.

Also presented is the capital structure target-realization comparison, which is based on the Management's evaluation.

Revenue

The realization of revenues in 2014 was IDR 756.66 B, while the budget was IDR 754.24 B. Therefore, BKI was able to surpass the target by 0.32%. The achievement was driven by the realization of classification production that reached 377,280,649 points or 17.44% higher than the target of 321,247,940 points. Meanwhile, the realization of commercial production was 260,835,307 *mandays*, or 92.91% of the targeted 280,746,800 *mandays*.

Profit

The realization of comprehensive profit in 2014 was IDR 146.63 B, while the budget was IDR 143.21 B. Therefore, BKI was able to surpass the target by 2.39%. The achievement was driven by the realization of net profit after tax of IDR 145.17 B or 1.37% higher than the budget of IDR 143.21 B

Management Discussion & Analysis

anggaran Rp 143,21 M — dan laba penjabaran valuta asing sebesar Rp 1,46 M yang tidak dianggarkan di dalam RKAP 2014.

Struktur Permodalan

Pada tahun 2014, BKI mencapai ekuitas sebesar Rp 459,28 M, sedangkan anggarannya adalah Rp 451,99 M. Dengan demikian, BKI dapat melampaui target sebesar 1,61%.

Sementara itu, utang jangka pendek mencapai Rp 121,10 M pada tahun 2014, sedangkan anggarannya adalah Rp 56,48 M. Dengan demikian, BKI melampaui anggaran sebesar 1,14x. Perlu ditambahkan, BKI tidak memiliki utang jangka pendek berupa utang bank ataupun utang lembaga pembiayaan.

Lebih jauh, utang jangka panjang BKI pada tahun 2014 adalah Rp 16,82 M atau 20,32% lebih rendah daripada anggaran sebesar Rp 21,11 M.

Target/Proyeksi 2015

Pendapatan

Secara garis besar, pendapatan bersih untuk tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 938,98 M yang terdiri dari proyeksi pendapatan bidang klasifikasi sebesar Rp 553,80 M dan proyeksi pendapatan bidang komersil sebesar Rp 385,18 M.

Laba

Manajemen memproyeksikan laba usaha sebesar Rp 253,41 M yang 33,25% lebih tinggi dibandingkan anggaran laba usaha tahun 2014 yang mencapai Rp 190,17 M.

Laba bersih setelah pajak dianggarkan mencapai Rp 195,67 M atau 36,63% lebih besar dibandingkan anggaran laba bersih setelah pajak tahun 2014 yang mencapai Rp 142,21 M.

Sementara itu, laba komprehensif pun dianggarkan mencapai Rp 195,67 M atau 36,63% lebih besar dibandingkan anggaran laba komprehensif tahun 2014 yang mencapai Rp 142,21 M.

Struktur Permodalan

Manajemen memproyeksikan aset, liabilitas, dan ekuitas sebagai berikut (dalam milyaran Rupiah):

	Proyeksi / Projection
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	469,70
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	237,49
Jumlah Aset / Total Assets	711,92
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Current Liabilities	52,73
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Current Non-Liabilities	25,88
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	78,61
Jumlah Ekuitas / Total Equity	633,31

and the income from foreign exchange gain of IDR 1.46 B that was not budgeted in the 2014 RKAP.

Capital Structure

In 2014, BKI reached an equity of IDR 459.28 B while the budget was IDR 451.99 B. Therefore, BKI was able to surpass the target by 1.61%.

Meanwhile, short-term debts reached IDR 121.10 B in 2014, while the budget was IDR 56.48 B. Therefore, BKI surpassed the budget by 1.14x. Nevertheless, it should be emphasized that BKI does not have short-term debts in the for of bank loans or loans from financial institutions.

Furthermore, BKI's long-term debt for 2014 reached IDR 16.82 B or 20.32% lower than the budget of IDR 21.11 B.

2015 Targets/Projections

Revenue

In general, revenues for 2015 are budgeted at IDR 938.98 B and comprise projected revenues from classification services at IDR 553.80 B and projected revenues from commercial services at IDR 385.18 B.

Profit

The Management projects operational profit at IDR 253.41 B which is 33.25% higher than the IDR 190.17 B operational profit budget of 2014.

Net profits after tax are budgeted at IDR 195.67 B or 36.63% higher than the IDR 142.21 B net profit after tax budget of 2014.

Meanwhile, comprehensive profit is also budgeted at IDR 195.67 B or 36.63% higher than the IDR 142.21 B comprehensive profit after tax budget of 2014.

Capital Structure

The Management projects assets, liabilities, and equity as follows (in Billions of Rupiah):

Analisa & Pembahasan Manajemen

Kebijakan Dividen

Manajemen mengusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS dividen sebesar Rp 15,95 M untuk tahun 2015. *Pay-out-ratio* dividen ini lebih kecil dibandingkan tahun 2014, namun besaran nominalnya sama. Pertimbangan yang mendasari usulan ini adalah peningkatan cadangan.

Untuk tahun 2015, Manajemen memproyeksikan cadangan sebesar Rp 129,22 M yang rencananya akan dipergunakan untuk investasi alat produksi dan infrastruktur dan lain-lain, sebagai dampak tidak adanya kebijakan kenaikan gaji dasar (pokok) yang ada kaitannya dengan kewajiban dana pensiun pegawai.

Pemasaran

Pasar

BKI menjalankan usaha di Indonesia dan di luar negeri. Pasar utama BKI terdiri atas pasar jasa klasifikasi dan statutoria dan pasar jasa non klasifikasi.

Pasar jasa klasifikasi dan statutoria ditentukan oleh jumlah kapal yang beredar, baik di dalam maupun di luar negeri, serta UU 17/2008 pasal 129 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada badan klasifikasi. Kapal tersebut mencakup kapal dengan standar klasifikasi internasional A100 dan kapal dengan standar klasifikasi domestik di bawah A100.

Adapun pasar jasa non klasifikasi terdiri atas pelanggan dari lembaga pemerintahan, BUMN, dan perusahaan swasta yang memerlukan *independence assurance*. Segmen pelanggan terbesar terdiri atas perusahaan swasta.

Analisis Pasar Jasa Klasifikasi dan Statutoria

Di pasar jasa klasifikasi dan statutoria terdapat 55.000 kapal berbendera Indonesia (sumber: Ditkapel 2014), termasuk 19.000 yang aktif dan wajib klas BKI, potensi wajib klas dengan standar di bawah standar BKI, dan tidak wajib klas.

Dividen Policy

The Management suggests to the Shareholder in the GMS a dividend of IDR 15.95 B for 2015. The dividend pay-out ratio is lower than 2014, but the nominal amount is the same. The suggestion is based on the plan to increase reserves.

For 2015, the Management projects reserves at IDR 129.22 B and intends to use the reserves to invest in production equipments, infrastructure, and others, to compensate the effects of not increasing basic salaries related to the obligation of managing employee pension funds.

Marketing

Market

BKI conducts business inside and outside of Indonesia. BKI's main market consists of the classification and statutory services market and the non-classification services market.

The classification and statutory services market is defined by the number of active ships, both domestically and abroad, and Article 129 of Law 17/2008 on the obligation of Indonesian-flagged ships to obtain classes from classification societies. These ships include ships with the A100 international classification standard and the domestic classification standards below A100.

The non-classification services market consists of government institution, SOE, and private company customers that require independent assurance. The largest segment consists of private companies.

Classification and Statutory Services Market Analysis

In the classification and statutory service market are 55,000 Indonesian-flagged ships (source: Ditkapel 2014), including 19,000 active BKI class obligatory ships, potential class obligatory below BKI standard ships, and ships that are not obliged to obtain class.

Potensi Pasar Jasa Klasifikasi dan Statutoria, dalam unit kapal
Classification and Statutory Service Market Potential, In Number of Ships

Jenis Jasa Klasifikasi / Type of Classification Service	2014
Penerimaan Kelas / Class Admission*	8486
Mempertahankan Kelas / Class Maintenance**	19415
Material & Komponen / Material & Components***	987
Statutoria / Statutory*)	21312

Catatan / Notes:

- * : Potensinya ditentukan oleh jumlah kapal aktif dan wajib kelas, namun belum teregistrasi pada BKI, serta faktor pertumbuhan 10% per tahun (sumber: Ditlala 2010) / The potential is defined by the number of ships that active and class obligatory, but not registered with BKI, and the annual growth factor of 10% (source: Ditlala 2010).
- ** : Potensinya ditentukan oleh jumlah kapal yang teregistrasi pada BKI (akumulasi tahun sebelumnya dan penambahan pada tahun yang bersangkutan). / The potential is defined by the number of ships registered with BKI (accumulation of the previous year and addition of the year to date).
- *** : Potensinya sejumlah pertumbuhan kapal yang dibangun pada tahun yang bersangkutan. / The potential is defined by the growth of built ships in the year to date.
- *) : Potensinya merupakan penggabungan dari mempertahankan kelas dan penerimaan kelas pada tahun yang bersangkutan. / The potential is the accumulation of class maintenance and class admission in the year to date.

Management Discussion & Analysis

Pangsa pasar BKI ditentukan terutama oleh persaingan dalam jasa klasifikasi di Indonesia. Selain BKI ada 13 badan klasifikasi yang menjadi pesaing (namun dalam hal *dual class* menjadi mitra), yaitu: BV, ABS, DNV, GL-DNV, Lloyd Register, Class NK, CCS, CRS, IRS, KR, PRS, RINA, dan RS. Dengan bidang pekerjaan yang relatif sama, namun rentang variasi layanan dan area geografis yang lebih luas, BKI memiliki kekuatan terbesar di Indonesia pada tahun 2014.

The market share of BKI is defined mainly by the competition among classification societies in Indonesia. In addition to BKI there are 13 classification society competitors (but in terms of dual class are partners), namely: BV, ABS, DNV, GL-DNV, Lloyd Register, Class NK, CCS, CRS, IRS, KR, PRS, RINA, and RS. With a field of work that is relatively the same, but a range of services and larger geographical area, BKI was the strongest classification society in Indonesia in 2014.

Pangsa Pasar Jasa Klasifikasi 2014, dalam unit kapal dan %
2014 Classification Service Market Share in Number of Ship and %

	2014
Potensi Pasar / Market Potential	19000
BKI (aktif) / BKI (active)	10514
Pangsa Pasar / Market Share	55%

Catatan / Notes:

diolah dari data Kemenperin, Kemenhub, INSA, data data internal BKI / Calculation based on data from Kemenperin, Kemenhub, INSA and BKI

Analisis Pasar Jasa Non Klasifikasi BKI

Independence assurance dibutuhkan dalam segmen kelautan, industri, dan energi. Pada tahun 2014, segmen tersebut adalah sebagai berikut:

BKI Non-Classification Services Market Analysis

independence assurance needed in the marine segment, industry, and energy. In 2014, these segments are as follows:

Segmentasi Pasar Jasa Non Klasifikasi BKI, dalam Milyaran Rupiah]
BKI Non-Classification Service Market Segmentation, in Billions of Rupiah

	Kelautan / Marine	Industri / Industry	Energi / Energy
Pemerintah / Government	1510	6	1
BUMN / SOE	36	3	172
Swasta / Private	452	1418	1181
Total	1998	1427	1354

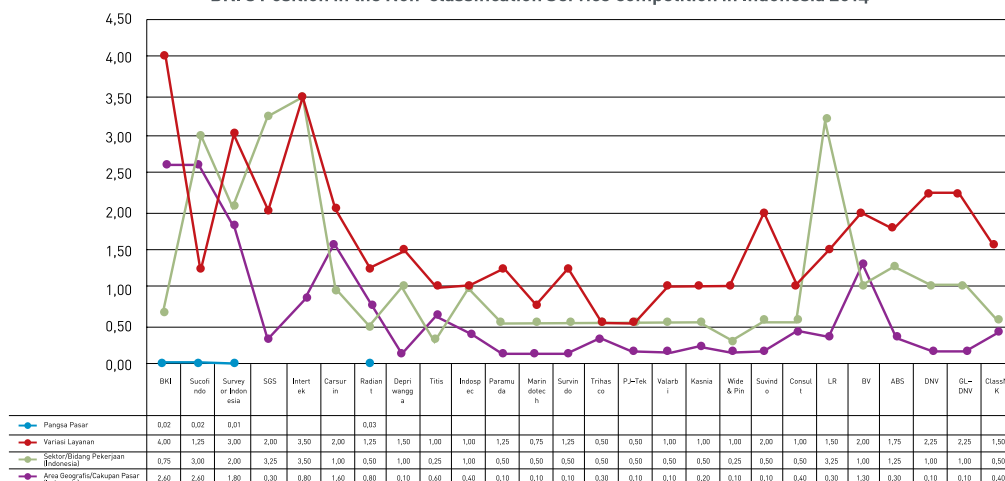
Catatan / Notes:

diolah dari data RKAKL, Kemeneg BUMN, INSA, dan Kemen ESDM / Calculation based on data from RKAKL, Kemeneg BUMN, INSA, and Kemen ESDM

Di dalam pasar ini, BKI bersaing dengan 460 perusahaan; terutama tiga perusahaan swasta nasional. Persaingan ini ditentukan oleh jangkauan geografis, variasi layanan, bidang pekerjaan, dan pangsa pasar. Dilihat seperti ini, posisi BKI di antara para pesaing adalah sebagai berikut:

Within this market, BKI competes with 460 companies; particularly with three national private companies. The competition is defined by geographical reach, range of services, field of work, and market share. BKI's position among the competitors is as follows:

Posisi BKI dalam Persaingan Jasa Non Klasifikasi Indonesia 2014
BKI's Position in the Non-Classification Service Competition in Indonesia 2014



Analisa & Pembahasan Manajemen

Adapun pangsa pasar BKI pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

BKI's market share in 2014 was as follows:

	Omset / Revenue	Pangsa Pasar / Market Share
Radiant Utama	321	6,71%
BKI	264	5,52%
Sucofindo	239	5,00%
Surveyor Indonesia	90	1,89%
Lain-lain (dijumlahkan)	3864	80,87%
Total	4778	100%

Strategi Pemasaran

Pada tahun 2014, BKI melakukan pemasaran jasa secara terpadu antara bidang klasifikasi dan bidang non klasifikasi melalui Komite BKI, customer meeting, pameran, dan pemasaran langsung (*door-to-door*) oleh unit produksi.

Di samping itu, Manajemen melakukan penyesuaian struktur organisasi untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi manajerial, termasuk pemasaran, sesuai dengan nomenklatur Direksi yang baru.

Secara khusus di bidang jasa klasifikasi, BKI melakukan pembinaan galangan; direct selling ke lembaga pemerintah, BUMN, dan swasta; sosialisasi peraturan klasifikasi dan statutoria; serta mengikuti berbagai pameran dan seminar.

Di bidang jasa non klasifikasi, BKI melakukan direct selling ke lembaga pemerintah, BUMN, dan swasta; serta mengikuti berbagai pameran dan seminar.

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dividen atas bagian laba BKI dan penyalurannya ditentukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Pada RUPS tanggal 27 Maret 2014, Pemegang Saham memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 15,95 M — atau 15% dari laba bersih tahun buku 2013 sebesar Rp 106,35 M — dan menyetor dana sebesar Rp 15,95 M tersebut ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 23 April 2014.

Dana Hasil Penawaran Umum

BKI belum melakukan penawaran umum baik saham maupun obligasi, sehingga tidak mengelola dana hasil penawaran umum pada tahun 2014.

Market Strategy

In 2014, BKI conducted integrated marketing of its services; classification and non-classification services were marketed through BKI's committees, customer meetings, exhibitions, and direct marketing (*door-to-door*) of the production units.

Furthermore, the Management adjusted the organizational structure in accordance to the new nomenclature of the Board of Directors to optimize managerial function, including marketing.

Specifically, in terms of classification services, BKI has conducted socialization at shipyards; direct selling to government institutions, SOEs, and private companies; socialization of classification and statutory rules; and participated in various exhibitions and seminars.

In the field of non-classification services, BKI has conducted direct selling towards government institutions, SOEs, and private companies; and participated various exhibition and seminars.

Dividend Policy and Payout

Dividends on a portion of BKI's profits and its disbursement is decided upon by the Shareholder in GMSs. In the GMS of 27 March 2014, the Shareholder decided to distribute cash dividends of IDR 15.95 B — or 15% of the IDR 106.35 B net profit of the fiscal year of 2013 — and deposit the amount of IDR 15.95 B to Rekening Kas Umum Negara on 23 April 2014.

Proceeds of Public Offering

BKI has conducted public offering of neither shares nor bonds, so it did not manage proceeds of public offering in 2014.

Management Discussion & Analysis

Informasi Material

Investasi

Tanggal
Nilai
Obyek transaksi
Pihak bertransaksi
Sifat hubungan pihak bertransaksi
Kewajaran transaksi
Pemenuhan ketentuan terkait

Ekspansi

Pada tahun 2014, BKI tidak melakukan ekspansi.

Divestasi

Pada tahun 2014, BKI tidak melakukan divestasi.

Peleburan Usaha

Pada tahun 2014, BKI tidak melakukan peleburan usaha.

Akuisisi

Pada tahun 2014, BKI tidak melakukan akuisisi.

Restrukturisasi Utang

Pada tahun 2014, BKI tidak melakukan restrukturisasi utang.

Transaksi Afiliasi

Pada tahun 2014, BKI tidak melakukan transaksi dengan pihak berafiliasi yang dapat memberikan dampak material terhadap kinerja keuangan.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2014, BKI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Pada tahun 2014 tidak terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap status, kinerja, dan laporan keuangan BKI.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tahun 2014 tidak terjadi perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan laporan keuangan BKI.

Material Information

Investment

Date
Amount
Object of Transaction
Parties of Transaction
Nature of Relation Between Parties of Transaction
Fairness of Transaction
Compliance towards Prevailing Rules and Regulations

Expansion

In 2014, BKI did not conduct expansions.

Divestment

In 2014, BKI did not conduct divestments.

Merger

In 2014, BKI did not conduct mergers.

Acquisition

In 2014, BKI did not conduct acquisitions.

Debt Restructurization

In 2014, BKI did not conduct debt restructuring.

Transaction with Affiliated Parties

In 2014, BKI did not conducted transactions with affiliated parties that may have material effects on its financial performance.

Transaction with Conflicts of Interests

In 2014, BKI did not conduct material transactions with conflicts of interests.

Changes in Rules and Regulations

In 2014 there were no changes in rules and regulations that may have significant impacts on the status, performance, and financial reports of BKI.

Changes in Accountancy Policies

In 2014 there were no changes in accountancy policies that may have significant impacts on the financial performance and financial reports of BKI.

Tata Kelola Perusahaan

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

The Principles of Good Corporate Governance



Pendahuluan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) bermanfaat untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan BKL, karena dengan GCG sinergi antar organ perusahaan, karyawan dan pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan.

Sebagai BUMN, BKL telah menerapkan GCG sejak tahun 2009 dan pertama kali diaudit oleh asesor eksternal APB Indonesia pada periode tahun 2012. Audit tersebut menunjukkan BKL memiliki Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG "BAIK" dengan indikator pencapaian 87,67 dari 100.

Introduction

The implementation of good corporate governance (GCG) supports the sustainable growth of BKL, because GCG helps to improve synergies between the company's organs, employees and stakeholders.

As an SOE, BKL has implemented GCG since 2009 and was audited for the first time by the external assessor APB Indonesia in the period of 2012. The audit revealed that BKL was in the GCG implementation quality class of "GOOD" with an achievement indicator of 87.67 out of 100.

Corporate Governance

Pada tahun 2014, BKI telah melakukan penilaian mandiri terhadap penerapan GCG dengan parameter yang direkomendasikan dari asesor independen APB Indonesia. Di dalam penilaian mandiri tersebut, BKI mencapai skor 92,44 dari 100 dan kualifikasi "SANGAT BAIK".

In 2014, BKI conducted a self-assessment of GCG implementation with the parameters that were recommended by the independent assessor APB Indonesia. In the self-assessment, BKI reached a score of 92.44 out of 100 and the qualification of "EXCELLENT".

Hasil Self-Assessment GCG 2014 2014 GCG Self-Assessment Results

No. Aspek Pengujian / Indikator / Parameter Test Aspects/Indicators/Parameters	Bobot Weight	Capaian tahun 2014 2014 Achievement	
		Skor Score	Capaian Achievement
I Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan / Commitment towards sustainable implementation of corporate governance	7,00	6,89	98,36
II Pemegang Saham dan RUPS / Pemilik Modal / Shareholders and GMS/Owner	9,00	8,90	98,86
III Dewan Komisaris / Dewan Pengawas / Board of Commissioners/ Board of Supervisors	35,00	33,93	96,93
IV Direksi / Board of Directors	35,00	32,07	91,63
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency	9,00	6,91	76,77
VI Aspek Lainnya / Other Aspects	5,00	3,75	75,00
Skor Keseluruhan / Total Score	100,00	92,44	92,44
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG / GCG Implementation Quality Classification		"Sangat Baik" "Excellent"	

Selanjutnya, laporan penerapan tata kelola perusahaan tahun 2014 akan memberikan penjelasan tentang organ perusahaan dan komite pendukungnya, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, sistem manajemen kualitas, serta beberapa topik lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Furthermore, the 2014 corporate governance report will explain about the company's organs and their supporting committees, the internal control system, risk management system, quality management system, and other topics, in accordance to prevailing rules and regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Saham BKI dimiliki 100 % oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam RUPS diwakili oleh Kementerian BUMN. RUPS merupakan organ perusahaan BKI dengan kekuasaan tertinggi dan melalui pertemuan ini Pemegang Saham menjalankan haknya untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.

RUPS juga dipergunakan oleh Pemegang Saham untuk memperoleh informasi tentang perusahaan, kinerja perusahaan, serta aset dan kegiatan perusahaan, di samping menentukan arah pengembangan perusahaan berdasarkan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan oleh Manajemen.

General Meeting of Shareholders (GMS)

The shares of BKI are 100% owned by the Government of Indonesia, which in the GMS is represented by the Ministry of SOEs. The GMS is the corporate organ of BKI with the highest authority and in the meeting the Shareholder is executing its right to hold accountable the Board of Commissioners and the Board of Directors in terms of the company's management.

The GMS is also used by the Shareholder to obtain information about the company, the company's performance, as well as the company's assets and activities, in addition to determining the direction of the company's development based on the Long-Term Plan (RJP) and the Management's Corporate Work Plan and Budget (RKAP)

Tata Kelola Perusahaan



Pada tahun 2014, RUPS dilaksanakan dua kali.

RUPS tanggal 27 Maret 2014 telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- Menerima dengan baik Laporan Manajemen tahun 2013 dan memberikan status *acquit et de charge* kepada para Komisaris dan Direktur dalam konteks pengelolaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meminta Direksi untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas catatan/temuan/saran BPK dan auditor eksternal terhadap Laporan Manajemen tahun 2013;
- Meminta Direksi untuk meningkatkan upaya efisiensi dan pengendalian biaya, baik operasional maupun non operasional;
- Meminta Direksi untuk mengelola modal kerja secara optimal, antara lain dalam hal pengelolaan kas (*cash management*) dan pengelolaan piutang;
- Meminta Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris melaksanakan hal-hal yang tertuang dalam Surat Wakil Menteri BUMN No. S-97/MBU/wk/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- Meminta Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris menyelesaikan permasalahan tenaga kerja outsourcing sesuai Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-06/MBU/2013 tanggal 22 November 2013;
- Meminta dengan pengawasan Dewan Komisaris melaksanakan hal-hal yang tertuang dalam Surat Direktur Utama BPJS No. 1494/VII.1/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang progres kepesertaan BUMN pada program nasional BPJS Kesehatan;
- Meminta Direksi dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan untuk 1) mentransformasikan strategi ke dalam ukuran dan/atau rencana kinerja di setiap level perusahaan, 2) memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja terkait, 3) memastikan setiap pejabat perusahaan memiliki rencana *continuous improvement* dan program terkait yang nyata di lapangan;
- Meminta Direksi untuk mengoptimalkan kinerja

In 2014, there were two GMS.

The GMS of 27 March 2014 has made the following decisions:

- accepting the Management Report of 2013 and awarded the *acquit et de charge* status to the Commissioners and Directors in terms of the company's management and in accordance to prevailing rules and regulations;
- requesting the Board of Directors to follow up and finalize the notes/findings/recommendations of BPK and the external auditor towards the Management Report of 2013;
- requesting the Board of Directors to improve efficiency and cost control efforts, both operational and non-operational;
- requesting the Board of Directors to optimize the management of working capital, among others in terms of cash management and the handling of receivables;
- requesting the Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners to implement the letter of the Vice Minister of SOEs No. No. S-97/MBU/wk/2014 of 27 February 2014;
- requesting the Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners to implement the circulating letter of the Minister of SOEs No. SE-06/MBU/2013 of 22 November 2013;
- requesting the Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners to implement the circulating letter of the President Director of BPJS No. 1494/VII.1/2014 of 28 February 2014 on the progress of participation of SOEs in the BPJS Kesehatan national program;
- requesting the Board of Directors in the context of improving the company's performance to 1) transforming the strategy into measurements and/or performance plan at each level of the company, 2) to monitor and evaluate the related performance achievements, 3) to ensure that each officer of the company has a continuous improvement plan and related action plan;

Corporate Governance



keuangan, dengan perhatian khusus terhadap bisnis komersial (*marine & industry*), serta mempersiapkan SDM ahli dan profesional;

- Meminta Direksi untuk mengembangkan 1) sistem informasi terpadu, 2) *cost reduction program*, 3) GCG, dan 4) meritokrasi.

RUPS tanggal 19 Desember 2014 telah menghasilkan keputusan menerima dan mengesahkan RKAP 2015 yang diusulkan oleh Manajemen.

Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris BKI memiliki tugas, tanggung jawab dan hak sebagai berikut:

- Mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi demi kepentingan BKI;
- Memastikan Direksi memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengurus perusahaan sesuai maksud dan tujuan BKI, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, menerapkan GCG, melaksanakan RKAP dan keputusan RUPS, serta bertanggungjawab kepada Pemegang Saham;
- Memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugasnya, serta menggunakan saran profesional yang mandiri dan atau membentuk komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris

Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-12/MBU/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan No. SK-93/MBU/2014 tanggal 30 April 2014, susunan Dewan Komisaris BKI adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama: Sukatno
- Komisaris: Minto Widodo
- Komisaris: Faisal Ahmad
- Komisaris: Erwin Rosmali

- requesting the Board of Directors to optimize financial performance, particularly for the commercial business (*marine & industry*), and to prepare expert and professional human resource;
- requesting the Board of Directors to develop 1) an integrated information system, 2) a cost reduction program, 3) GCG, and 4) meritocracy.

The GMS of 19 December 2014 has decided to accept and approve the 2015 Work Plan and Budget of the Management.

The Board of Commissioners

According to the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners of BKI has the following duties, responsibilities and rights:

- supervise and provide inputs to the Board of Directors in the interests of BKI;
- ensure that the Board of Directors has the capability to lead and manage the Company in accordance to the purpose and goal of BKI, enhance the Company's efficiency and effectiveness, implement GCG, execute the Annual Work Plan and Budget as well as decisions of the GMS, and answer of the Shareholder.
- to obtain information crucial to its duties, and to use independent professional advice and or to form committees that support the duties of the Board of Commissioners.

Composition of the Board of Commissioners

Based on the Decision of the Minister of SOEs No. SK-12/MBU/2014 of 15 January 2014 and SK-93/MBU/2014 of 30 April 2014, the composition of the Board of Commissioners of BKI is as follows:

- President Commissioner: Sukatno
- Commissioner: Minto Widodo
- Commissioner: Faisal Ahmad
- Commissioner: Erwin Rosmali

Tata Kelola Perusahaan



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris pada tahun 2014

- Mengadakan 29 rapat, yaitu:
 - 13 rapat internal Dewan Komisaris;
 - 16 rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk satu kali rapat gabungan yang mengundang KAP Husni, Mucharam dan Rasidi;
- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, termasuk :
 - Pelaksanaan RKAP berdasarkan anggaran dasar perusahaan, keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan;
 - Monitoring and evaluation sesuai KPI terhadap cabang Pontianak, Banjarmasin, Sorong, Ambon, Balikpapan, Samarinda, Pekanbaru, Makassar, dan Bitung;
 - Memberikan tanggapan, saran dan pendapat kepada Pemegang Saham pada RUPS atas laporan keuangan tahun 2013 yang telah diaudit, RJPP tahun 2014-2018, serta Laporan Manajemen Triwulan I, II, dan III tahun 2014, serta menyampaikan indikator aspek operasional dalam RKAP tahun 2015, KPI dan RKA tahun 2015, serta hal-hal lain yang diminta Pemegang Saham;
- memberikan tanggapan, pendapat, dan arahan atas hal-hal yang bersifat strategis, termasuk :
 - *Assessment* atas pejabat satu tingkat di bawah Direksi untuk mengisi jabatan Direktur yang lowong
 - Persetujuan pejabat Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawas Interen
 - Persetujuan struktur organisasi yang baru
 - Arahan untuk pengendalian interen berdasarkan

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2014

- Conducted 29 meetings, namely:
 - 13 internal meetings of the Board of Commissioners;
 - 16 joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, including one joint meeting that invited the Public Accountant Firm Husni, Mucharam and Rasidi;
- Supervised the policy-making and management of the Board of Directors, including:
 - Execution of the Annual Work Plan and Budget based on the Company's articles of association, decisions of the GMS, and prevailing rules and regulations;
 - Monitoring and evaluation based on KPIs of the branches of Pontianak, Banjarmasin, Sorong, Ambon, Balikpapan, Samarinda, Pekanbaru, Makassar, and Bitung;
 - Provided responses, suggestions and opinions to the Shareholder at the GMS on the audited financial report of 2013, the 2014-2018 Long-term Plan, and the Management Reports of quarter I, II, and III of 2014, as well as providing the operational aspect indicators of the 2015 Annual Work Plan and Budget, the 2015 KPI and RKA, as well as others as requested by the Shareholder;
- provided responses, opinions and directives on strategic matters, including:
 - Assessments of officers directly below the Board of Directors to fill vacant positions in the Board of Directors
 - Approval of the Corporate Secretary and Internal Audit Unit Head officers
 - Approval of the new organizational structure
 - Directives towards internal control based on the

Corporate Governance



- hasil monitoring Dewan Komisaris
- Rekomendasi terkait penyewaan aset tetap di Dumai
- Penunjukan KAP untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2014
- Permintaan laporan pengawasan interen dan penerapan tata kelola teknologi informasi secara periodik
- Persetujuan perpanjangan bank garansi
- Persetujuan peningkatan plafon bank garansi pada Bank Mandiri
- Rekomendasi terkait penghapusbukuan bangunan gedung selatan kantor pusat
- Arahan perbaikan Piagam SPI
- Persetujuan penghapusbukuan aset kendaraan bermotor
- Arahan mengenai manajemen risiko perusahaan (ERM)
- Rekomendasi terkait penghapusbukuan aset rumah dinas dan gedung kantor
- Survey kondisi kontainer berbasis teknologi informasi
- Permintaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
- Rekomendasi revisi anggaran investasi tahun 2014
- Reklasifikasi biaya pengembangan operasi ke biaya representasi Direksi
- Persetujuan pembatalan penjualan aset di kantor cabang Cigading
- Rekomendasi terkait penghapusbukuan aset eks kantor cabang Ambon
- Persetujuan pekerjaan pengadaan software *e-Office* dan *DMS System*
- Penugasan auditor tahun buku 2014
- Persetujuan terhadap perjalanan dinas Direksi ke luar negeri

- Board of Commissioners' monitoring results
- Recommendation on the rental of fixed assets in Dumai
- Appointment of Public Accountant Firm to audit the financial report of 2014
- Request periodic internal control reporting and implementation of information technology governance
- Approval of bank guarantee extension
- Approval of increasing bank guarantee ceiling at Bank Mandiri
- Recommendation related to the write off of the south building of the head office
- Directive to improve the Internal Control Unit Charter
- Approval of motorized vehicle asset write off
- Directive on enterprise risk management (ERM)
- Recommendation related to the write off of housing facilities and office buildings
- Survey of the information technology-based container condition
- Request of follow up on the BPK examination results
- Recommendation on the 2014 investment budget revision
- Reclassification of operational development costs to Directors' representation costs
- Approval of the cancellation of the sales of the Cigading branch office assets
- Recommendation related to the write off of assets previously owned by the Ambon branch office
- Approval on the *e-Office* and *DMS System* purchasement
- Appointment of the 2014 auditor
- Approval on the Board of Directors overseas official trips

Tata Kelola Perusahaan



- Mereviu dan menindaklanjuti masukan serta rekomendasi Komite Audit dan Komite Investasi, termasuk di antaranya:
 - Masukan dan rekomendasi terhadap laporan manajemen tahun 2014, baik yang telah diaudit maupun yang belum diaudit
 - Struktur Organisasi Perusahaan
 - Usulan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan tahun 2015 serta Laporan Manajemen Triwulan I dan II
 - pengendalian dan penyewaan aset
- Review and following-up inputs and recommendations of the Audit Committee and the Investment Committee, including among others:
 - Inputs and recommendations about the management reports of 2014, both audited and un-audited
 - The Company's organizational structure
 - Suggestion about the Public Accountant Firm to audit the financial report of 2015 and the Management Reports of Quarter I and II
 - control and rental of assets

Remunerasi Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris memperoleh imbalan atas peran yang diberikan dalam pengawasan atas pengurusan perusahaan. Besaran remunerasi ditentukan dalam RUPS oleh Pemegang Saham, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pencapaian KPI Dewan Komisaris.

Remuneration of the Board of Commissioners

The President Commissioner and the Commissioners obtain remunerations based on their roles of supervising the governance of the Company. The amount of the remuneration is determined in the GMS by the Shareholder, based on prevailing rules and regulations and the achievement of KPIs of the Board of Commissioners.

Corporate Governance

Realisasi Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2014

Realization of Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners in 2014

No	ASPEK DAN PARAMETER ASPECT AND PARAMETER	PERIODE PERIOD	SATUAN UNITS	BOBOT WEIGHT	RENCANA PLANNED	REALISASI REALIZATION	SKOR SCORE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
I. Aspek Pengawasan dan Nasehat / Supervision and Advice Aspect							
1.	Memberikan persetujuan/tanggapan kepada Pemegang Saham terhadap: / Providing approval/response to the Shareholder in terms of:						
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL / Annual Work Plan and Budget of the Company and PKBL Work Plan and Budget	Tahunan / Yearly	Surat Letter	5	1	1	5
	b. Laporan Tahunan / Annual Report	Tahunan / Yearly	Surat Letter	3	1	1	3
	c. Analisis kinerja triwulanan / Quarterly performance analysis	Triwulanan / Quarterly	Surat Letter	2	4	4	2
2.	Memberikan persetujuan atau pendapat atas usulan Direksi yang merupakan wewenang Dewan Komisaris / providing approval or response to suggestions by the Board of Directors that concern the authority of the Board of Commissioners	Setahun / Once a year	%	10	100	100	10
3.	Rapat Dewan Komisaris / Meetings of the BOC						
	a. Jumlah rapat / Number of meetings	Bulanan / Monthly	Kali / Times	2	12	29	4,83
	b. Kehadiran Rapat / Attendance	Bulanan / Monthly	%	2	100	86	1,72
	c. Penyelesaian risalah rapat / Completion of proceedings	Bulanan / Monthly	Risalah / Proceeding	1	12	29	2,41
4.	Monitoring tindak lanjut temuan SPI dan Eksternal Audit serta Assessment GCG / Monitoring of follow-ups on findings of the Internal Control Unit and External Audit as well as GCG Assessment	Setahun / Once a year	Surat / Letter	10	3	1	3,33
5.	Evaluasi pelaksanaan Eksternal Auditor / Evaluation of External Auditor work	Tahunan / Yearly	Surat / Letter	10	1	1	10
6.	Monitoring dan Evaluasi Kantor Cabang / Monitoring and Evaluation of Branch Offices	Setahun / Once a year	Kunjungan /	5	8	8	5
Sub Total I				50			47,29
II. Aspek Pelaporan / Reporting Aspect							
7.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) / Annual Work Plan and Budget	Tahunan / Yearly	Laporan / Report	15	1	1	15
8.	Laporan Pengawasan Tahunan / Annual Supervision Report	Tahunan / Yearly	Laporan / Report	15	1	1	15
Sub Total II				30			30
III. Aspek Dinamis / Dynamic Aspect							
7.	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop dll / Competence Enhancement through seminars, workshops, and others	Setahun / Once a year	Kali / Times	10	1	1	15
8.	Tindak lanjut rekomendasi hasil Assessment GCG / Follow-up of GCG Assessment recommendations	Setahun / Once a year	%	10	1	1	15
Sub Total III				20			30
TOTAL (I+II+ III)				100			

Realisasi atas Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris tahun 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2014 adalah sebesar 97,29 dari nilai 100 point dengan rincian sebagai berikut :

- Aspek pengawasan dan nasehat sebesar 47,29 point dari rencana 50 point.
- Aspek pelaporan terealisasi 30 point atau 100% dari rencana.
- Aspek dinamis terealisasi 20,00 point atau 100% dari rencana.

The Board of Commissioners has realized an achievement of 97.29 out of 100 performance indicator points as determined in the 2014 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners, with the following details:

- Supervision and advice aspect of 47.29 points of the planned 50 points
- Reporting aspect of 30 points or 100% of the plan
- Dynamic aspect of 20 points or 100% of the plan.

Tata Kelola Perusahaan

Sesuai peraturan perundang-undangan, remunerasi Dewan Komisaris terdiri atas gaji bulanan, tunjangan (THR, Asuransi Santunan Purna Jabatan, Tunjangan Cuti Tahunan, serta Tunjangan Komunikasi), fasilitas (kendaraan dinas, kesehatan dan anggota keluarga, bantuan hukum), tantiem/insentif kinerja, serta faktor pajak atas gaji, tunjangan, fasilitas dan tantiem.

Pada RUPS 27 Maret 2014, sesuai risalah rapat RIS-04/DU.MBU/2014, remunerasi Komisaris Utama dan Komisaris adalah sebagai berikut:

Remunerasi Komisaris Utama dan Komisaris 2014

Remuneration of the President Commissioner and the Commissioner in 2014

(dalam ribuan Rupiah / in thousands of Rupiah)

No.	Jabatan Position	Nama Name	Honorarium Honorarium	T. Komunikasi Comm. Allowances	T. Transport Transport Allowances
1	Komisaris Utama / President Commissioner	Sukatno	33.750	–	6.650
2	Komisaris / Commissioner	Minto Widodo	30.375	–	6.750
3	Komisaris / Commissioner	Erwin Rosmali	30.375	–	6.750
4	Komisaris / Commissioner	Faisal Ahmad	30.375	–	6.750

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan perusahaan menentukan Rapat Dewan Komisaris dilakukan minimal satu kali per bulan dan jumlahnya dapat ditambah bila Dewan Komisaris menganggap perlu membicarakan permasalahan dan atau bisnis perusahaan ataupun melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.

Panggilan rapat dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Panggilan tersebut mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam kondisi Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama memimpin rapat.

Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

Setiap Rapat Dewan Komisaris dibuatkan Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang mendokumentasikan situasi yang berkembang dalam rapat, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang dicapai, serta, bila ada, pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat. Risalah ditandatangani pimpinan rapat dan salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh para Komisaris yang

Based on prevailing rules and regulations, the remuneration of the Board of Commissioners comprises monthly wages, allowances (THR, Pensions, Annual Leave Allowances, and Communication Allowances), facilities (office cars, health and family members, legal advice), tantiem/performance incentives, and tax factors of wages, allowances, facilities and tantiems.

Based on the RIS-04/DU.MBU/2014 proceedings, at the 27 March 2014 GMS the remuneration of the President Commissioner and the Commissioners were determined as follows:

Meetings of the Board of Commissioners

The Company's policy is that the Board of Commissioner conduct at least one meeting per month and may add other meetings if the Board of Commissioners believes it is necessary to discuss problems or the business of the Company or to evaluate the Company's performance.

Invitation to the meeting are conducted in writing by the President Commissioner or a Commissioner that was appointed by the President Commissioner. The invitations state clearly the agenda, date, time, and place of the meeting.

All Meetings of the Board of Commissioners are led by the President Commissioner; in the case that the President Commissioner cannot attend the meeting, a Commissioner that was appointed by the President Commissioner will lead the meeting.

All decisions of the Meeting of the Board of Commissioners are based on consensus.

Every Meeting of the Board of Commissioners are documented in a Proceeding of the Meeting of the Board of Commissioners, which documents the situation of the meeting, the process of decision making, the argumentation, the reached conclusion, and, if any, statements of discontent towards the conclusion of the meeting. The proceedings are signed by the head of the meeting and a Commissioner

Corporate Governance

hadir. Setiap Komisaris berhak memperoleh salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak menghadiri rapat.

Pada tahun 2014 Dewan Komisaris telah melakukan rapat internal sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan presentase kehadiran sebagai berikut:

- Sukatno (Komisaris Utama) : 100 %
- Minto Widodo (Komisaris) : 92 %
- Erwin Rosmali (Komisaris) : 69 %
- Faisal Ahmad (Komisaris) : 88 %

Pada tahun 2014 terjadi pergantian Komisaris yang berpengaruh terhadap frekuensi kehadiran.

Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-93/MBU/2014 tanggal 30 April 2014, Komisaris Faisal Halimi digantikan oleh Komisaris Faisal Ahmad. Tingkat kehadiran Komisaris Faisal Halimi adalah 80%. Ketidakhadiran Minto Widodo dan Erwin Rosmali disebabkan oleh karena dinas Perusahaan dalam rangka monitoring.

Selain Rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2014 juga diadakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi sebanyak 16 (enam belas) kali.

Direksi

Direksi BKL bertugas dan bertanggungjawab mengurus dan mengelola bisnis untuk kepentingan perusahaan. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengedepankan itikad baik serta wewenang dan kewajibannya, namun tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan BKL. Direksi bertindak secara cermat dan hati-hati, serta dengan pertimbangan yang matang tatkala menggunakan wewenangnya dan sumber daya perusahaan semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Tugas utama Direksi adalah :

- Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan
- Menerapkan tata kelola perusahaan yang sehat (GCG)
- Menjalankan anggaran dasar perusahaan, keputusan RUPS, serta peraturan lainnya
- Bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

Dalam struktur organisasi baru yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri BUMN No. SK-424/MBU/2013 tanggal

that was appointed by the attending Commissioners. Every Commissioner is entitled to a copy of the Proceedings of the Meeting of the Board of Commissioners, even though the Commissioner did not attend the meeting.

In 2014, the Board of Commissioners held 13 internal meetings with the following level of attendance:

- Sukatno (President Commissioner) : 100 %
- Minto Widodo (Commissioner) : 92 %
- Erwin Rosmali (Commissioner) : 69 %
- Faisal Ahmad (Commissioner) : 88 %

In 2014 a change of Commissioners occurred which affected the attendance level.

Based on the Decision of the Minister of SOEs No. SK-93/MBU 2014 of 30 April 2014, Commissioner Faisal Halimi was replaced by Commissioner Faisal Ahmad. The level of attendance of Commissioner Faisal Halimi was 80%. The absence of Minto Widodo and Erwin Rosmali was due to monitoring duties that required travel outside of the city.

In addition to the Meetings of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners also held 16 (sixteen) Joint Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Board of Directors

The Board of Directors of BKL has the duties and the responsibilities of managing the business for the sake of the Company. In the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors put forward good intention and its authority and obligation, but also balance the interests of the stakeholders of BKL. The Board of Directors acts carefully and prudently, with sound judgement when using its authority and company assets solely for the sake of the company.

The main duties of the Board of Directors are:

- to lead and manage the company in accordance to the company's purpose and aims
- to enhance the company's efficiency and effectiveness
- to implement good corporate governance (GCG)
- to implement the company's articles of association, decisions of the GMS and other rules and regulations
- to answer to the Shareholder through the GMS.

According to the new organizational structure that was designed in accordance to the Decision of the Minister of

Tata Kelola Perusahaan

19 Desember 2013, Direksi BKI terdiri atas Direktur Utama, Direktur Klasifikasi, Direktur Komersil, serta Direktur Keuangan & Administrasi.

Direktur Utama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan pada waktunya program kerja dan rencana pengembangan perusahaan, baik jangka panjang maupun tahunan;
- Mengkoordinasi Direksi dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan perusahaan;
- Menjalin dan meningkatkan hubungan kerja dan interelasi, baik domestik maupun internasional;
- Memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan bersama anggota Direksi lainnya;
- Melakukan pembinaan terhadap personil perusahaan;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan manajemen oleh seluruh unit kerja perusahaan, bersama anggota Direksi lainnya;
- Mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan perusahaan kepada RUPS sesuai lingkup kewenangannya.

Direktur Klasifikasi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan pada waktunya program kerja dan rencana pengembangan perusahaan di bidang teknik, baik jangka panjang maupun tahunan;
- Mengurus perusahaan, khususnya di bidang teknologi, termasuk antara lain menangani penkajian dan atau penelitian, penyusunan, penerapan dan pengembangan peraturan teknik, classification rules and regulations, technical information, BKI circulars-guidance-standards, secara rutin dan berkesinambungan, serta kegiatan operasional
- Melakukan kegiatan pemasaran, khususnya dalam hal peningkatan kerja sama dengan badan klasifikasi asing dan atau instansi terkait dalam bidang ekonomi;
- Meningkatkan kemampuan dan keahlian SDM perusahaan dalam bidang teknologi;
- Bersama anggota Direksi lainnya meningkatkan mutu pengelolaan perusahaan dalam hal penerapan kebijakan mutu, penerapan sistem informasi manajemen, evaluasi tarif jasa, menyiapkan dan menetapkan kebijakan perusahaan, mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan perusahaan kepada RUPS sesuai lingkup kewenangannya.

Direktur Komersil memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan pada waktunya program kerja dan rencana pengembangan usaha perusahaan di bidang

SOEs No. SK-424/MBU/2013 of 19 December 2013, the Board of Directors of BKI consists of the President Director, the Director of Classification, the Director of Commerce, and the Director of Finance & Administration.

The President Director has the following duties and functions:

- prepare in due time the work program and the company's development plan, both long term and yearly;
- coordinate the Board of Directors to determine and establish company policies;
- establish and uphold work relationships and interrelations, both domestic and international;
- maintain and manage the company's assets together with the members of the Board of Directors;
- provide guidance to the company's personnel;
- supervise and control together with the members of the Board of Directors the implementation of management policies by all work units of the company;
- defend limited to his scope of authority the company's management at the General Meeting of Shareholders.

The Director of Classification has the following duties and functions:

- preparing in due time a work program and a corporate development program in the field of technology, both long term and annual;
- to manage the company, particularly in the field of technology, including among others managing studies and or research, formulation, implementation and development of technical rules, classification rules and regulations, technical information, BKI circulars-guidance-standards, routinely and continuously, and operational activities
- to conduct marketing efforts, particularly in terms of improving collaboration with foreign classification societies and or other economic institutions;
- improve the capacity and skill of the company's HR in the field of technology;
- together with the other members of the Board of Directors improve the quality of management of the company in terms of implementing quality policies, management information system, service tariff evaluation, preparing and determining corporate policies, and defending the results of the company's management at the GMS within the scope of his authority.

The Director of Commercial Services has the following duties and functions:

- preparing in due time a work program and a corporate development program in the field of commercial

Corporate Governance

komersial, baik jangka panjang maupun tahunan;

- Mengurus perusahaan terutama dalam bidang pengembangan usaha, termasuk antara lain menciptakan pasar baru dan atau unit usaha baru, memperluas pangsa pasar, melaksanakan penelitian pasar, menyiapkan konsep strategi usaha, serta menangani kegiatan operasional di bidangnya;
- Melakukan kegiatan pemasaran antara lain pengembangan dan peningkatan mutu kerja sama, sekaligus melakukan kegiatan sinergi usaha dengan badan klasifikasi asing dan instansi terkait lainnya;
- Meningkatkan kemampuan dan keahlian mutu SDM di bidang pemasaran dan pengembangan usaha;
- Bersama anggota Direksi lainnya meningkatkan mutu pengelolaan perusahaan dalam hal penerapan kebijakan mutu, penerapan sistem informasi manajemen, evaluasi tarif jasa, menyiapkan dan menetapkan kebijakan perusahaan, mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan perusahaan kepada RUPS sesuai lingkup kewenangannya.

Direktur Keuangan & Administrasi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan pada waktunya program kerja dan rencana pengembangan perusahaan di bidang keuangan, personalia, dan administrasi umum, baik jangka panjang maupun tahunan;
- Mengurus perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan, personalia, dan administrasi umum, termasuk antara lain menangani kegiatan dan pengelolaan keuangan perusahaan; kegiatan administrasi kepegawaian, rekrutmen, pelatihan, serta pengembangan karir; kegiatan ketatausahaan, pengadaan barang dan kerumahtanggaan; serta kegiatan kehumasan dan penanganan urusan hukum;
- Mendukung secara aktif pelaksanaan kebijakan perusahaan di bidang pemasaran;
- Meningkatkan kemampuan dan keahlian mutu SDM perusahaan di bidang keuangan, personalia, dan administrasi umum;
- Bersama anggota Direksi lainnya meningkatkan mutu pengelolaan perusahaan dalam hal penerapan kebijakan mutu, penerapan sistem informasi manajemen, evaluasi tarif jasa, menyiapkan dan menetapkan kebijakan perusahaan, mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan perusahaan kepada RUPS sesuai lingkup kewenangannya.

services, both long term and annual;

- manage the company particularly in the field of business development, including among others creating new markets or new business units, expand market share, conduct market research, prepare business strategy concepts, and operational activities within his field;
- conduct marketing activities among others development and improvement of collaboration, and simultaneously creating business synergies with foreign classification societies and other related institutions;
- improve the capacity and skill of the company's HR in the fields of marketing and business development;
- together with the other members of the Board of Directors improve the quality of management of the company in terms of implementing quality policies, management information system, service tariff evaluation, preparing and determining corporate policies, and defending the results of the company's management at the GMS within the scope of his authority.

Director of Finance & Administration has the following duties and functions:

- preparing in due time a work program and a corporate development program in the field of finance, human resources, and general administration, both long term and annual;
- managing the company, particularly in the field of finance, human resources, and general administration, including among others financial activities and management, human resource management, recruitment, training, and career development, business administration, procurement of goods and inventories, and public relations as well as legal issues;
- actively supporting the implementation of corporate policies in the field of marketing;
- improve the capacity and skill of the company's HR in the fields of finance, human resources, and general administration;
- together with the other members of the Board of Directors improve the quality of management of the company in terms of implementing quality policies, management information system, service tariff evaluation, preparing and determining corporate policies, and defending the results of the company's management at the GMS within the scope of his authority.

Tata Kelola Perusahaan

Remunerasi Direksi

Direktur Utama dan Direktur memperoleh imbalan atas peran yang diberikan dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan. Besaran remunerasi ditentukan dalam RUPS oleh Pemegang Saham, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pencapaian KPI Direksi.

Remuneration of the Board of Directors

The President Director and the Directors obtain rewards for the roles played in the governance and management of the Company. The amount of the remuneration is determined at the GMS by the Shareholder, based on prevailing rules and regulations and the achievement of the Board of Directors' KPI.

Pencapaian KPI Tahun 2014 Berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul :

The 2014 KPI Achievement based on the criteria of Excellent Performance:

No	Indikator Indicator	Formula Formula	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2014	Real. 2014	Skor Score
I Perspektif Keuangan & Pasar Finance & Market Perspective							
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha Growth of Revenue	$\frac{\text{Pendapatan usaha 2014}}{\text{Pendapatan usaha 2013}}$ $\frac{\text{Revenue of 2014}}{\text{Revenue of 2013}}$	3	%	Min 31,68	36,39	3,4
2	Net Profit Margin	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak 2014}}{\text{Pendapatan usaha 2014}}$ $\frac{\text{Profit Before Tax of 2014}}{\text{Revenue of 2014}}$	4	%	Min 25,73	26,36	4,1
3	Collecting Period	$\frac{(\text{Piutang usaha x 365 hari})}{\text{Pendapatan Usaha}}$ $\frac{(\text{Receivables x 365 days})}{\text{Revenue}}$	3	hari days	Maks 66	113	2,4
4	Return On Asset	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$ $\frac{\text{Profit Before Tax}}{\text{Total Assets}}$	4	%	Min 37,17	33,40	3,6
5	Market Share Jasa Non Klasifikasi Market Share of Non Classification Services	$\frac{\text{Pendapatan Jasa Non Klasifikasi}}{\text{Potensi Pasar Jasa Non Klasifikasi}}$ $\frac{\text{Revenue of Non Classification Services}}{\text{Market Potential of Non Classification Services}}$	3	%	Min 4,50	5,37	3,6
6	Market Share kapal Kelas BKI Berbendera Indonesia Market Share of BKI Class of Indonesian Flagged Mandatory Class Ships	$\frac{\text{Jumlah kapal Klas BKI Berbendera Indonesia (valid) pada tahun 2014}}{\text{Jumlah Kapal Berbendera Indonesia yang tergabung di INSA pada tahun 2014}}$ $\frac{\text{Number of BKI Class (Valid) Indonesian Flagged Ships in 2014}}{\text{Number of Indonesian Flagged Ship Members of INSA in 2014}}$	3	%	Min 87	76,53	2,6
Sub Total			20				19,8
II Perspektif Fokus Pelanggan Customer Focus Perspective							
1	Index Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	Rata-rata penilaian kepuasan pelanggan dari hasil survey dengan index 1 s/d 10 Average customer satisfaction valuation based on survey results at an index of 1 to 10	12	CSI	Min 6,5	8,10	14,4
2	Penurunan proporsi keluhan pelanggan aktif Decrease of active customer complaints	$\frac{\text{Jumlah Keluhan Pelanggan 2014}}{\text{Jumlah Keluhan Pelanggan 2013}}$ $\frac{\text{Number of Customer Complaints in 2014}}{\text{Number of Customer Complaints in 2013}}$	12	%	Min 7,2	4,63	9,6
Sub Total			24				24,0

Corporate Governance

No	Indikator Indicator	Formula Formula	Bobot Weight	Satuan Unit	Target 2014	Real. 2014	Skor Score
III Perspektif Produk dan proses Product and Process Perspective							
1	Maturity Manajemen Risiko Maturity of Risk Management	Sesuai Penilaian Independen Based on Independent Assessment	3	Skor Score	3	1	1,0
2	Kecepatan Penerbitan Sertifikat Certificate Publishing Rate	Jumlah hari kerja dari tanggal selesai survey s.d tanggal terbitnya sertifikat Number of working days from completion of survey to published certificate	5	Hari Days	Maks 45	49,92	4,5
3	Kesesuaian Realisasi & Anggaran CAPEX Match of CAPEX Realization & Budget	$\frac{\text{Realisasi 2014}}{\text{Anggaran 2014}}$ Realization of 2014 Budget of 2014	3	%	Min 75	21,22	2,4
4	Penyelesaian Dokumen IACS-QSCS Level 2 & 3 IACS-QSCS Level 2 & 3 Document Completion	Jumlah Prosedur & WI yang diselesaikan Number of completed Procedures & WI	3	%	Maks 80	79,59	3,0
5	Pengembangan Rules/Reg. secara mandiri Independent Development of Rules/Regulations	Jumlah Rules/Regulation yang diselesaikan Number of completed Rules/Regulations	4	Rules	Min 7	8	4,6
Sub Total			18				15,4
IV Perspektif Fokus tenaga Kerja Manpower Focus Perspective							
1	Produktivitas Tenaga Kerja Manpower Productivity	Pendapatan (Jumlah pegawai tetap + PKWT>1 tahun) Revenue (Total Permanent Employees + PKWT>1 year)	5	Juta/pegawai Milion/ Employee	Min 788	1.025	6,0
2	Komposisi Pegawai Teknik & Non Teknik / Technical & Non-Technical Human Resource Composition	$\frac{\text{Jumlah Pegawai Teknik Organik}}{\text{Total Pegawai Organik}}$ Number of Organic HR Total Organic HR	7	%	Min 60	80,14	8,4
3	Jumlah Peningkatan Kompetensi Competence Enhancement	Jumlah Trainee yang mengikuti program IACS Training Scheme Number of trainees enrolled in IACS Training Scheme	8	Orang Person	106	234	9,6
Sub Total			20				24,0
V Perspektif Kepemimpinan Leadership Perspective							
1	Skor GCG GCG Score	Sesuai penilaian independen berdasarkan penilaian BUMN Independent evaluation based on SOE criteria	5	Skor Score	Min 88	87,67	5,0
2	Penilaian Mandiri terhadap skor KPKU Self-assessment of KPKU standards	Sesuai Penilaian Mandiri berdasarkan kriteria KPKU Self-assessment based on KPKU criteria	5	Skor Score	425	393	4,6
3	Pemenuhan Portal-Portal BUMN Regular Update of SOE Portal	Pemenuhan pengisian portal-portal BUMN Regular update of SOE portal	4	%	100	100	4
4	PK atau BL Partnership and Community Development Program	Tingkat Penyaluran & Tingkat Pengembalian sesuai SK 101/MBU/2012 Rate of Disbursement & Return based on SK 101/MBU/2012	4	%	100	66,22	3,2
Sub Total			18				16,8
TOTAL			100				100,0

Tata Kelola Perusahaan

Sesuai peraturan perundang-undangan, remunerasi Direktur terdiri atas gaji bulanan, tunjangan (THR, Asuransi Santunan Purna Jabatan, Tunjangan Cuti Tahunan, serta Tunjangan Komunikasi), fasilitas (kendaraan dinas, kesehatan dan anggota keluarga, bantuan hukum), tantiem/insentif kinerja, serta faktor pajak atas gaji, tunjangan, fasilitas dan tantiem.

Pada RUPS 27 Maret 2014, sesuai risalah rapat RIS-04/DU.MBU/2014, remunerasi Direktur Utama dan Direktur adalah sebagai berikut:

Remunerasi Direktur Utama dan Direktur 2014

Remunerations of President Director and Directors of 2014

Based on prevailing rules and regulations, the remuneration of the Directors comprise monthly wages, allowances (religious holiday allowances, post-employment insurance, annual leave allowances, communication allowance), facilities (company car, health facilities for Directors and their family members, legal aid), tantiem/performance incentives, as well as tax factors of salary/honorarium, allowances, facilities and tantiems.

At the GMS of 27 March 2014, following the proceedings of meeting RIS-04/DU.MBU/2014, the remunerations of the President Director and the Directors are as follows:

(dalam ribuan Rupiah / in thousands of Rupiah)

No.	Jabatan Position	Nama Name	Honorarium Honorarium	T.Perumahan Housing Allowances	T.Operasional Operational Allowances
1	Direktur Utama President Director	Rudiyanto	75.000	27.500	5.000
2	Direktur Klasifikasi Director of Classification	Iman Satria Utama	67.500	27.000	4.500
3	Direktur Komersil Director of Commerce	Ibrahim Gause	67.500	27.000	4.500
4	Dir. Keuangan & Adm Director of Finance & Administration	Timbul Tambunan	67.500	27.000	4.500

Rapat Direksi

Kebijakan perusahaan menentukan Rapat Direksi dilakukan minimal satu kali per bulan dan jumlahnya dapat ditambah bila Direksi menganggap perlu membicarakan permasalahan dan atau bisnis perusahaan ataupun melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.

Pada tahun 2014 Direksi telah melakukan rapat internal sebanyak 19 (sembilan belas) kali, dengan presentase kehadiran sebagai berikut:

- Rudiyanto (Direktur Utama) : 100 %
- Iman Satria Utama (Direktur) : 95 %
- Ibrahim Gause (Direktur) : 79 %
- Timbul Tambunan (Direktur) : 100 %

Catatan : Ketidakhadiran Iman Satria Utama dan Ibrahim Gause disebabkan oleh karena Dinas dari Perusahaan.

Selain Rapat Direksi, pada tahun 2014 juga diadakan Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris sebanyak 16 (enam belas) kali.

Meetings of the Board of Directors

The company's policy requires the Board of Directors to hold at least one meeting per month with additional meetings being allowed if the Board of Directors believes it is necessary to discuss a problem or the business or to evaluate the performance of the company.

In 2014, the Board of Directors has conducted 19 (nineteen) internal meetings, with the following percentage of attendance:

- Rudiyanto (President Director) : 100 %
- Iman Satria Utama (Director) : 95 %
- Ibrahim Gause (Director) : 79 %
- Timbul Tambunan (Director) : 100 %

Note: Iman Satria Utama and Ibrahim Gause were absent in several of the meetings because they had to fulfill other duties of the Company.

In addition of the Meetings of the Board of Directors, there were 16 (sixteen) Join Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2014.

Corporate Governance

Tindak Lanjut Keputusan RUPS

1. Keputusan RUPS: menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas catatan/temuan/saran auditor dan BPK tahun buku 2013 dan menyampaikan proses penyelesaian kepada Pemegang Saham. Tindak Lanjut: temuan dan saran auditor dan BPK ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai berita acara dari BPK.
2. Keputusan RUPS: meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan pengendalian biaya operasional dan non operasional (*cost control*). Tindak Lanjut: *cost control* telah ditingkatkan sedemikian rupa, sehingga menjadi lebih cermat pada tahun 2014.
3. Keputusan RUPS: mengelola modal secara optimal, antara lain dalam hal pengelolaan kas dan pengelolaan piutang, dengan sasaran mencapai tingkat pencairan piutang 100%. Tindak Lanjut: fungsi tim penagihan piutang dilakukan dan sementara konsultan mempersiapkan penyempurnaan prosedur pengelolaan piutang.
4. Keputusan RUPS: menerapkan dengan pengawasan Dewan Komisaris perintah Kementerian BUMN sesuai Surat Wakil Menteri BUMN No. S-97/MBU/wk/2014 tanggal 27 Februari 2014. Tindak Lanjut:
 - a. BKI menangani tenaga kerja *outsourcing* secara selektif, sesuai ketentuan;
 - b. BKI menerapkan budaya perilaku *non-cash payment* secara selektif;
 - c. BKI tidak mengeluarkan honorarium rapat bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
 - d. BKI sedang mendesain aplikasi e-procurement;
 - e. BKI senantiasa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan usaha bagi usaha kecil;
 - f. BKI sangat memperhatikan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - g. BKI sedang menjalani proses bertahap menuju kepeserta BPJS secara menyeluruh.
5. Keputusan RUPS: menyelesaikan dengan pengawasan Dewan Komisaris permasalahan *outsourcing* sesuai Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-06/MBU/2013 tanggal 22 November 2013. Tindak Lanjut:
 - a. Mempelajari dan mencermati masalah tenaga kerja *outsourcing* dengan teliti dan hati-hati;
 - b. Menyelesaikan permasalahan tenaga kerja *outsourcing* dan PHK melalui mekanisme perusahaan yang memperhatikan tata kelola perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat;
 - c. Mengkaji sistem dan pola pengelolaan tenaga

Implementation of Decisions of the GMS

1. GMS Decision: follow up to completion notes/findings/recommendations of auditor and BPK towards the book of 2013 and inform the Shareholder about the completion process. Follow up: findings and recommendations of the auditor and BPK were implemented to completion as stated in the report of BPK.
2. GMS Decision: improve company profitability through efficiency enhancement and cost control. Follow up: cost control has been enhanced to become much more accurate in 2014.
3. GMS Decision: manage capital optimally, among others through the management of cash and receivables, with the target of collecting 100% of the receivables. Follow up: function of receivables collector team enacted, while consultant improved the receivables collection procedure.
4. GMS Decision: execute under the supervision of the Board of Directors the instruction of the Ministry of SOEs as defined in the the Letter of the Deputy Minister of SOEs No. S-97/MBU/wk/2014 of 27 February 2014. Follow up:
 - a. BKI handles outsourced workers selectively and in full compliance to prevailing rules and regulations;
 - b. BKI implements the culture of non-cash payment selectively;
 - c. BKI does not pay honorariums for the involvement of Commissioners and Directors in their meetings;
 - d. BKI is in the process of designing an e-procurement application;
 - e. BKI always prioritizes the use of domestic products, national engineering, and the broadening of opportunities for small enterprises;
 - f. BKI is keen to meet its tax obligations;
 - g. BKI is in the gradual process to become a full participant of BPJS.
5. Decision of GMS: overcoming to completion with the supervision of the Board of Commissioners outsourcing problems in accordance to the Circulating Letter of the Minister of SOEs No. SE-06/MBU/2013 of 22 November 2013. Follow up:
 - a. thorough and careful study and analysis of manpower outsourcing;
 - b. solve outsourced manpower problems and lay-offs through the company's existing mechanisms that adhere to corporate governance principles and prevailing rules and regulations, and by consulting and coordinating with the local Manpower authority)
 - c. (study the outsourced manpower system and

Tata Kelola Perusahaan

- kerja outsourcing guna memberikan kepastian hidup yang layak, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan dan kemampuan perusahaan dalam jangka waktu panjang
- d. Membentuk Tim Pengawasan Penanganan Masalah Tenaga Kerja *Outsourcing* dengan melibatkan Serikat Pekerja BKI
 - e. Melaporkan kepada Menteri BUMI praktek, sistem, dan pengelolaan kesejahteraan tenaga kerja outsourcing, termasuk skema dan proses penyelesaian masalah tenaga kerja *outsourcing* yang sudah berjalan di BKI.
6. Keputusan RUPS: melaksanakan dengan pengawasan Dewan Komisaris hal-hal yang tertuang dalam surat Direktur Utama BPJS No. 1494/VII.1/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang progres kepesertaan BUMN pada Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Tindak Lanjut: arahan telah dilaksanakan dengan mengalihkan kepesertaan JPK Jamsostek ke kepesertaan BPJS Kesehatan
 7. Keputusan RUPS: dalam rangka meningkatkan kinerja BKI di setiap level perusahaan, menerjemahkan strategi ke dalam ukuran kinerja, memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja, serta memastikan seluruh pejabat melaksanakan program peningkatan berkelanjutan. Tindak Lanjut : memberikan arahan dalam rapat staf, serta memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dengan menerapkan KPI Individu
 8. Keputusan RUPS: guna mengoptimalkan kinerja keuangan tahun 2014, menyempurnakan operasi dalam rangka pengembangan usaha, khususnya bidang komersial (marine & industry), dengan:
 - a. Meningkatkan optimalisasi aset, baik yang telah ada maupun yang baru, dengan strategi diversifikasi dan inovasi
 - b. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan dengan memperdalam penetrasi pasar dan mengembangkan pasar, sejalan dengan upaya meningkatkan kecepatan menanggapi permintaan pelanggan, membangun sistem teknologi informasi dan sistem komunikasi, serta mengembangkan budaya perusahaan
 - c. Memastikan kesesuaian standar kerja dalam menghadapi peningkatan kegiatan usaha dengan kualitas SDM dan dana yang terbatas
 - d. Mempersiapkan SDM yang berkualitas, baik secara organik atau dengan mempekerjakan tenaga ahli profesional, serta
 - e. Menyeleksi kegiatan untuk merampingkan proses bisnis

Tindak Lanjut: mengembangkan *BKI Academy* dan merevitalisasi perpustakaan untuk mendukung
- management scheme in accordance to prevailing rules and regulations and within the company's capacity);
- d. (establish the Outsourced Manpower Problem Handling Supervision Team by involving the Workers of Union of BKI);
 - e. (report to the Minister of SOEs the practice, system, and management of outsourced manpower to the Minister of SOEs, including the scheme and process of outsourced manpower problems that have been adopted by BKI)
6. (GMS Decision: implement under the supervision of the Board of Commissioners directives of the Letter of the President Director of BPJS No. 1494/VII.1/2014 of 28 February 2014 on the progress of SOE participation in the National Program of Healthcare Benefits BPJS Kesehatan. Follow up: directives have been implemented by transferring the participation in JPK Jamsostek to the participation in BPJS Kesehatan.
 7. (GMS Decision: in the course of enhance BKI's performance at all levels of the company, translate the strategy in performance measurements, monitor and evaluate the performance achievement, and ensure that all offices implement the continuous improvement program. Follow up: provide directives in staff meetings, and monitor and evaluate performance achievements based on individual KPIs.
 8. (GMS Decision: to optimize financial performance of 2014, improve operations to support business development, particularly in the field of commercial services (marine & industry) by:
 - a. optimize the utilization of assets, both existing and new, through diversification and innovation,
 - b. improve growth of revenue by deepening market penetration and market development, develop information technology and communication systems, and develop corporate culture,
 - c. ensure work standards are being upheld in the enhancement of business activities with limited funds and HR quality,
 - d. prepare quality HR, both organic and hired professionals, and
 - e. select activities to streamline business processes.

Follow up: develop the BKI Academy and revitalize the library to support the academy development; secure new jobs in the field of commercial services).

Corporate Governance

perkembangan akademi; meraih pekerjaan baru di bidang komersial

9. Keputusan RUPS : melanjutkan pengembangan sistem informasi terpadu, *cost reduction program*, tata kelola perusahaan yang baik, serta meritokrasi. Tindak Lanjut: mengadakan kerja sama sinergis dengan PT Telkom untuk membangun sistem informasi terpadu.

9. (GMS Decision: continue the integrated information system development, cost reduction program, good corporate governance, and meritocracy. Follow up: formed synergic collaboration with PT Telkom to develop the integrated information system)

Komite Audit

BKI memiliki Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, sistem pengendalian intern, proses audit, dan tata kelola perusahaan.

BKI telah memiliki Piagam Komite Audit yang menetapkan tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan komposisi Komite Audit. Di samping, itu Piagam Komite Audit juga merumuskan kebijakan rapat Komite Audit, serta menjamin independensi Komite Audit.

Piagam Komite Audit menentukan komposisi Komite Audit BKI terdiri atas satu orang Komisaris dan dua orang profesional dari luar perusahaan.

Audit Committee

BKI has an Audit Committee that supports the Board of Commissioners in terms of the implementing its supervision function in terms of financial reporting, internal control system, audit processes, and corporate governance.

BKI has an Audit Committee Charter that determines the aims, authorities, responsibilities, and composition of the Audit Committee. Additionally, the Audit Committee Charter also defines the meeting policy of the Audit Committee, and guarantees the independency of the Audit Committee.

The Audit Committee Charter determines that the composition of the Audit Committee of BKI consists of one Commissioner and two professionals from outside of the company.

Ketua Komite Audit: **Minto Widodo** (Komisaris BKI)

Head of the Audit Committee: **Minto Widodo** (Commissioner of BKI)

Riwayat Jabatan: Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-322/ MBU/2012 tanggal 11 September 2012; dikukuhkan sebagai Ketua Komite Audit oleh Komisaris Utama Keputusan No.005/Dekom.101/X/KI-12 tanggal 30 Oktober 2012.

Resume of Positions: Member of the Board of Commissioners of the Perseroan Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, appointed based on the Decision of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-322/MBU/2012 of 11 September 2012; appointed as Head of the Audit Committee by the Decision of the President Commissioner No.005/Dekom.101/X/KI-12 of 30 October 2012.

Pengalaman Kerja: Kepala Pusat Sistem Informasi Keuangan Daerah (1996-2004), Sekretaris Bapeksta Keuangan (1996), Kementerian Keuangan RI (1981-sekarang).

Work Experience: Head of Pusat Sistem Informasi Keuangan Daerah (1996-2004), Secretary of Bapeksta Keuangan (1996), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (1981-now).

Riwayat Pendidikan: S1 Ekonomi UGM (1981), MA Economics Colorado State University, Amerika Serikat (1989)

Educational Background: Bachelor in Economics of UGM (1981), MA Economics of the Colorado State University, USA (1989)

Periode Jabatan Ketua Komite: 2 periode

Periods as Head of the committee: 2 periods.

Tata Kelola Perusahaan

Anggota Komite Audit: Trisyu Wimartono (profesional)	Member of the Audit Committee: Trisyu Wimartono (professional)
Riwayat Jabatan: Anggota Komite Audit BKL diangkat dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KU.006/Dekom.101/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013;	Resume of Positions: Member of the Audit Committee of BKL appointed by the Letter of the Board of Commissioners No. KU.006/Dekom.101/X/2013 of 1 October 2013;
Pengalaman Kerja: Dani Sudarsono & Partner, Public Accountant Firm (Desember 2012), Pusat Investasi Pemerintah (Juli 2011 – September 2012), PT. Permodalan Nasional Madani (Desember 2008 – Juni 2011), PT Asean Market Investment (1997- Maret 2000), PT Sempati Air (1996-1997), BPKP (1981-1996);	Work Experience: Dani Sudarsono & Partner, Public Accountant Firm (December 2012), Pusat Investasi Pemerintah (July 2011 – September 2012), PT. Permodalan Nasional Madani (December 2008 – Juni 2011), PT Asean Market Investment (1997- March 2000), PT Sempati Air (1996-1997), BPKP (1981-1996)
Riwayat Pendidikan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991)	Educational Background: State Accountancy Academy (1991)
Periode Jabatan Anggota Komite: 1 periode	Periods as Member of the committee: 1 period

Anggota Komite Audit : Deni Sulistiyo (profesional)	Member of the Audit Committee: Deni Sulistiyo (professional)
Riwayat Jabatan: Anggota Komite Audit BKL diangkat dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KU.006/Dekom.101/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013	Resume of Positions: Member of the Audit Committee of BKL appointed by the Letter of the Board of Commissioners No. KU.006/Dekom.101/X/2013 of 1 October 2013;
Pengalaman Kerja: Senior Consultant PT Delta Multi Jasatama (2008-2015), Senior Consultant PT Bina Mandiri Wahana (2008), KAP Mochamad Abadan (2008), Task Force Kementerian Perindustrian (2007-2008), Senior Consultant XSYS Consulting Group (2004-2006), Senior Officer BPPN (2002-2004), KAP Zulfikri & Partner (2000-2002), KAP Soeyatna, Mulyana & Partner (2000), BPKP (1996-1998);	Work Experience: Senior Consultant PT Delta Multi Jasatama (2008-2015), Senior Consultant PT Bina Mandiri Wahana (2008), KAP Mochamad Abadan (2008), Task Force Kementerian Perindustrian (2007-2008), Senior Consultant XSYS Consulting Group (2004-2006), Senior Officer BPPN (2002-2004), KAP Zulfikri & Partner (2000-2002), KAP Soeyatna, Mulyana & Partner (2000), BPKP (1996-1998);
Riwayat Pendidikan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2000);	Educational Background: State Accountancy Academy (2000);
Periode Jabatan Anggota Komite: 1 periode	Periods as Member of the committee: 1 period

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup pelaporan keuangan, pengendalian intern, audit internal, audit eksternal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyiapan laporan kegiatan Komite Audit.

Rapat Komite Audit

Pada tahun 2014 Komite Audit telah mengikuti rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The duties and responsibilities of the Audit Committee comprise financial reporting, internal control, internal audit, external audit, compliance towards prevailing rules and regulations, and preparation of the activity report of the Audit Committee.

Meeting of the Audit Committee

In 2014, the Audit Committee has joined 13 (thirteen) internal meetings of the Board of Commissioners.

Corporate Governance

Kegiatan Komite Audit Tahun 2014

1. Mengikuti Rapat Dewan Komisaris yang membahas RKA
2. Mengikuti Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris yang membahas kinerja perusahaan
3. Menyampaikan tanggapan atas draft penyempurnaan organisasi BKI yang disusun oleh Direksi
4. Memberikan tanggapan atas Laporan Manajemen BKI Triwulan IV Tahun 2013
5. Memberikan tanggapan atas kinerja perusahaan periode Januari 2014 hingga November 2014
6. Memberikan tanggapan atas kemajuan pelaksanaan audit tahun buku 2013
7. Memberikan tanggapan atas RJPP 2014-2018
8. Melakukan pemantauan Cabang Pontianak, Ambon, Bitung, Banjarmasin, Makassar, Sorong; Cabang Utama Komersial Balikpapan, Cabang Utama Samarinda, dan Cabang Utama Pekanbaru, dalam hal kinerja, sistem pengendalian intern, dan motivasi kerja
9. Menyampaikan rekomendasi terhadap penunjukan KAP untuk audit laporan keuangan tahun 2014
10. Memberikan tanggapan terhadap:
 - a. usulan penghapusan kendaraan bermotor,
 - b. penghapusbukuan gedung selatan kantor pusat dan rumah dinas,
 - c. perpanjangan peningkatan plafon garansi bank,
 - d. pengalihan anggaran investasi,
 - e. matriks pengalihan anggaran,
 - f. usulan pembangunan/renovasi gedung kantor Cabang Utama Komersial Balikpapan,
 - g. usulan pengadaan perangkat lunak e-Office dan Data Management System,
 - h. usulan reklasifikasi biaya pengembangan operasi ke biaya representasi Direksi,
 - i. usulan revisi anggaran investasi tahun 2014, usulan rekomendasi penghapusan aset gedung kantor Cabang Ambon,
 - j. tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,
 - k. pembatalan penghapusbukuan aset tetap ex gedung kantor Cabang Madya Klas Cilegon,
 - l. RKAP tahun 2015,
 - m. pembatalan penghapusbukuan aset tetap berupa ex rumah dinas Wakil Kepala Cabang Utama Balikpapan,
 - n. surat KAP HMR.

Activities of the Audit Committee in 2014

1. Joined Meetings of the Board of Commissioners that discussed Work Plans and Budgets
2. Joined Joint Meetings Between the Board of Directors and the Board of Commissioners that discussed performance of the company
3. Submitted a response on the Board of Directors' draft on the organizational improvement of BKI
4. Responded to the Fourth Quarter of 2013 Management Report of BKI
5. Submitted a review on the company's performance in the period of January-November 2014
6. Submitted a review on the progress of audit implementation in the fiscal year of 2013
7. Responded to the 2014-2018 Long Term Development Plan
8. Monitored to branches of Pontianak, Ambon, Bitung, Banjarmasin, Makassar, Sorong; the Main Commercial Branch of Balikpapan, the Main Branch of Samarinda, and the Main Branch of Pekanbaru, in terms of performance, internal control system, and work motivation
9. Submitted a recommendation related to the appointment of the Public Account Firm to audit the financial report of 2014
10. Responded to the:
 - a. proposal of writing-off company vehicles,
 - b. write-off of the head offices south building and employee housing facilities,
 - c. extension and increase of bank guarantee ceiling,
 - d. reallocation of investment budget,
 - e. budget reallocation matrix,
 - f. proposal of developing/renovating the Main Commercial Branch Balikpapan office building,
 - g. proposal of purchasing e-Office and Data Management System software,
 - h. proposal of reclassifying operational development costs to representational costs of the Board of Directors,
 - i. proposal of revising the 2014 investment budget, proposal of writing-off the Branch Ambon office building asset,
 - j. follow-up of recommendations based on the result of BPK's inspection,
 - k. cancellation of the write-off of assets of the former office building of the Medium Class Branch of Cilegon
 - l. 2015 Work Plan and Budget,
 - m. cancellation of the write-off of fixed assets, i.e. the former house of the Deputy Head of the Main Branch of Balikpapan,
 - n. letter of the Public Accountant Firm HMR.

Tata Kelola Perusahaan

11. Menindaklanjuti hasil Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
12. Menyusun KPI Dewan Komisaris tahun 2015
13. Menindaklanjuti temuan BPK
14. Membahas rencana kerja dan target audit tahun buku 2014

Komite Investasi (Pengembangan Usaha)

BKI memiliki Komite Investasi (Pengembangan Usaha) yang membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi kebijakan investasi, termasuk menilai penerapan prinsip GCG dalam berinvestasi dan dalam menghadapi risiko. Komite ini terjamin independensinya dan bertanggung jawab dan melapor langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Investasi (Pengembangan Usaha) terdiri atas tiga orang, termasuk satu Komisaris BKI dan dua profesional dari luar BKI. Ketua Komite dijabat oleh Komisaris.

11. Followed up results of the Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners
12. Formulated the 2015 KPIs of the Board of Commissioners
13. Followed up findings of BPK
14. Discussed audit work plan and targets of the 2014 fiscal year

Investment (Business Development) Committee

BKI has an Investment (Business Development) Committee that helps the Board of Commissioners to evaluate investment policies, including the implementation of GCG principles in investment activities and in risk mitigation. The committee's independency is guaranteed and it answers directly to the Board of Commissioners.

The Investment (Business Development) Committee consists of three individuals, including one Commissioner of BKI and two professionals from outside of BKI. The position of the committee head is held by the Commissioner.

Ketua Komite Investasi (Pengembangan Usaha) : **Faisal Ahmad** (Komisaris BKI)

Head of the Investment (Business Development) Committee: **Faisal Ahmad** (Commissioner of BKI)

Riwayat Jabatan : Kabid Usaha Industri Strategis Kementerian BUMN (2014-2015), Kabid Riset dan Informasi Kementerian BUMN (2013-2014), Kasubdid Industri Primer IIIb.1 Kementerian BUMN (2010-2013), Kasubid Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Usaha Energi I BUMN (2006-2010), Kasubid Perencanaan Usaha Perkebunan III BUMN (2002-2006), Kepala Seksi Evaluasi Perkebunan II BUMN Departemen Keuangan (2001-2002), Pelaksana Biro TU BUMN, Sekjen Departemen Keuangan (1998-2001), Direktorat Perusahaan Jasa Umum BUMN Departemen Keuangan (1996-1998).

Resume of positions: Kabid Strategic Industry Businesses Ministry of SOEs (2014-2015), Kabid Research and Information Ministry of SOEs (2013-2014), Kasubdid Primary Industries IIIb.1 Ministry of SOEs (2010-2013), Kasubid Planning and Performance Evaluation of Energy Businesses I Ministry of SOEs (2006-2010), Kasubid Planning of Plantation Businesses III Ministry of SOEs (2002-2006), Kepala Seksi Plantation II Evaluation SOEs Ministry of Finance (2001-2002), Pelaksana Administration Bureau SOEs, Secretariate Generale Ministry of Finance (1998-2001), Directorate General Service Companies SOEs Ministry of Finance (1996-1998).

Pengalaman Kerja : Kementerian BUMN (2002-sekarang), Departemen Keuangan (1996-2001), Unibank Fatmawati (1994-1996).

Work Experience: Ministry of SOEs (2002-now), Ministry of Finance (1996-2001), Unibank Fatmawati (1994-1996).

Riwayat Pendidikan: Manajemen Magister, Manajemen Keuangan Universitas Bhayangkara Jakarta (2008), Manajemen, Universitas Pancasila Jakarta (1993).

Educational Background: MM (Finance) Universitas Bhayangkara Jakarta (2008), BA Management, Universitas Pancasila, Jakarta (1993).

Dasar Hukum Penunjukan: Surat Keputusan Komisaris Utama No. SK/02/DEKOM.BKI/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

Legality of Appointment: Letter of Decision of President Commissioner No. SK/02/DEKOM.BKI/V/2014 of 12 May 2014

Periode Jabatan Ketua Komite : 1 periode.

Periods as Head of the Committee: 1 period

Corporate Governance

Anggota Komite Investasi (Pengembangan Usaha): **Sahat Lumban Tobing** (profesional)

Member of the Investment (Business Development) Committee: **Sahat Lumban Tobing** (professional)

Pengalaman Kerja: Supervisor Tim Evaluasi Penerapan Kebijakan APBN, BPKP-PE (2005-2009), Anggota Tim Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintahan, Wakil Kepala Lembaga Pengembangan dan Pengendalian Keuangan (1998-2004), Anggota Tim TOT, Insititut GAPAS, Lembaga Administrasi Negara (1998-2004), Senior Management Advisory Service (Applied Research and Evaluation on Economics of Organisation Management, Strategic Management, and Service Management Package, Hotel, Hospital, Postal and Delivery Service), Institut Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1996-1998), Senior Consultant/Senior Associate Researcher (Akuntansi, Keuangan, dan Ekonomi Organisasi, Manajemen dan Strategil), Institut Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1990-1996), Anggota Tim Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas BUMN Sektor Pertanian dan Perkebunan Kantor Wilayah Jakarta DJPKN, Departemen Keuangan (1989-1990).

Work Experience: Supervisor at the Evaluation Team of Implementation of State Budget Policies, BPKP-PE (2005-2009), Member of the Team for Accountability of Government Institution Performance, Deputy Head of the Financial Development and Control Institution (1998-2004), Member of the TOT Team, GAPAS Institute, State Administration Institution (1998-2004), Senior Management Advisory Service (Applied Research and Evaluation on Economics of Organisation Management, Strategic Management, and Service Management Package, Hotel, Hospital, Postal and Delivery Service), Management Institute Faculty of Economics Universitas Indonesia (1996-1998), Senior Consultant/Senior Associate Researcher (Akuntansi, Keuangan, dan Ekonomi Organisasi, Manajemen dan Strategil), Management Institute Faculty of Economics Universitas Indonesia (1990-1996), Member of the Team for Efficiency and Effectiveness of Agricultural and Plantation Sector SOEs, Kantor Wilayah Jakarta, DJPKN, Ministry of Finance (1989-1990).

Riwayat Pendidikan : Sarjana Institut Ilmu Keuangan Jakarta (1979), Master of Accounting Science (MASc) University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat (1985), PhD Candidate, University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat (1989).

Educational Background: BA of Institut Ilmu Keuangan Jakarta (1979), Master of Accounting Science (MASc) University of Illinois at Urbana Champaign, USA (1985), PhD Candidate of the University of Illinois at Urbana Champaign, USA (1989).

Dasar Hukum Penunjukan: Keputusan Dewan Komisaris No. KU.003/Dekom.101/V/2013 tanggal 10 Mei 2013

Legality of Appointment: Decision of the Board of Commissioners No. KU.003/Dekom.101/V/2013 of 10 May 2013

Periode Jabatan Anggota Komite : 2 periode

Periods as Member of the Committee: 2 periods

Anggota Komite Investasi (Pengembangan Usaha): **Win Andriansyah** (profesional)

Member of the Investment (Business Development) Committee: **Win Andriansyah** (professional)

Pengalaman Kerja: KJPP Rachmat MP dan Rekan (2012-sekarang), KJPP Rengganis Hamid dan Rekan (2010-2012), PT Piesta Penilai (2003-2010), Pertamina Buana Sadpetra Sebasa Ltd. (2001-2003), PT Surveyor Indonesia (1999-2001).

Work Experience: KJPP Rachmat MP dan Rekan (2012-now), KJPP Rengganis Hamid dan Rekan (2010-2012), PT Piesta Penilai (2003-2010), Pertamina Buana Sadpetra Sebasa Ltd. (2001-2003), PT Surveyor Indonesia (1999-2001).

Riwayat Pendidikan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1999)

Educational Background: State Accountancy Academy (1999)

Dasar Hukum Penunjukan: Keputusan Dewan Komisaris No. KU.003/Dekom.101/V/2013 tanggal 10 Mei 2013

Legality of Appointment: Decision of the Board of Commissioners No. KU.003/Dekom.101/V/2013 of 10 May 2013

Periode Jabatan Anggota Komite: 2 periode

Periods as Member of the Committee: 2 periods

Tata Kelola Perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi (Pengembangan Usaha)

Dalam rangka membantu Dewan Komisaris, Komite Investasi dan Pengembangan Usaha melakukan telaah dan evaluasi Kebijakan Direksi, mendorong kegiatan investasi (atau divestasi) sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip GCG, meninjau hasil kegiatan investasi, mengidentifikasi risiko usaha, memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional, mendalami potensi risiko serta memberikan saran perbaikan dan tindak lanjut terkait.

Rapat Komite Investasi (Pengembangan Usaha)

Pada tahun 2014, Komite Investasi dan Pengembangan telah mengikuti 13 (tiga belas) rapat internal Dewan Komisaris.

Kegiatan Komite Investasi (Pengembangan Usaha) Tahun 2014

1. Mengikuti Rapat Dewan Komisaris
2. Mengikuti Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
3. Mengadakan rapat dengan Divisi IT dan SDM
4. Melakukan kunjungan Dewan Komisaris dan Komite ke Cabang Ambon, Cabang Bitung, Cabang Makassar, Cabang Sorong, Cabang Utama Klas Samarinda dan Cabang Utama Komersial Balikpapan
5. Memberikan tanggapan atas kegiatan operasional, terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, termasuk antara lain:
 - a. Surat Direktur Utama BKI perihal persetujuan Dewan Komisaris mengenai usulan perpanjangan bank garansi
 - b. pengalihan anggaran kantor Cabang Utama Balikpapan
 - c. kinerja Semester I Tahun 2014
 - d. pengadaan perangkat lunak *e-Office* dan *Data Management System*
 - e. usulan Direksi untuk merevisi anggaran BKI Tahun 2014
 - f. kinerja bulan Agustus 2014
 - g. penghapusan aset Cabang Ambon
 - h. tindak lanjut temuan BPK
 - i. pembatalan penjualan aset tanah bangunan Cabang Cigading
 - j. Laporan Manajemen Triwulan I, II, dan III
 - k. RKAP Tahun 2015
 - l. usulan pembongkaran rumah dinas kantor Cabang Utama Balikpapan

Duties and Responsibilities of the Investment (Business Development) Committee

In the course of supporting the Board of Commissioners, the Investment and Development Committee conducts studies and evaluations of the Board of Directors' policies, encourages investments (or divestments) that follow prevailing rules and regulations and GCG principles, reviews the results of investment activities, identifies business risks, monitors the implementation of risk management policies, evaluates the execution of operational activities, studies risk potentials and provides inputs for improvement and related follow ups.

Meetings of the Investment (Business Development) Committee

In 2014, the Investment and Development Committee has joined 13 (thirteen) internal meetings of the Board of Commissioners.

Activities of the Investment (Business Development) Committee in 2014

1. Participated in Meetings of the Board of Commissioners
2. Participated in Joint Meetings Between the Board of Directors and the Board of Commissioners
3. Conducted meetings with the IT and HR Divisions
4. Visited with the Board of Commissioners Branch Ambon, Branch Bitung, Branch Makassar, Branch Sorong, Main Branch of Classification Samarinda, and Main Branch of Commerce Balikpapan
5. Provided responses to operational activities, particularly those related to the implementation of the supervision function of the Board of Commissioners, including among others:
 - a. Letter of the President Director of BKI on the approval of the Board of Commissioners towards the proposal of extending bank guarantee
 - b. reallocation of budget of the office of the Main Branch Balikpapan
 - c. performance of Semester I Year 2014
 - d. purchase of the *e-Office* and *Data Management System* software
 - e. proposal of the Board of Directors to revise the 2014 budget of BKI
 - f. performance of August 2014
 - g. write-off of assets of the Branch Ambon
 - h. follow up of BPK findings
 - i. cancellation of sales of assets (land and building) of Branch Cigading
 - j. Management Reports of Quarter I, II, and III
 - k. 2015 Work Plan and Budget
 - l. proposal of dismantling of housing facilities of Branch Balikpapan

Corporate Governance

Sekretaris Perusahaan**Corporate Secretary**

Riwayat Jabatan : Kepala Bidang EDP (1992), Kepala Satuan Jaminan Mutu (2000), Kepala Satuan Perencanaan (2005), Kepala Satuan Litbang (2011), Sekretaris Perusahaan (2013-sekarang)

Pendidikan : S1 Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya (1987), S2 Master of Business Administration, Indonesian Institut of Business Administration Jakarta (1992)



Saifuddin Wijaya

Resume of Positions : Head of EDP (1992), Head of Quality Assurance Unit (2000), Head of Planning Unit (2005), Head of Research and Development Unit (2011), Corporate Secretary (2013-now)

Educational Back-ground : BSc Ship Technology, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya (1987), Master of Business Administration, Indonesian Institut of Business Administration Jakarta (1992)

Pengalaman Kerja : PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 1987-sekarang

Work Experience : PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 1987-now

Dasar Hukum : SK Direksi No. DU.059/KP.503/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai/Pejabat di Lingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan SK Direksi No. DU. 058/LT.101/ KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Legality of Appointment : Letter of Decision of the Board of Directors No. DU.059/KP.503/KI-14 of 30 January 2014 on the Discharge and Appointment of Employees/Officers of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the Letter of Decision of the Board of Directors No. DU.058/LT.101/KI-14 of 30 January 2014 on the Improvement of the Organizational Structure of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Sistem Pengendalian Internal**Internal Control System**

BKI mengembangkan sistem pengendalian internal yang terdiri atas struktur tata kelola, prosedur, serta kegiatan. Sistem pengendalian intern BKI mencakup pengendalian keuangan dan pengendalian operasional. Sistem pengendalian internal keuangan menjamin keandalan sistem akuntansi serta kewajaran penggunaan aset dan peralihan kepemilikan. Pelaksanaan tugas pengendalian internal keuangan merupakan tanggung jawab setiap satuan kerja.

BKI develops an internal control system that consists of governance structure, procedures, and activities. The internal control system of BKI covers financial and operational control. The internal control of finance ensures the reliability of the accountancy system and the fairness of asset utilization and transfer of ownership. The implementation of the internal financial control is the responsibility of each work unit.

Struktur tata kelola pengendalian intern mencakup RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Satuan Pengendalian Intern, serta juga memposisikan auditor eksternal.

The governance structure of internal control comprises the GMS, the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit Committee, the Internal Control Unit, and also provides room for the external auditor.

Struktur ini memisahkan dengan tegas fungsi dan peran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Hubungan antar ketiganya pun diatur dengan ketat, sehingga Dewan Komisaris hanya dapat mengadakan rapat konsultatif dengan Direksi sementara Direksi hanya dapat mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris. Tidak ada hubungan keluarga ataupun keuangan antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

This structure separates clearly the function and role of the Shareholder, the Board of Commissioners and the Board of Directors. The relationship between the three organs is strictly governed, so that the Board of Commissioners can only conduct consultative meetings with the Board of Directors and the Board of Directors can only conduct coordinative meetings with the Board of Commissioners. There are no kinship or financial relations between members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Tata Kelola Perusahaan

Adapun Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, sementara Satuan Pengendalian Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor eksternal bekerja atas dasar kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Prosedur pengendalian intern diuraikan dan ditetapkan di dalam Piagam Komite Audit dan Piagam Satuan Pengawasan Intern.

Kegiatan pengendalian intern mencakup audit keuangan, audit operasional, audit kepatuhan, audit sistem informasi, *desk audit*, serta *specific review*.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian intern. Independensi SPI dijamin oleh perusahaan melalui Piagam Satuan Pengendalian Intern. Sementara itu, kapasitas SPI sebagai auditor, assesor, serta konsultan terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan anggotanya.

SPI pun memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan *review* atas efektivitas sistem pengendalian intern.

Selain itu, dalam rangka menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan penyempurnaan berkesinambungan, BKI juga mengembangkan Sistem Manajemen yang melakukan audit internal dalam lingkup manajemen mutu. Audit internal ini pun berfungsi untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada tahun 2014, Sistem Manajemen telah melakukan audit terhadap 34 unit kerja, termasuk kantor pusat dan unit produksi.

Khusus untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta mengukur kinerja berdasarkan KPI, BKI juga menggunakan jasa auditor eksternal. Hasil audit eksternal dipergunakan oleh Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas sistem pengendalian intern. Pada tahun 2014, auditor eksternal telah melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan BKI, serta melakukan evaluasi terhadap pencapaian KPI. Kegiatan auditor eksternal ini mencakup tiga kali audit, yaitu pada bulan Juni, September, dan Oktober 2014.

The Audit Committee answers to the Board of Commissioners, whereas the Internal Control Unit answers to the President Director. The external auditor works on the base of a contract that complies to prevailing rules and regulations, and is appointed by the Board of Commissioners.

The internal control procedures are explained and determined in the Audit Committee Charter and the Internal Control Unit Charter.

The internal control activities comprise financial audits, operational audits, compliance audits, information system audits, desk audits, and specific reviews.

The Internal Control Unit (ICU) is responsible for the effectivity of the internal control system. The independency of the ICU is guaranteed by the company through the Internal Control Unit Charter. Meanwhile, the capacity of the ICU members as auditors, assessors, and consultants is continuously improved through various education and training activities.

The ICU also monitors the compliance towards prevailing rules and regulations and review the effectivity of the internal control system.

Furthermore, in the course of implementing the Quality Management System ISO 9001:2008 that is oriented towards customer satisfaction and continuous improvement, BKI also develops a Management System that conducts internal audits in terms of quality management. This internal audit also functions to enhance the effectivity of the internal control system. In 2014, the Management System has conducted audits of 34 work units, including the head office and production units.

In particular, to improve the quality of financial reporting and to measure performance based on KPIs, BKI also uses the services of an external auditor. The results of the external audits are used by the Board of Commissioners to evaluate the effectiveness of the internal control system. In 2014, the external auditor has audited the annual financial report of BKI, and has evaluated the achievement of KPIs. These activities of the external auditor includes three audits, namely in June, September, and October of 2014.

Corporate Governance

Satuan Pengawasan Intern

Audit Internal

Nama : Jamaluddin Gani
Jabatan : Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka. SPI)

Pendidikan : Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin 1986

Pengalaman Kerja : PLN Makassar (1981), PIR Tanaman Pangan (1987), PDAM Tangerang (1987), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), 1987-sekarang



Jamaluddin Gani

Name : Jamaluddin Gani
Position : Head of Internal Control Unit

Education : BA Economics, Faculty of Economics Universitas Hasanuddin 1986

Work Experience : PLN Makassar (1981), PIR Tanaman Pangan (1987), PDAM Tangerang (1987), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), 1987-now

Dasar Hukum : SK Direksi No. DU.059/KP.503/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai/Pejabat di Lingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan SK Direksi No. DU. 058/LT.101/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Sertifikasi : Auditor Pemeriksa, Sukabumi tahun 2008

Legality : Letter of Decision of the Board of Directors No. DU.059/KP.503/KI-14 of 30 January 2014 on the Discharge and Appointment of Employees/Officers of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the Letter of Decision of the Board of Directors No. DU.058/LT.101/KI-14 of 30 January 2014 on the Improvement of the Organizational Structure of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Certification : Investigating Auditor, Sukabumi 2008

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI mengacu kepada kode etik *The Institute of Internal Auditor Inc.* yang telah disokong oleh Konsorsium Profesi Audit Internal Indonesia.

In the implementation of its duties, the ICU adheres to the code of ethics of *The Institute of Internal Auditor Inc.* that is endorsed by the Indonesian Consortium of Internal Audit Professionals.

Struktur dan Kedudukan SPI

SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, serta berkoordinasi dengan Komite Audit dan auditor eksternal.

Structure and Position of ICU

The ICU answers directly to the President Director, and coordinates with the Audit Committee and the external auditor.

Kewajiban SPI

1. Membantu Direktur Utama dalam hal: memantau kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen perusahaan, mendorong efektivitas organ tata kelola perusahaan, serta mendorong efektivitas proses pengendalian manajemen, manajemen risiko, implementasi etika bisnis, dan pengukuran kinerja organisasi;
2. Membantu Manajemen dalam hal memberikan kajian dan rekomendasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan dari sisi efektivitas, efisiensi, dan ekonomi serta memberikan masukan tentang perubahan lingkungan, mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Responsibilities of the ICU

1. Assisting the President Director in terms of: monitoring the sufficiency and effectiveness of the internal control system of the company, driving the effectivity of the corporate governance organs, and driving the effectivity of processes of management control, risk management, implementation of business ethics, and measurement of the organization's performance;
2. Helping the Management by providing studies and recommendations towards achievements of corporate goals and targets in terms of effectivity, efficiency, and economics, and provide inputs about changes of the environment, identifying chances of enhancing efficiency and effectivity.

Tata Kelola Perusahaan

Ruang Lingkup Kegiatan SPI

1. Sistem pengendalian manajemen
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Informasi keuangan dan informasi operasional
4. Perlindungan kekayaan perusahaan
5. Tugas khusus yang terkait dengan penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan
6. Penyiapan laporan *assurance* dan rekomendasi perbaikan

Kegiatan SPI tahun 2014

Pada tahun 2014, SPI telah melakukan audit operasional terhadap 18 unit produksi dan satu unit kerja.

Coverage of the ICU's Activities

1. Management control system
2. Prevailing rules and regulations
3. Financial and operational information
4. Safeguarding of company assets
5. Special tasks related to deviation, fraud, and dissipation
6. Preparation of assurance reports and improvement recommendations

Activities of the ICU in 2014

In 2014, the ICU has conducted operational audits at 18 production units and one work unit.

Sistem Manajemen Risiko

Management Risk System

Nama : Sudirman, S.E.

Jabatan : Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Tata Kelola

Pendidikan : Sarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pengalaman Kerja : PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 1984 - Sekarang.



Sudirman, S.E.

Name : Sudirman, S.E.

Position : Head of Risk Management & Governance Division

Pendidikan : BA Accounting, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Work Experience : PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 1984 - Now.

Dasar Hukum : Melalui Surat Keputusan

Direksi No. DU.059/KP.503/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai/Pejabat di Lingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan SK Direksi No. DU. 058/LT.101/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), Direksi telah menunjuk Sudirman, Sarjana Akuntansi (S1) dan bekerja di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sejak tahun 1984 sampai sekarang, sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko yang juga menangani masalah *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

Legality : With the Letter of Decision of the Board

of Directors No. DU.059/KP.503/KI-14 of 30 January 2014 on the Discharge and Appointment of Employees/Officers of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the Letter of Decision of the Board of Directors No. DU.058/LT.101/KI-14 of 30 January 2014 on the Improvement of the Organizational Structure of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), the Board of Directors has appointed Sudirman, BA Accounting and working at PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) since 1984 until now, as Head of the Risk Management Division who also handles Good Corporate Governance (GCG) matters and Excellent Performance Evaluation Criteria.

Gambaran Umum

BKI menerapkan Manajemen Risiko Korporasi (ERM) untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam menghadapi risiko. ERM mencakup filosofi manajemen risiko, kriteria risiko, serta serangkaian kegiatan terkoordinasi mulai dari identifikasi risiko sampai dengan pemantauan penanganan risiko, dan juga infrastruktur manajemen risiko.

Overview

BKI implements an Enterprise Risk Management (ERM) to direct and control the company in facing risks. ERM includes a risk management philosophy, risk criteria, and a set of coordinated activities starting from risk identification to the monitoring of risk handling, as well as the risk management infrastructure.

Corporate Governance

Filosofi Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko BKI mengatur hubungan antara pemilik risiko kunci, Divisi Manajemen Risiko, serta atasan pemilik risiko kunci. Atasan ini menetapkan tujuan manajemen risiko yang terkait RJPP, RKAP, tujuan proses bisnis yang menggunakan sumber daya perusahaan, serta tujuan rencana kerja pelaksanaan/aktivitas proyek.

Prosedur Identifikasi Risiko

Pemilik risiko dan divisi manajemen risiko melakukan proses identifikasi risiko yang mencakup: peristiwa risiko, penyebab risiko, sumber risiko, serta peristiwa risiko baru.

Risiko-risiko tersebut terdiri atas adalah:

The risks comprise:

Jenis Risiko Type of Risk	Referensi Reference
Risiko Strategis / Strategic Risk yaitu risiko-risiko yang / namely risks that: • Akan mempengaruhi tercapainya tujuan bisnis perusahaan / may affect the achievement of business objectives; • Mengancam reputasi perusahaan dari aktifitasnya / through the company's activities may threaten the company's reputation; • Timbul karena pelanggaran terhadap GCG, hukum serta peraturan / occurs due to violations of GCG principles, rules and regulations	• APBN/APBD / State/Regional Annual Work Plan and Budget • RJPP / Long-term Plan of the Company • RKAP / Annual Work Plan and Budget of the Company • Dokumen Tender / Bidding Documents • Kontrak Kerja / Work Contracts • Peraturan dan Perundangundangan yang terkait, misalnya UU BUMN, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UU Keuangan dan Negara dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi / Prevailing rules and regulations such as for instance the SOE Law, the Presidential Decree on Procurement of Goods/Services by the Government, the Public Finance Law, and the Anti Corruption Law
Risiko Operasional / Operational Risks yaitu risiko-risiko yang muncul karena / namely risks that occur due to: • Kegagalan sistem / system failure; • Lemahnya quality control / weak quality control; • Panjangnya birokrasi / red-tape bureaucracy; • Human error dalam proses produksi / human error in the production process;	• Dokumen Tender / Bidding Documents • Kontrak Kerja / Work Contracts • Sistem dan Prosedur serta bagan alir / System and Procedure and Flow Chart
Risiko Finansial / Financial Risks yaitu risiko-risiko yang mempengaruhi kemampuan perusahaan menghasilkan profit seperti / namely risks that influence the company's profitability, such as: • Lemahnya pengendalian biaya/ weak cost control; • Kurangnya modal / lack of capital; • Perubahan suku bunga / changes in interest rates; • Fluktuasi kurs valuta asing, termasuk didalamnya risiko akibat kredit dan likuiditas yang terkait dengan pelaksanaan proyek/kegiatan tersebut / currency exchange rate fluctuation, including risks that occur in relation to lending and liquidity linked to the implementation of projects/activities.	• RKAP / Annual Work Plan and Budget of the company • Laporan Keuangan / Financial Report • Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Budget Plan (RAB)

Risk Management Philosophy

BKI's risk management system regulates the relations between key risk owners, the Risk Management Division, and the superiors of the key risk owners. The superiors set the aim of risk management in relation with the Long-term Corporate Development Plan, the Annual Work Plan and Budget, the aim of the business processes that use resources of the company, and the aim of the work plan of the project implementation/activity.

Risk Identification Procedure

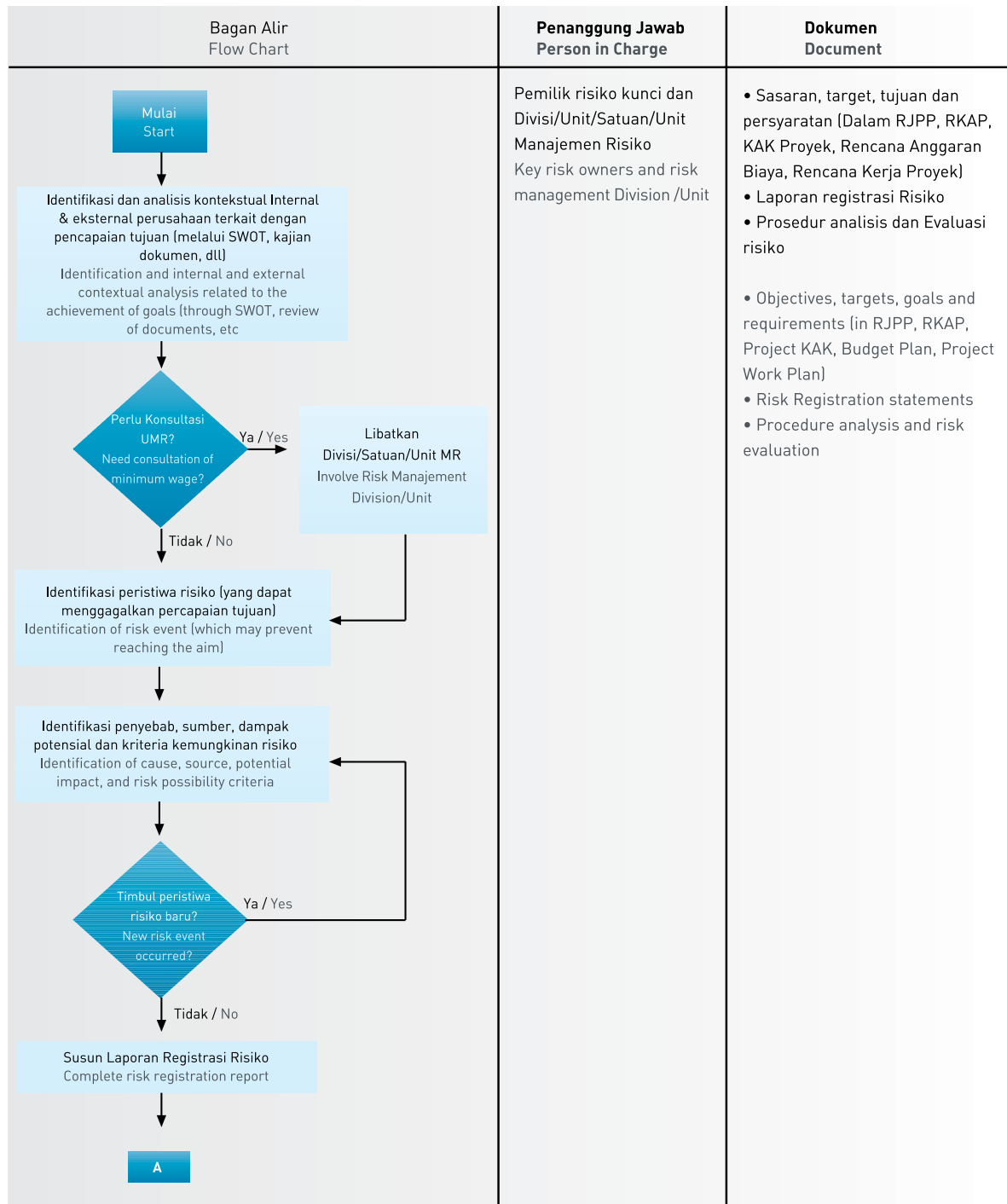
The risk owner and the risk management division conduct the risk identification process that includes: risk event, risk cause, risk sources, and new risk event.

Tata Kelola Perusahaan

Setiap potensi risiko yang timbul akan diidentifikasi pula dampak dan mitigasinya oleh Pemilik Risiko Kunci dan Divisi/Satuan/Divisi Manajemen Risiko. Seluruh potensi risiko yang teridentifikasi dimasukkan ke dalam formulir Laporan Registrasi Risiko dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Every risk potential will be identified as well as the impact and mitigation by the Key Risk Owner and the Risk Management Division/Unit. All identified risk potentials are listed in the Risk Registration Report that is signed by an authorized officer.

Bagan Alir Prosedur Identifikasi Risiko
Risk Identification Flow Chart



Corporate Governance

ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO

1. Divisi Manajemen Risiko bersama Pemilik Risiko Kunci melakukan pengukuran dan penentuan peringkat dampak dan kemungkinan risiko yang telah teridentifikasi dengan menggunakan tera dampak dan kemungkinan risiko yang telah ditetapkan serta memperhitungkan efektivitas kontrol internal yang ada.

Peringkat kemungkinan risiko yang digunakan adalah sebagai berikut :

Peringkat kemungkinan risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:
The rating of risk possibility is as follows:

Tingkat Kemungkinan Possibility	Probabilitas Terjadinya Risiko Risk Probability	Frekuensi Terjadinya Risiko Risk Frequency
(1) Sangat Kecil / Very Low	0 – 20 %	Tahunan / Yearly
(2) Kecil / Low	21 – 40 %	Semester / Semesterly
(3) Sedang / Medium	41 – 60 %	Triwulan / Quarterly
(4) Besar / High	61 – 80 %	Bulanan / Monthly
(5) Sangat Besar / Very High	81 – 100 %	≤ Mingguan / Weekly

Peringkat dampak risiko yang digunakan adalah sebagai berikut :

Peringkat dampak risiko yang digunakan adalah sebagai berikut :
The rating of risk impacts is as follows:

Dampak Impact	Kerugian Loss	Hukum Sanction	Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction
(1) Sangat Kecil / Very Low	≤ Rp 2,5 M	Sanksi Adm / Administrative Sanction	80% – 100%
(2) Kecil / Low	Rp 2,5 M – Rp 5 M	Diberhentikan / Dismissed	70% - 79%
(3) Sedang / Medium	Rp 5 M – Rp 7 M	Denda / Fine	50% - 69%
(4) Besar / High	Rp 7 M - Rp 10 M	Penjara / Imprisonment	20% - 49%
(5) Sangat Besar / Very High	≥ Rp 10 M	Denda & Penjara / Fine & Imprisonment	≤ 20%

2. Berdasarkan peringkat dampak dan kemungkinannya, Divisi Manajemen Risiko bersama Pemilik Risiko Kunci melakukan perhitungan nilai risiko dengan menggunakan metode berikut:

ANALYSIS AND EVALUATION OF RISK

1. The Risk Management Division together with the Key Risk Owner conduct measurement and rating of impact and possibility of identified risks to manifest by using predefined criteria of risk impacts and possibility and considering the effectivity of the existing internal control.

The rating of risk possibility is as follows:

The rating of risk impacts is as follows:

2. Based on the possibility and impact rating, the Risk Management Division together with the Key Risk Owner calculate the risk value based on the following formula:

$$\text{Nilai Risiko} = \text{Peringkat Dampak} \times \text{Peringkat Kemungkinan}$$

$$\text{Risk Value} = \text{Impact Rating} \times \text{Possibility Rating}$$

Tata Kelola Perusahaan

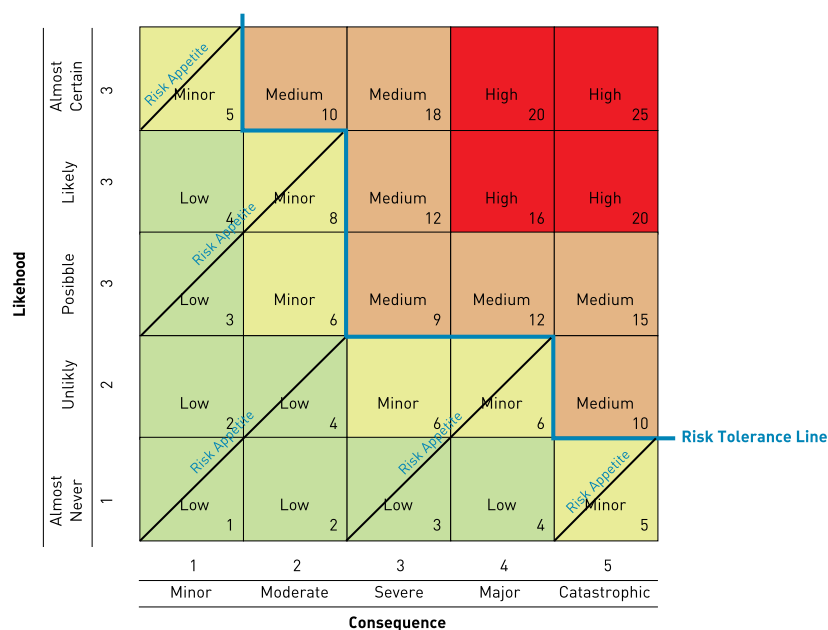
3. Berdasarkan hasil perhitungan nilai risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan pengelompokan dan pemeringkatan dengan merujuk pada tabel kategori (eksposur) risiko di bawah ini :

Nilai risiko Risk value	Kategori Risiko Risk category	Tingkat eksposur risiko (dampak dan kemungkinan) terhadap perusahaan Risk Exposure (impact and possibility) towards the company
1 - 4	"Low"	Kecil / Small (kondisi aman; perusahaan perlu menjaga efektivitas pengendalian internalnya) (condition: safe; company needs to uphold the effectiveness of its internal control)
5 - 8	"Minor"	Sedang / Medium (kondisi gangguan; perusahaan perlu meningkatkan efektivitas pengendalian internalnya) (condition: fault; company needs to enhance the effectiveness of its internal control)
9 - 15	"Medium"	Tinggi / High (kondisi berbahaya; perusahaan perlu melaksanakan rencana penanganan risiko) (condition: dangerous; company needs to apply risk mitigation plan)
16 - 25	"High"	Ekstrem / Extremely High (kondisi kritis; perusahaan harus melakukan penanganan risiko sesegera mungkin) (condition: critical; company must perform risk mitigation immediately)

4. Berdasarkan pengelompokan dan pemeringkatan risiko berdasarkan kategori eksposurnya, Divisi Manajemen Risiko memetakan risiko-risiko yang telah dianalisis pada format Peta Risiko perusahaan yang telah ditetapkan.

3. Based on the risk value calculation, the Risk Management Division categorizes and ranks risks based on the following risk exposure tabel:

4. Based on risk categorization and ranking based on the exposure category, the Risk Managment Division map the analyzed risks with the predefined Corporate Risk Map format.



Corporate Governance

5. Sesuai dengan hasil pemetaan, Divisi Manajemen Risiko melakukan evaluasi risiko guna menentukan risiko-risiko yang memerlukan tindakan penanganan risiko dengan merujuk pada standar respon risiko berikut:

5. Based on the mapping, the Risk Management Division evaluates risks to determine risks that require risk mitigation by using the following risk responses standard:

Nilai Risiko Risk Value	Kategori risiko Risk category	Standar Respon Risiko Standard Risk Response
Low	1 - 4	Pengelolaan risiko dilakukan oleh masing-masing SBU (termasuk proyek) & NBU terkait dengan pengembangan kontrol / prosedur Risk management is conducted by each SBU (including projects) & NBU related to control/procedure development
Minor	5 - 8	Pengelolaan risiko dilakukan oleh masing-masing SBU (termasuk proyek) & NBU dengan dilengkapi rencana aksi lebih lanjut Risk Management is conducted by each SBU (including project) & NBUs that are equipped with a follow-up plan
Medium	9 - 15	Pencegahan dan rencana penanganan risiko harus disusun oleh Kepala Unit dan pelaksanaannya dimonitor oleh Direksi Risk prevention and risk management plan has to be formulated by the Unit Head and the implementation has to be monitored by the Board of Directors
High	16 - 25	Risiko harus segera dicegah atau rencana penanganan risiko dieskalasi oleh Kepala Unit kepada Direksi, pelaksanaannya dimonitor secara intensif oleh Direksi Risks have to be immediately prevented or the risk management plan has to be escalated by the Unit Head to the Board of Directors, and the implementation has to be intensively monitored by the Board of Directors

6. Hasil analisis dan evaluasi risiko disusun dan ditandatangani oleh Pemilik Risiko Kunci dan Kepala Divisi Manajemen Risiko dalam suatu tabel yang dinamakan "Laporan Profil Risiko".

6. Risk analysis and evaluation results are formulated in a "Risk Profile Report" table, which is then signed by the Key Risk Owner and the Risk Management Division Head.

7. Divisi Manajemen Risiko mengirimkan Laporan Profil Risiko ke Direksi dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Direksi Terkait dan Direktur Keuangan & Adm.

7. The Risk Management Division submits the Risk Profile Report to the Board of Directors and attaches the Budget Plan that has been approved by the related Director and the Director of Finance & Administration.

8. Laporan Profil Risiko yang telah disetujui atau tidak disetujui diserahkan kembali ke Divisi/Satuan/Divisi Manajemen Risiko.

8. The Risk Profile Report, whether approved or not approved, is resend to the Division/Unit/Risk Management Division.

Pola Komunikasi dan Konsultasi Manajemen Risiko

ERM yang diterapkan BKI juga mencakup pengaturan komunikasi dan konsultasi manajemen risiko.

Risk Management Communication and Consultation Pattern

The ERM that is implemented by BKI also includes the regulation of risk management communication and consultation.

Tata Kelola Perusahaan

Bagan Pola Komunikasi dan Konsultasi Manajemen Risiko
Risk Management Consulting and Communication Pattern Chart

Eksposur Risiko Risk Exposure	Pelaksana Komunikasi & Konsultasi Communications & Consulting Executive	Pihak berkepentingan Stakeholders
"HIGH"	Direksi (sebagai pemangku akuntabilitas pengelolaan risiko perusahaan) Board of Directors (as stakeholder of Risk Management Accountability)	Pemangku kepentingan eksternal (Dewan Komisaris, perwakilan pemegang saham dsb.) External stakeholders (Board of Commissioners, representatives of Shareholders, etc.)
	Direksi (sebagai Pemilik Risiko Kunci) Directors (as Key Risk Owner)	Pemangku kepentingan internal terkait (Kepala Unit Kerja, Divisi Manajemen Risiko, auditor internal dsb.) Relevant internal stakeholders (Head of Unit, Risk Management Division, internal auditors, etc)
	Komite Manajemen Risiko (bila dibentuk oleh Direksi) Risk Management Committee (if established by the Board of Directors)	Direksi Board of Directors
		Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Unit Kerja & Proyek (Kepala Unit Kerja & Pimpinan Proyek) Key Risk Owner in Work Unit & Project (Head of Work Unit & Project Leader)
		Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
		Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)
	Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Unit Kerja (Kepala Unit Kerja) Key Risk Owner in Work Unit Level (Head of Work Unit)	Pemilik Risiko di tingkat Unit Kerja (Kepala Seksi & staf) Risk Owner in Work Unit Level (Section Head & staff)
		Atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko) Relevant Superior (according to Risk Response Standard)
		Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek) Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)
		Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
	Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek) Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)	Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (Komite Manajemen Risiko, auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (Risk Management Committee, internal auditors, etc)
		Atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko) Relevant Superior (according to Risk Response Standard)
		Pemilik Risiko di tingkatan Proyek (Manajemen Proyek) Risk Owner in Project Level (Project Management)
		Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division	Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (Komite Manajemen Risiko, auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (Risk Management Committee, internal auditors, etc)
		Para Pemilik Risiko Kunci (beserta Pemilik Risiko) di tiap tingkatan perusahaan Key Risk Owners (and Risk Owners) in every level of the Company
		Pemangku kepentingan eksternal (persetujuan Direksi/atasan terkait Divisi Manajemen Risiko) External stakeholders (approval of the Board of Directors / Risk Management Division Relevant Superior)
		Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (Komite Manajemen Risiko, auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (Risk Management Committee, internal auditors, etc)

Corporate Governance

Eksposur Risiko Risk Exposure	Pelaksana Komunikasi & Konsultasi Communications & Consulting Executive	Pihak berkepentingan Stakeholders
"MEDIUM"	Direksi (sebagai pemangku akuntabilitas pengelolaan risiko perusahaan) Board of Directors (as stakeholder of Risk Management Accountability)	Pemangku kepentingan internal terkait (Kepala Unit Kerja, Divisi Manajemen Risiko, auditor internal dsb.) Relevant internal stakeholders (Head of Work Unit, Risk Management Division, internal auditors, etc)
	Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Unit Kerja (Kepala Unit Kerja) Key Risk Owner in Work Unit (Head of Work Unit)	Pemilik Risiko di tingkat Unit Kerja (Kepala Seksi & staf) Risk Owner in Work Unit Level (Section Head & staff)
		Atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko) Relevant Superior (according to Risk Response Standard)
		Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek) Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)
		Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
		Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)
	Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek) Key Risk Owner in Project level (Project Leader)	Pemilik Risiko di tingkatan Proyek (Manajemen Proyek) Risk Owner in Project Level (Project Management)
		Atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko) Relevant Superior (according to Risk Response Standard)
		Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
		Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)
	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division	Para Pemilik Risiko Kunci (beserta Pemilik Risiko) di tiap tingkatan perusahaan Key Risk Owners (and Risk Owner) in each level of the Company
		Pemangku kepentingan eksternal (persetujuan Direksi/atasan terkait Divisi Manajemen Risiko) External stakeholders (the approval of Board of Directors/ Risk Management Division Relevant Superior)
		Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)
"MINOR"	Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Unit Kerja (Kepala Unit Kerja) Key Risk Owner in Work Unit level (Head of Work Unit)	Pemilik Risiko di tingkat Unit Kerja (Kepala Seksi & staf) Risk Owner in Work Unit Level (Section Head & Staff)
		Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek) Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)
		Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
		Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)
	Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek) Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)	Atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko) Relevant Superior (according to Risk Response Standard)
		Pemilik Risiko di tingkatan Proyek (Manajemen Proyek) Risk Owner in Project Level (Project Leader)
		Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
		Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)
	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division	Para Pemilik Risiko Kunci (beserta Pemilik Risiko) di tiap tingkatan perusahaan Key Risk Owners (and Risk Owner) in each level of the Company
		Pemangku kepentingan eksternal (persetujuan atasan terkait Divisi Manajemen Risiko) External stakeholders (approval of Risk Management Division relevant supervisor)
		Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)

Tata Kelola Perusahaan

Eksposur Risiko Risk Exposure	Pelaksana Komunikasi & Konsultasi Communications & Consulting Executive	Pihak berkepentingan Stakeholders
"LOW"	Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Unit Kerja (Kepala Unit Kerja) Key Risk Owner in Work Unit Level (Head of Work Unit)	Pemilik Risiko di tingkat Unit Kerja (Kepala Seksi & staf) Risk Owner in Work Unit level (Section Head & Staff)
		Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek) Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)
		Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
	Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek) Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)	Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)
		Atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko) Relevant Superior (according to Risk Response Standard)
		Pemilik Risiko di tingkatan Proyek (Manajemen Proyek) Risk Owner in Project Level (Project Management)
	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division
		Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)
		Para Pemilik Risiko Kunci (beserta Pemilik Risiko) di tiap tingkatan perusahaan Key Risk Owners (and Risk Owner) in each level of the Company
		Pemangku kepentingan eksternal (persetujuan atasan terkait Divisi Manajemen Risiko) External stakeholders (approval of relevant supervisor related to Risk Management Division)
		Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal dsb.) Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)

Divisi Manajemen Risiko

Melalui Surat Keputusan Direksi No. DU.059/KP.503/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai/Pejabat di Lingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan SK Direksi No. DU. 058/LT.101/KI-14 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), Direksi telah menunjuk Sudirman, Sarjana Akuntansi (S1) dan bekerja di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sejak tahun 1984 sampai sekarang, sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko yang juga menangani masalah *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

Sistem Manajemen Mutu

BKI mengembangkan sistem manajemen mutu (QMS) atas dasar ISO 9001:2008, SNI 17020, SNI 17025, dan standar *Quality System for Certification Scheme - International Association of Classification Societies* (QSCS-IACS). QMS BKI telah disertifikasi oleh badan sertifikasi independen *United Kingdom Assurance System* (UKAS) pada tahun 1999.

Risk Management Division

With the Letter of Decision of the Board of Directors No. DU.059/KP.503/KI-14 of 30 January 2014 on the Discharge and Appointment of Employees/Officers of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the Letter of Decision of the Board of Directors No. DU.058/LT.101/KI-14 of 30 January 2014 on the Improvement of the Organizational Structure of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), the Board of Directors has appointed Sudirman, BA Accounting and working at PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) since 1984 until now, as Head of the Risk Management Division who also handles *Good Corporate Governance* (GCG) matters and Excellent Performance Evaluation Criteria.

Quality Management System

BKI develops its quality management system (QMS) based on the standards of ISO 9001:2008, SNI 17020, SNI 17025, and *Quality System for Certification Scheme - International Association of Classification Society* (QSCS-IACS). The QMS of BKI has been certified by the independent certification body *United Kingdom Assurance System* (UKAS) in 1999.

Corporate Governance

Pusatnya adalah Quality Assurance Center (QAC), yang sekaligus berperan sebagai penanggung jawab pengembangan, implementasi, dan kontrol sistem. QAC memantau pelaksanaan fungsi QMS pada setiap unit kerja.

Masing-masing kepala unit kerja bertanggung jawab atas pemahaman QMS secara konseptual, komunikasi dan sosialisasi perkembangan QMS, evaluasi efektivitas QMS, ketersediaan sumber daya QMS, serta perbaikan QMS secara berkesinambungan di unit kerjanya.

Kepuasan Pelanggan

Unit produksi diharuskan memahami kebutuhan pemakai jasa dan mengoptimalkan pelayanan terkait. Khusus kegiatan jasa klasifikasi dan statutoria, kepuasan pelanggan diartikan sebagai terpenuhinya segala permintaan dan kebutuhan pemakai jasa sepanjang tidak menyimpang dari peraturan klasifikasi dan statutoria, dan BKI telah melaksanakan *Services Level Agreement* (SLA).

Manajemen secara konsisten mengevaluasi kebutuhan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Hasil evaluasi tersebut dikomunikasikan dengan unit kerja terkait dalam hal ini Divisi Hubungan Pelanggan, sehingga mendorong upaya perbaikan QMS secara berkesinambungan.

Kendali Mutu

Kontrol terhadap kualitas dilakukan oleh beberapa pihak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Cabang/Wakil Kepala Cabang: mengawasi langsung kegiatan produksi di cabang;
2. Kepala Divisi Sistem Manajemen melakukan audit internal di setiap unit kerja;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern melakukan pemeriksaan internal dalam hal keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Principal Surveyor melakukan pemeriksaan langsung terhadap survei lapangan;
5. Divisi survei melakukan verifikasi laporan survei untuk memastikan pelaporan sesuai prosedur; dan;
6. Badan akreditasi independen melakukan audit eksternal dua kali dalam satu tahun.

Perkara Penting

Pada tahun 2014, baik perusahaan, anggota Dewan Komisaris, maupun anggota Direksi tidak terlibat perkara penting yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan, kinerja keuangan, dan pelaporan keuangan.

The core of the system is the Quality Assurance Center (QAC), which also acts as the unit in charge of the development, the implementation, and the control of the system. The QAC monitors the implementation of the QMS function at every work unit.

Each work unit head is responsible for the conceptual understanding of QMS, the communication and socialization of QMS, the evaluation of QMS effectivity, the availability of QMS resources, and the continuous improvement of QMS of his or her work unit.

Customer Satisfaction

Production units have to understand the need of the users of their services and optimize related services. In the case of classification and statutory services, customer satisfaction is understood as the fulfilment of all demands and needs of the service users as long as they do not deviate from classification and statutory rules, and BKI has implemented the *Services Level Agreement* (SLA).

The Management consistently evaluates the needs and the satisfaction of customers. The results of the evaluation are communicated with the related work unit, particularly the Customer Relation Division, in order to drive continuous improvement of QMS.

Quality Control

Quality control is conducted by several parties, with the following regulation:

1. The Branch Head or the Deputy supervises directly the production activities of the branch;
2. The Head of the Management System Division conducts internal audits at each work unit;
3. The Head of the Internal Control Unit conducts internal inspections in terms of finance, operations, and compliance towards prevailing rules and regulations
4. The Principal Surveyor conducts direct inspection related to field surveys;
5. The Survey Division conducts survey report verification to ensure that the reporting has followed existing procedures; and
6. The independent accreditation body conducts external audits two times per year.

Material Legal Cases

In 2014, the company, members of the Board of Directors, and members of the Board of Directors were not involved in legal cases that may influence the company's reputation, financial performance, and financial reporting.

Tata Kelola Perusahaan

Sanksi Administratif

BKI belum mencatatkan saham ataupun efek lainnya di bursa.

Kode Etik dan Budaya Perusahaan

BKI memiliki sistem nilai yang menentukan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja menata nilai perusahaan sehingga menjadi pedoman perilaku. Sementara itu, etika bisnis menata nilai mengenai: integritas dalam berusaha; data perusahaan dan kerahasiaan informasi; pernyataan palsu, klaim palsu, dan konspirasi; penyelewangan dan penyimpangan; benturan kepentingan dalam hasil survei; benturan kepentingan dalam pengadaan; serta benturan kepentingan dalam aktivitas sampingan.

Nilai Perusahaan

- **Integritas:** karyawan mengembangkan kepribadian etis dan selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, dan dedikasi yang tinggi, dengan menjunjung tinggi nama baik perusahaan
- **Profesionalisme:** setiap karyawan memiliki komitmen tinggi untuk mencapai hasil terbaik dan melampaui sasaran yang ditetapkan melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan.
- **Kerjasama:** karyawan berusaha untuk menyatukan kemampuan dan menggali potensi setiap orang melalui sinergi dan kerja tim untuk mencapai tujuan bersama melalui sikap dan perilaku empirik, proaktif, percaya, dan terbuka
- **Pelayanan Prima:** karyawan bersikap dan berperilaku ramah, menebar salam, santun, ikhlas, proaktif dalam melayani, demi kepuasan pelanggan
- **Sadar Lingkungan:** karyawan berperan aktif untuk melestarikan lingkungan alam, lingkungan kerja, dan lingkungan usaha, menjaga hubungan baik dengan mitra kerja dan masyarakat, menciptakan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan, serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja
- **Kepuasan Pelanggan:** karyawan memberikan kepuasan kepada pemakai jasa melalui produk dan pelayanan prima yang bermutu, dilandasi etos kerja bertindak segera, responsif, disiplin, kerja keras, kreatif, bersih, dan baik sangka.

Integritas dalam Berusaha

BKI mendorong integritas dalam berusaha melalui penerapan *GCG Code*; audit dan pengenaan sanksi terkait tindakan ilegal, tidak wajar, dan melanggar norma. Secara

Administrative Sanctions

BKI has not listed its shares or other securities at any bourse.

Code of Ethics and Corporate Culture

BKI has a value system that guides its work ethics and business ethics. The work ethics organize corporate values as code of conducts. Meanwhile, the business ethics organize values about: business integrity; corporate data and information confidentiality; false statements, false claims, and conspiracy; fraud and deviation; conflicts of interests in survey results; conflict of interests in procurement; conflict of interests in side activities.

Corporate Values

- **Integrity:** employees develop an ethical personality and always uphold the truth by being honest, disciplined, a role model, as well as high dedication and maintaining the company's good reputation
- **Professionalism:** every karyawan is highly committed to reach the best result and surpass targets given to him or her by way of innovating and continuously improving
- **Cooperation:** employees strive to unite their strengths and explore potencies of each individual through synergy and team work to reach common goals and adhere to empiric, proactive, trusting, and open attitude and behavior
- **Service Excellence:** employees have a proactive attitude that is marked by friendliness, politeness, and sincerity towards customer satisfaction
- **Environmental Awareness:** employees actively conserve the natural environment, the work environment, and the business environment, by maintaining good relations with partners and communities, developing healthy and pleasant work atmospheres, and prioritizing occupational health and safety
- **Customer Satisfaction:** employees ensure satisfaction of customers by providing quality products and services, based on an ethos that emphasizes prompt action, responsiveness, discipline, hard work, creativity, cleanliness, and trustfulness.

Business Integrity

BKI upholds integrity in conducting business through the implementation of a *GCG Code*; audit and sanctioning of illegal, unfair, and unethical actions. Particularly, the

Corporate Governance

husus perusahaan melarang anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan terlibat transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip GCG.

Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

BKI memelihara catatan yang akurat dan andal mengenai aktivitas usaha dan operasional secara berkelanjutan. Kebijakan perusahaan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengungkapkan informasi rahasia, namun memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menyetujui pengungkapan informasi rahasia dalam kondisi khusus.

Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi

Seluruh jajaran perusahaan yang berkaitan dengan tugas pemasaran, *drawing approval*, pelaksanaan survei dan inspeksi, proses sertifikasi, pembuatan kontrak/perjanjian dan administrasi keuangan, termasuk akuntansi, harus menyadari pentingnya pernyataan yang akurat dan klaim yang benar, termasuk pernyataan lisan dan tertulis. Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif, pidana dan perdata bagi personil yang bersangkutan dan pihak yang terlibat, termasuk mitra kerja perusahaan dan pegawainya.

Penyelewengan dan Penyimpangan

BKI melarang setiap bentuk penyelewengan dan penyimpangan sebagai berikut :

- Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan
- Berlaku tidak jujur atau berbohong dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan
- Penggelapan, penghilangan, atau pemindahtanganan tanpa otoritas
- Pemalsuan atau manipulasi surat berharga perusahaan
- Penyalahgunaan aset perusahaan
- Pengalihan kas, surat berharga atau aset perusahaan untuk keuntungan pribadi
- Penanganan dan pelaporan transaksi tidak sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan
- Pemalsuan catatan akuntansi atau laporan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan perusahaan.

company prohibits members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and employees to become involved in transactions that violate the law and GCG principles.

Corporate Data and Information Confidentiality

BKI maintains continuous, accurate and reliable records of its business and operational activities. The company's policy forbids the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees to disclose confidential information, but authorizes the Board of Directors to reveal confidential information in special conditions.

False Statements, False Claims, and Conspiracy

All personnel of the company that are related to marketing duties, drawing approval, surveys and inspections, certification process, design of contracts/agreements and financial administration, including accountancy, have to realize the importance of accurate statements, true claims, including verbal and written statements. Deliberately making false or misleading statements or claims or that may create conspiracy with other people to the disadvantage of other parties could result in administrative, criminal and civil punishment for the personnel and parties involved, including the company's partners and their employees.

Fraud and Deviation

BKI forbids the following forms of fraud and deviation:

- violation of company rules
- dishonesty or deceit related to the implementation of duties
- fraud, omission, or unauthorized transfer
- falsification or manipulation of the company's securities
- misuse of company assets
- transfer of cash, securities or company assets for personal use or interest
- handling and reporting of transactions that do not comply with procedures and prevailing rules and regulations
- falsification of accounting records and the company's financial report for personal interests or other interests that can harm the company.

Tata Kelola Perusahaan

Benturan Kepentingan dalam Keputusan Hasil Survei

Seluruh jajaran BKL harus senantiasa menjaga independensi dalam pengambilan keputusan, pembuatan rekomendasi, perumusan keputusan hasil survei, serta pembuatan laporan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, aspek keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi prioritas utama.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan yang melibatkan perusahaan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai andil atau kepemilikan saham yang signifikan, atau mempunyai kepentingan finansial tertentu.

Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan karyawan tidak boleh mengikuti aktivitas sampingan yang menurunkan kemampuan yang bersangkutan dalam memenuhi tugas pekerjaannya. Keterlibatan dalam aktivitas sampingan yang diizinkan tidak boleh mengurangi independensi dan obyektivitas dalam mengambil keputusan. Permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan harus mendapat persetujuan dari Direksi atau pejabat yang berwenang.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan

BKL tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

BKL telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran yang dikukuhkan dengan Keputusan Direksi No. DU.060C/LT.101/KI-14 tanggal 5 Februari 2014 tentang Pedoman Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blowing System* (WBS). Sistem ini dikembangkan dengan azas menjamin kerahasiaan pelapor di lingkungan kerja.

Setiap karyawan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman GCG secara pribadi melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Utama atau Kepala SPI dalam hal terlapor bukan merupakan anggota Direksi. Apabila terlapor merupakan anggota Direksi, laporan ditujukan kepada Komisaris Utama.

Setiap laporan wajib disidik oleh tim investigasi yang dibentuk secara ad hoc oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama. Tim ini bekerja secara independen, dengan menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Meskipun demikian, perusahaan tetap melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja tim investigasi.

Conflict of Interests in Decisions on Survey Results

All personnel of BKL has to uphold at all time independency in decision-making, recommending, making decisions on survey results, and reporting. In the case conflict of interests occurs, the safety aspect and rules and regulations are the prime priority.

Conflict of Interests in Procurement

The Board of Commissioners, the Board of Directors, the Management, and employees are not allowed to participate in procurement activities that involve companies where they or their families have a certain stake or own a significant portion of shares, or have a certain financial interest.

Conflict of Interests in Side Activities

The Board of Commissioners, the Board of Directors, the Management, and the employees are not allowed to engage in side activities that may lower their capabilities in fulfilling their job duties. Engagement in side activities is allowed as long as it does not lower the independency and objectivity in decision-making. Requests for permission to conduct side activities have to be approved by the Board of Directors or an authorized officer.

Employee Share Ownership Program

BKL does not have an employee share ownership program.

Whistleblowing System

BKL has a whistleblowing system that was made official with the Decision of the Board of Directors No. DU.060C/LT.101/KI-14 of 5 February 2014 about Guidelines for Reporting Violations/Whistle Blowing System (WBS). The system has been developed with the principle of safeguarding the identity of the whistleblower in the work environment.

Every employee can make reports about possible violations of GCG Guidelines, personally through letters that are directed to the President Director or the ICU Head in the case the alleged person is not a Director. In the case that the alleged person is a Director, the report is aimed to the President Commissioner.

Every report must be followed up by an investigation team that has been formed on an ad hoc basis by the President Director or the President Commissioner. The team works independently and guards its integrity and accountability. Nevertheless, the company will still conduct monitoring and evaluation of the investigation team's performance.

Corporate Governance

Tim investigasi wajib menindaklanjuti setiap laporan yang dianggap sah, serta melaporkan perkembangan tindak lanjut laporan yang bersangkutan kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada anggota Direksi.

The investigation team must follow up every legitimate report, and report the progress of the follow up to the President Director, with a copy circulated to the members of the Board of Directors.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tumbuh Bersama
Pemangku Kepentingan

Growing with
the Stakeholders

BKI sadar sepenuhnya bahwa kelanjutan pertumbuhan usahanya dipengaruhi hubungan baik dengan para pemangku kepentingannya.

Corporate Social Responsibility



BKI is fully aware that the sustainability of its business development is influenced by its stakeholder relationships

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



BKI memiliki berbagai program untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Program tersebut dibagi ke dalam dua kelompok, namun dikembangkan atas dasar kebijakan yang sama, yaitu komitmen untuk tumbuh bersama lingkungan sosial dan lingkungan alam, serta menjaga hubungan dengan karyawan, konsumen, maupun masyarakat umum sebagai pemangku kepentingan perusahaan.

BKI has implements its corporate social program through several programs, which are divided into two gorups but developed with the same policy, namely the commitment to grow together with social and natural environments, as well as maintaining relations with employees, consumers, and also the general public as the company's stakeholders.

Corporate Social Responsibility

Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan

Sebagai perusahaan yang bergerak di lingkungan industri utamanya perkapalan dan pelayaran, namun mencakup juga industri pertambangan dan mineral, industri energi, industri kimia dasar, dan aneka industri, BKI sangat mementingkan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan.

BKI memastikan aset dan lokasi usaha, serta fasilitas terkait, telah memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja, serta pelestarian lingkungan, sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, BKI melengkapi pekerja dan menyediakan alat kerja, sarana dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh surveyor dan inspektor. BKI pun telah merumuskan dan mensosialisasikan manual kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan (*HSE Manual*).

Dana Pensiun

Bagi karyawan sebagai pemangku kepentingan internal, BKI telah menyediakan program dana pensiun.

Dana Pensiun BKI telah disahkan sebagai Dana Pensiun Manfaat Pasti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-049/KM.12/2006 dan telah diumumkan dalam Berita Acara RI No. 34 tanggal 15 September 2006.

Hingga akhir tahun 2014, jumlah peserta Dana Pensiun BKI mencapai 573 orang.

Health, Safety and Environment

As a company that is mainly involved in the shipbuilding and shipping industrial environment, but also in extraction industries, energy industries, chemical industry, and miscellaneous other industries, BKI upholds health, safety, and the environment, in accordance to prevailing rules and regulations.

BKI ensures that its assets and work locations, as well as the related facilities, comply with work health and safety rules regulations, environment protection, and also other prevailing rules and regulations.

Particularly, BKI equips its workers and provides work instruments, facilities and health and safety equipment to all of its surveyors and inspectors. BKI has also completed and socialized an HSE Manual.

Pension Fund

BKI provides pension fund programs for its employees and internal stakeholders.

The BKI Pension Fund has been approved as a Fixed Benefit Pension Fund by the Decision of the Minister of Finance No. Kep-049/KM.12/2006 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 34 of 15 September 2006.

Until year-end of 2014, the number of BKI Pension Fund's participant's reached 573.

Perkembangan Keanggotaan Dana Pensiun Manfaat Pasti BKI
Development of BKI Fixed Benefit Pension Fund Membership

Keanggotaan Membership	2013	2014
Anggota Aktif / Active Members	459	451
Anggota Pasif (Pensiunan) / Passive Members (Pensioners)	115	122
Jumlah /Total	574	573

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Adapun kondisi keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti BKI adalah sebagai berikut:

Furthermore, the financial condition of the BKI Fixed Benefit Pension Fund is as follows:

Tabel: Perkembangan Keuangan Dana Pensiun Manfaat Pasti BKI
Development of BKI Fixed Benefit Pension Fund Financials

Uraian Items	2013	2014
Aktiva / Assets		
a. Investasi / Investments	46.307	50.554
b. Aktiva Lancar Di Luar Investasi / Current Assets Other Than Investments	1.224	2.418
c. Aktiva Operasional / Operational Assets	250	149
Kewajiban / Liabilities	(192)	(64)
Jumlah Aktiva Bersih / Total Net Assets	47.589	53.057
Kewajiban Aktuaris / Actuarial Liabilities	(53.706)	(70.081)
Surplus (Defisit) / Surplus (Deficit)	(6.117)	(17.024)

Catatan / Note :

Kewajiban aktuaritas tahun 2014 adalah proyeksi yang dihitung pada saat perhitungan aktuaritas 2013 / the actuarial liabilities of 2014 are projected based on the 2013 actuarial calculations

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sebagai BUMN, BKI menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL/CSR) berdasarkan :

1. Keputusan Menteri BUMN No. Per-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan Keputusan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan pengusaha kecil dan Program Bina Lingkungan;
2. Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan pengusaha kecil dan Program Bina Lingkungan;
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dalam Keputusan Direksi No. DU.142/KP.903/KI-04 tanggal 27 Oktober 2004, DU.281/KP.903/KI-11 tanggal 30 Desember 2012, dan DU.086/KP.903/KI-14 tanggal 25 Februari 2014
4. RKAP PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2014.

Partnership and Community Development Programs

As an SOE, BKI conducts its Partnership and Community Development programs (PKBL/CSR) based on:

1. The Decision of the Minister of SOEs No. Per-20/MBU/2012 of 27 December 2012 replacing the Decision of the Minister of SOEs No. Per-05/MBU/2007 of 27 April 2007 on the Partnership Programs of SOEs with small enterprises and Community Development Programs;
2. The Circulating Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SE-433/MBU/2003 of 16 September 2003 on Guidelines for Implementing the Partnership Programs of SOEs with small enterprises and Community Development Programs;
3. The Technical Guidelines of the Partnership Program and the Community Development Program of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) as elaborated in the Decision of the Board of Directors No. DU.142/KP.903/KI-04 of 27 Oktober 2004, DU.281/KP.903/KI-11 of 30 Desember 2012, and DU.086/KP.903/KI-14 of 25 Februari 2014; and
4. The 2014 Annual Work Plan and Budget of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Corporate Social Responsibility

Program Kemitraan dikembangkan untuk mencapai tujuan:

1. Mengembangkan dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjaga tata hubungan yang mendorong kondisi saling menunjang antara BUMN, koperasi dan swasta, khususnya pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
2. Mendorong koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan usahanya secara lebih efektif dan lebih efisien, serta dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya dan masyarakat di sekitarnya.

Pada tahun 2014, Program Kemitraan memprioritaskan pembinaan kepada usaha kecil, baik perorangan maupun badan, serta Koperasi Unit Desa (KUD), terutama KUD Calon Mandiri.

Sumber dan Penggunaan Dana Program Kemitraan pada tahun 2014 secara ringkas adalah sebagai berikut :

The Partnership Program is developed with the aims of:

1. developing and fostering a healthy business climate and to uphold a network of relationships that promotes synergies between SOEs, cooperatives and private companies, particularly small-medium enterprises and cooperatives;
2. supporting cooperatives and small and medium enterprises as peoples' economic institutions that are able to conduct, enhance, and develop their businesses to become more effective and efficient, and are able to create higher added value and benefits for their members and the surrounding communities.

In 2014, the Partnership Program prioritized the advocacy of small enterprises, both individual and organizations, as well as Village-based Cooperatives (KUD), particularly KUD Calon Mandiri.

The 2014 Partnership Programs Sources of Funding and their Utilization are briefly stated as follows:

(dalam jutaan Rupiah / in million of Rupiah)

Uraian Item	Anggaran 2014 Budget	Realisasi 2014 Realization	%
Sumber Dana Kas /Funding Source: Cash			
Saldo Awal / Starting Balance	457	2.311	505,69
Bagian Laba / Share of Profit	2.000	-	
Pengembalian Pinjaman & Bunga/ Repayment of Loans & Interests	1.898	1.653	87,09
Jasa Giro / Giro services revenues	13	45	346,15
Anggaran Belum Teridentifikasi / Unidentified Budget	3	10	333,33
Jumlah Sumber Dana Kas / Total Cash Source of Funding	4.371	4.019	91,95
Penggunaan / Utilization			
Pemberian Pinjaman / Loan Disbursement	3.700	2.160	58,38
Dana Pembinaan / Development Funds	-	48	-
Biaya Operasional / Operational Costs	142	67	47,18
Jumlah Penggunaan / Total Utilization	3.842	2.275	59,21
Saldo Akhir Kas / Ending Balance	529	1.744	329,68

Adapun penyaluran pinjaman Dana Program Kemitraan pada tahun 2014 dilihat dari distribusi geografis dan dana pembinaan adalah sebagai berikut :

The geographical distribution of Partnership Program loans and development funds in 2014 were as follows

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(dalam jutaan Rupiah / in million of Rupiah)

Uraian Item	Anggaran 2014 Budget	Realisasi 2014 Realization
DKI Jakarta	850	475
DI Yogyakarta	420	535
Jawa Timur	450	205
Jawa Barat	850	235
Jawa Tengah	850	710
Dana Pembinaan / Development Fund	280	48
Jumlah / Total	3.700	2.208

dilihat dari bidang usaha dan dana pembinaan:

in terms of business sectors and development funds:

(dalam jutaan Rupiah / in million of Rupiah)

Jasa / Services	405
Peternakan	65
Perindustrian	320
Perikanan	0
Perdagangan	930
Pertanian	440
Dana Pembinaan / Development Fund	48
Jumlah / Total	2.208

Sementara itu pengelolaan Dana Bina Lingkungan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Furthermore, the fund management of Community Development in 2014 was as follows:

No.	Sumber Source	Anggaran 2014 2014 Budget	Realisasi 2014 2014 Realization
Dana Tersedia / Funds Available			
1	Saldo Awal / Starting Balance	441	496
2	Bagian Laba / Share of Profits	2.000	2.000
3	Jasa Giro / Giro Services Revenue	11	188
	Jumlah Dana Tersedia / Total Available Funds	2.452	2.684
Penggunaan Dana / Fund Utilization			
1	Bantuan Bencana Alam / Natural Disaster Aid	150	424
2	Bantuan Pendidikan dan Pelatihan / Education and Training Aid	300	315
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan / Healthcare Improvement Aid	200	62
4	Bantuan Prasarana-Sarana Umum / General Facilities Aid	300	52
5	Bantuan Sarana Ibadah / Religious Facilities Aid	350	428
6	Bantuan Pelestarian Alam / Environmental Conservation Aid	100	-
7	Pengentasan Kemiskinan / Poverty Alleviation	500	192
8	Biaya Lain-lain (Operasional) / Other Costs (Operational)	100	7
	Jumlah Penggunaan Dana / Total Fund Utilization	2.000	1.480
	Saldo Akhir / Ending Balance	452	1.204

Laporan Keuangan Financial Statement



PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2014 dan 2013

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	134
Laporan Auditor Independen	135-136
Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2014 dan 2013	137-138
Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	139
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	140
Laporan Arus Kas untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	141
Catatan atas Laporan Keuangan	142-174



PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) HEAD OFFICE

Address : Jl. Yos Sudarso No. 38 - 39 - 40, Tanjung Priok, JAKARTA - 14320, INDONESIA
Phone : (62 - 021) 4301017, 4301703, 4300993, Facsimile : (62 - 021) 43936175, 43901973
PO BOX : 1010/JKU
E-mail : ho@bki.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Rudyanto
Alamat Kantor : PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Jl. Yos Sudarso No. 38-39-40 Tanjung Priok, Jakarta – 14320
Alamat Domisili : Jl. Pancoran Timur II No. 2 C, Rt.005/Rw.002, Pancoran
No. Telepon : (021) 4301017
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Drs. Timbul Tambunan, MM
Alamat Kantor : PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Jl. Yos Sudarso No. 38-39-40 Tanjung Priok, Jakarta – 14320
Alamat Domisili : J. Tirta Perdana III Blok F/73, Rt:002/Rw.010, Jatikramat – Jatiasih
Nomor Telepon : (021) 4301017
Jabatan : Direktur Keuangan & Administrasi

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
2. Laporan keuangan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2015
Untuk dan atas nama Direksi,

Direktur Utama

Direktur Keuangan & Administrasi

Rudyanto

Timbul Tambunan



Husni, Mucharam & Rasidi
Registered Public Accountants

Nomor : LAI/GA/ASG/15002

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

Laporan atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggungjawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

HUSNI, MUCHARAM & RASIDI

Opini

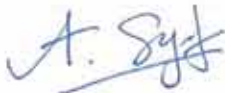
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan atas Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan pengendalian intern. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian intern adalah tanggung jawab Manajemen Perusahaan.

Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern, kami sampaikan secara terpisah dengan laporan kami nomor LAI/UU/ASG/15002 dan LAI/IC/ASG/15002 tanggal 25 Februari 2015.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi



Arry Syarif, CA., CPA.

Ijin Akuntan Publik : No. AP.0085

Ijin KAP : No. KEP-662/KM.17/1998

Jakarta, 25 Februari 2015

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)			
	Catatan	2014	2013
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3b, 4	173,581,209,834	106,935,791,089
Piutang usaha (Setelah dikurangi penyisihan sebesar tahun 2014 sebesar Rp26,092,514,920 dan tahun 2013 Rp16,832,832,433)	3c, 5, 24a	233,447,523,961	158,182,377,752
Tagihan bruto	3d, 3k, 6	39,156,752,429	2,604,988,348
Aset dimiliki untuk dijual (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar tahun 2014 Rp19,869,968,381 dan tahun 2013 Rp21,822,278,370)	3j, 8	296,619,845	296,619,856
Aset lancar lainnya	7	8,891,756,594	6,443,235,269
Jumlah aset lancar		455,373,862,663	274,463,012,314
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar tahun 2014 Rp65,430,292,027 dan tahun 2013 Rp56,973,931,542)	3g, 8	137,993,544,246	127,713,897,697
Aset pajak tangguhan	3l, 13e	2,971,980,640	2,678,802,121
Aset tidak lancar lainnya	9	853,572,102	604,073,260
Jumlah aset tidak lancar		141,819,096,988	130,996,773,078
JUMLAH ASET		597,192,959,651	405,459,785,392

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2014	2013
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	10, 24b	8,235,738,209	2,096,995,560
Utang lain-lain	11, 24b	17,106,798,086	10,709,948,100
Utang biaya	12, 24b	26,944,628,464	14,355,493,656
Utang pajak	13d, 24b	59,742,876,812	31,070,384,531
Utang bruto	14	9,051,415,530	4,610,232,563
Liabilitas jangka pendek lainnya	15, 24b	14,226,000	2,450,000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		121,095,683,101	62,845,504,410
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Provisi imbalan karyawan jangka panjang	3m, 16	16,817,194,855	14,016,170,291
Jumlah liabilitas jangka panjang		16,817,194,855	14,016,170,291
JUMLAH LIABILITAS		137,912,877,956	76,861,674,701
EKUITAS			
Modal saham			
Tahun 2014 modal dasar 600.000 saham dan tahun 2013 modal dasar 180.000 saham, masing-masing nilai nominal per lembar saham Rp1.000.000.			
Tahun 2014 modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 255.000 lembar saham dan tahun 2013 sebesar 45.000 lembar saham.			
	17, 25	255,000,000,000	45,000,000,000
Saldo laba	18, 25		
Saldo laba yang dicadangkan		56,412,145,284	177,249,593,141
Saldo laba yang belum dicadangkan		145,169,888,120	105,114,829,743
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		2,698,048,291	1,233,687,807
JUMLAH EKUITAS		459,280,081,695	328,598,110,691
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		597,192,959,651	405,459,785,392

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2014	2013
PENDAPATAN	3k, 19	756,660,228,022	555,197,173,704
BEBAN JASA	3k, 20	(167,792,040,336)	(103,573,736,103)
LABA KOTOR		588,868,187,686	451,623,437,601
BEBAN USAHA			
Beban pemasaran & Humas	21	7,661,683,022	6,493,605,531
Beban administrasi dan umum	22	386,515,751,930	308,964,664,217
		394,177,434,952	315,458,269,748
LABA USAHA		194,690,752,734	136,165,167,853
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN	23		
Pendapatan lain-lain		11,973,191,924	11,697,755,375
Beban lain-lain		(7,187,026,057)	(2,878,333,546)
Pendapatan lain-lain (bersih)		4,786,165,867	8,819,421,829
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		199,476,918,601	144,984,589,682
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Beban pajak kini	3l, 13b, 13e	(54,600,209,000)	(39,566,593,500)
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	3l, 13b, 13f	293,178,519	(303,166,439)
Jumlah Pajak Penghasilan		(54,307,030,481)	(39,869,759,939)
LABA BERSIH		145,169,888,120	105,114,829,743
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA SETELAH PAJAK			
- Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	23	1,464,360,484	1,233,687,807
Total Pendatan komprehensif		1,464,360,484	1,233,687,807
LABA KOMPREHENSIF		146,634,248,605	106,348,517,550

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Catatan	Modal Disetor	Saldo Laba		Pendapatan Komprehensif Lain	Jumlah Ekuitas
			Telah Dicadangkan	Belum Dicadangkan		
Saldo per 31 Desember 2012		45,000,000,000	119,927,106,309	67,438,219,802	-	232,365,326,111
Pembentukan cadangan umum		-	57,322,486,832	(57,322,486,832)	-	-
<u>Pembagian laba</u>						
- Dividen		-	-	(10,115,732,970)	-	(10,115,732,970)
Laba tahun berjalan	18	-	-	105,114,829,743	-	105,114,829,743
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing entitas luar negeri		-	-	-	1,233,687,807	1,233,687,807
Saldo per 31 Desember 2013		45,000,000,000	177,249,593,141	105,114,829,743	1,233,687,807	328,598,110,691
Pembentukan cadangan umum		-	89,162,552,143	(89,162,552,143)		-
Kapitalisasi cadangan umum ke Modal Disetor		210,000,000,000	(210,000,000,000)	-	-	-
<u>Pembagian laba</u>						
- Dividen	18	-	-	(15,952,277,600)	-	(15,952,277,600)
Laba tahun berjalan		-	-	145,169,888,120	-	145,169,888,120
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing entitas luar negeri		-	-	-	1,464,360,484	1,464,360,484
Saldo per 31 Desember 2014		255,000,000,000	56,412,145,284	145,169,888,121	2,698,048,291	459,280,081,695

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2014	2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan		657,343,356,270	575,051,514,666
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(481,852,035,588)	(476,543,515,765)
Kas yang diperoleh dari operasi		175,491,320,682	98,507,998,901
Penerimaan lain-lain		8,072,766,912	7,524,394,207
Pembayaran pajak penghasilan		(66,979,668,411)	(37,378,192,105)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		116,584,419,183	68,654,201,003
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian aset tetap	8	(36,180,975,345)	(16,466,258,726)
Penjualan aset tetap	8,23	3,464,559,125	-
Penambahan/(pengurangan) uang jaminan		729,693,382	(169,386,000)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(31,986,722,838)	(16,635,644,726)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran dividen	18	(15,952,277,600)	(10,115,732,970)
Pembayaran dana program kemitraan dan bina lingkungan	22	(2,000,000,000)	(3,389,668,900)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(17,952,277,600)	(13,505,401,870)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		66,645,418,745	38,513,154,407
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4	106,935,791,089	68,422,636,682
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		173,581,209,834	106,935,791,089

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

1. UMUM

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), selanjutnya disebut "Perusahaan" merupakan peralihan dari PN Biro Klasifikasi Indonesia yang didirikan tanggal 1 Juli 1964. Peralihan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1977. Akta pendirian Perusahaan dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 57 tahun 1977 tanggal 21 April 1977 yang diperbaiki dengan Akta Nomor 35 tanggal 19 Oktober 1978 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/345/1978 tanggal 7 November 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1979 tanggal 6 Februari 1979 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tahun 1999).

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan H. Umaman Mansjur, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut mengenai penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 45, dan perkembangan kebutuhan pengelolaan Perusahaan, perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, perubahan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-03102AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009.

Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1977 berubah menjadi PT (Persero) yang merupakan peralihan dari PN Biro Klasifikasi Indonesia yang didirikan tanggal 1 Juli 1964. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) bertugas untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang jasa klasifikasi, sertifikasi, konsultasi dan supervisi di bidang kelautan serta industri jasa pada umumnya, agar terjamin keselamatan jiwa dan benda dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas yang mandiri.

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a) Bidang Usaha Klasifikasi dan Registrasi Kapal, yaitu:

- Pemeriksaan kontruksi, pengawasan dan pengujian serta pencatatan sertifikasi klas dan registrasi kapal;
- Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
- Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
- Pengujian dan penerbitan sertifikasi kualitas juru las, inspektur las dan ahli las;
- Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi aktivitas statutoria yang mendapat otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia, maupun pemerintah negara lain;
- Bertindak sebagai agen dan/atau mewakili klasifikasi asing/konsultan asing; dan
- Melaksanakan sertifikasi sesuai standar Internasional.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)**b) Bidang Komersil (Konsultansi & Supervisi)**

- Konsultansi dan supervisi di bidang kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Penilaian, perencanaan, dan pengawasan dibidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Pengujian material dan komponen;
- Konsultansi teknik / engineering sesuai standar nasional internasional;
- Pelatihan keahlian teknik dan non teknik dibidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya;
- Kegiatan jasa rekayasa, jasa konstruksi dan jasa pemborongan non konstruksi dibidang instalasi minyak dan gas, panas bumi serta industri pertambangan pada umumnya.

- c) - Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk properti, perkantoran, apartemen, dan perhotelan.

Kantor Pusat PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berdomisili di Jakarta Jl Yos Sudarso No 38-40, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14320. Jumlah seluruh unit kerja yaitu Kantor Pusat dan cabang adalah berjumlah 40 unit kerja, yang terdiri dari 2 (dua) segmen usaha yaitu segmen Klasifikasi 18 unit kerja dan segmen Komersil berjumlah 21 unit kerja. Kantor Pusat dan unit produksi masing-masing segmen adalah sebagai berikut :

Unit Kerja Kantor Pusat di Jakarta.

Unit Kerja Kantor Cabang Segmen Klasifikasi sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Cabang Utama Klas Tanjung Priok | 10. Cabang Madya Klas Cilegon |
| 2. Cabang Utama Klas Batam | 11. Cabang Klas Pontianak |
| 3. Cabang Utama Klas Samarinda | 12. Cabang Klas Makassar |
| 4. Cabang Utama Klas Surabaya | 13. Cabang Klas Sorong |
| 5. Cabang Utama Klas Singapore | 14. Cabang Klas Jambi |
| 6. Cabang Madya Klas Palembang | 15. Cabang Klas Ambon |
| 7. Cabang Madya Klas Semarang | 16. Cabang Klas Bitung |
| 8. Cabang Madya Klas Belawan | 17. Cabang Klas Cirebon |
| 9. Cabang Madya Klas Banjarmasin | 18. Cabang Klas Pekanbaru |

Unit Kerja Kantor Cabang Segmen Komersil sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Unit (SBU) Infrastruktur & Jasa Umum | 12. Cabang Pratama Komersil Semarang |
| 2. Unit (SBU) Marine Jakarta | 13. Cabang Pratama Komersil Palembang |
| 3. Unit (SBU) Industri Jakarta | 14. Cabang Pratama Komersil Ambon |
| 4. Cabang Utama Komersil Batam | 15. Cabang Pratama Komersil Cirebon |
| 5. Cabang Utama Komersil Balikpapan | 16. Cabang Pratama Komersil Makassar |
| 6. Cabang Madya Komersil Surabaya | 17. Cabang Pratama Komersil Sorong |
| 7. Cabang Madya Komersil Pekanbaru | 18. Cabang Pratama Komersil Bitung |
| 8. Cabang Pratama Komersil Banjarmasin | 19. Cabang Pratama Komersil Cilegon |
| 9. Cabang Pratama Komersil Pontianak | 20. Cabang Pratama Komersil Cepu |
| 10. Cabang Pratama Komersil Jambi | 21. Cabang Pratama Komersil Cilacap |
| 11. Cabang Pratama Komersil Belawan | |

Bahwa kedudukan unit kerja di atas adalah tersebut dalam struktur organisasi sesuai Keputusan Direksi nomor : DU.058/LT.101/KI-14 tanggal 30 Januari 2014

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

2. DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE AUDIT DAN KARYAWAN**Dewan Komisaris**

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan mulai tanggal 11 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep- 322/MBU/2012 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	:	Machfud Sidik
Komisaris	:	Minto Widodo
Komisaris	:	Erwin Rosmali
Komisaris	:	Faisal Halimi

Terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-12/MBU/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan Nomor : SK-93/MBU/2014 tanggal 30 April 2014 menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama	:	Sukatno
Komisaris	:	Minto Widodo
Komisaris	:	Erwin Rosmali
Komisaris	:	Faisal Ahmad

Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KU-001/Dekom.101/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 adalah sebagai berikut :

Sekretaris Dewan Komisaris : Meriantie

Direksi

Dewan Direksi, yaitu Direktur Utama bertugas mulai 19 Desember 2013 berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor : SK-424/MBU/2013, Direktur Klasifikasi mulai tanggal 3 Agustus 2012 berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor : SK-284/MBU/2012 Direktur Komersil mulai tanggal 5 Maret 2013 berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor : SK-175/MBU/2013 dan Direktur Keuangan dan Administrasi berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor : SK-32/MBU/2014 tanggal 5 Pebruari 2014. Susunan Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	:	Rudiyanto
Direktur Keuangan & Administrasi	:	Timbul Tambunan
Direktur Klasifikasi	:	Iman Satria Utama
Direktur Komersil	:	Ibrahim Gause

Posisi Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk sementara dijabat oleh Direktur Komersil.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

2. DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE AUDIT DAN KARYAWAN (LANJUTAN)**Komite Audit & Komite Investasi****Komite Audit**

Susunan Komite Audit Perusahaan mulai tanggal 1 Oktober 2013 sesuai dengan SK Dewan Komisaris No.KU.006/Dekom.101/X/2013 adalah sebagai berikut:

Ketua : Minto Widodo
 Anggota : Trisyu Wimartono
 Anggota : Deni Sulistyo

Sedangkan susunan Komite Audit sebelumnya sampai dengan 1 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KU.005/Dekom.101/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 adalah sebagai berikut :

Ketua : Minto Widodo
 Anggota : Nur Sodik
 Anggota : Soedjasmanoor

Komite Investasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KU.003/Dekom.101/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan Nomor : SK.02/Dekom.BKI/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 telah dibentuk dan ditetapkan susunan Komite Investasi (Pengembangan Usaha) yang terdiri dari :

Ketua : Faisal Ahmad
 Anggota : Sahat Lumban Tobing
 Anggota : Win Andriansyah

Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, jumlah karyawan Perusahaan adalah 1.016 dan 892 orang dengan rincian sebagai berikut:

	Per 31 Des 2014			Per 31 Des 2013		
	Tetap	Tidak Tetap	Jumlah	Tetap	Tidak Tetap	Jumlah
- Operasional	456	206	662	429	154	583
- Suporting	113	241	354	119	190	309
Jumlah	569	447	1016	548	344	892

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi terpenting yang digunakan Perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, yaitu yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan Keuangan disajikan dengan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*), kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung (*direct method*) dan dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari uang kas, uang yang ada di bank serta deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan uang jaminan atas penerbitan bank garansi berdurasi jangka pendek. Sebagai Aset Keuangan, Kas dan Setara kas dicatat pada tanggal perolehannya pada nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi.

c. Piutang Usaha

Piutang Usaha disajikan sebesar jumlah yang diperkirakan dapat direalisasi yaitu jumlah tercatat awal dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang Usaha mencerminkan jumlah yang telah ditagihkan kepada pelanggan atas jasa yang telah dilakukan. Adapun jumlah yang ditagihkan mengacu pada termin kontrak yang telah disepakati dengan pelanggan.

Penyisihan Piutang tak tertagih dihitung secara kolektif dengan menggunakan *roll - rate model*. Adapun parameter *probability of default* dan *loss given default* yang dipergunakan dalam model tersebut diperoleh dari hasil survei data empiris Perusahaan selama 3 sampai dengan 5 tahun terakhir.

d. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja mencerminkan pekerjaan jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar biaya jasa yang terjadi, ditambah laba (rugi) yang diakui, dikurangi dengan termin penagihan yang telah diajukan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Yang Berelasi**

Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi berdasarkan PSAK 7 (Revisi 2010) menyatakan bahwa karyawan kunci adalah termasuk pihak-pihak yang berelasi, pada paragraph 16 mensyaratkan pengungkapan Kompensasi terhadap manajemen kunci. Berdasarkan definisi pada paragraf 09 menyatakan sebagai berikut: "Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas".

Dengan ketaatan kepada PSAK tersebut, pengungkapan kompensasi terhadap manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Jumlah gaji & tunjangan untuk beban Komisaris dan Direksi:

2014	2013
RP12.025.419.822	Rp12,341,781,192

Definisi terkait lainnya adalah "Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah". Pengungkapan transaksi dengan BUMN berupa rekening bank dan deposito, piutang dan utang kepada BUMN adalah sebagaimana disajikan pada butir 4, 5 dan 31 dalam laporan ini.

f. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing yang terjadi sepanjang tahun dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi nilai tukar yang diakibatkan penjabaran dikreditkan atau dibebankan ke perhitungan laba rugi periode berjalan.

Kurs tengah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Dolar Amerika (USD)	12,474	12,189
Dolar Singapura (SGD)	9,406	9,628
Euro	15,044	16,822

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**g. Aset Tetap**

Perusahaan telah menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011) mengenai "Aset Tetap" dengan memilih menggunakan model biaya dalam mengukur aset tetapnya sebagaimana tersebut dalam paragraf 30. Sesuai dengan metode tersebut, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada). Aset tetap kecuali hak atas tanah, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double declining method), kecuali bangunan/ gedung disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) sesuai dengan tarif penyusutan sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Tetap</u>	<u>Umur Manfaat (tahun)</u>
Bangunan	20 - 40 tahun
Kendaraan bermotor roda 2	4 - 5 tahun
Kendaraan bermotor roda 4	5 - 8 tahun
Inventaris	4 - 16 tahun

Biaya Perolehan Aset Tetap setelah dikurangi estimasi nilai residunya disusutkan selama estimasi umur manfaat Aset Tetap yang bersangkutan. Setiap akhir periode pelaporan keuangan dilakukan kaji ulang terhadap estimasi umur manfaat dan nilai residu aset tetap. Penyesuaian beban penyusutan sebagai hasil kaji ulang tersebut diperlakukan secara prospektif.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran, dan penambahan dalam jumlah signifikan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PSAK No. 16 (Revisi 2011) tentang aset tetap, dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap yang bersangkutan tercermin dalam operasi tahun berjalan.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

h. Aset Tak Berwujud

Pengungkapan aset tak berwujud adalah berdasarkan PSAK 19 (revisi 2010) dalam paragraf 08 didefinisikan bahwa Aset tak berwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Jika piranti lunak bukan merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya, maka piranti lunak komputer diperlakukan sebagai aset tak berwujud, namun jika piranti lunak merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya maka diperlakukan sebagai aset tetap.

i. Aset Dalam Pembangunan

Aset dalam pembangunan meliputi bangunan dan prasarana lainnya, yang dinyatakan berdasarkan biaya pembangunan, biaya pegawai langsung, biaya tidak langsung dalam pembangunan tersebut dan biaya-biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan. Akumulasi biaya aset dalam pembangunan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan dan kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan selesai dan aset tersebut siap untuk dipergunakan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**j. Aset Dimiliki Untuk Dijual**

Aset dimiliki untuk dijual merupakan aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi dan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara untuk dijual. Aset ini dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Jika nilai buku aset belum mencapai Rp 1, maka penyusutan untuk tahun bersangkutan hanya selama beberapa bulan sampai diterbitkannya Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap yang bersangkutan tercermin dalam operasi tahun berjalan.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan Beban Jasa secara bertahap sesuai tahap kemajuan yang dicapai pada tiap-tiap akhir bulan. Akun Tagihan Bruto di Laporan Posisi Keuangan mencerminkan pekerjaan yang masih dalam tahap penyelesaian pada akhir periode pelaporan keuangan.

Biaya operasi yang digolongkan sebagai beban jasa adalah meliputi biaya-biaya langsung dan overhead yang dapat diatribusikan langsung atau dialokasikan secara sistematis kepada tiap-tiap kontrak. Biaya-biaya yang tidak memenuhi kriteria biaya jasa digolongkan sebagai beban usaha.

l. Perpajakan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

Pajak penghasilan tangguhan disajikan dengan jumlah penuh dengan menggunakan metode kewajiban. Pajak penghasilan tangguhan timbul akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan kewajiban atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku digunakan dalam menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah diterima.

m. Imbalan Jangka Panjang Bagi Karyawan

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan jangka panjang bagi karyawan yaitu meliputi Imbalan Pensiun, Imbalan Balas Jasa dan Pengabdian, serta Imbalan Cuti Besar. Pengakuan dan pengukuran beban serta pembentukan provisi sebagai konsekuensi dari ketiga program imbalan tersebut dihitung secara aktuarial dengan menggunakan metode dan asumsi sebagai berikut :

1. Metode aktuarial yang dipergunakan : Projected Unit Credit,
2. Tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini manfaat imbalan mengacu pada tingkat imbal hasil surat utang negara yang berdurasi relatif sama dengan rata-rata sisa masa kerja karyawan atau rata-rata sisa jatuh tempo pembayaran manfaat kepada karyawan,
3. Tingkat kenaikan gaji dasar mengacu pada rata-rata kenaikan gaji dasar pada periode-periode sebelumnya,
4. Laba / rugi aktuarial yang terjadi tidak diakui sekaligus, melainkan diamortisasi selama rata-rata sisa masa kerja karyawan untuk jumlah yang melebihi 10 % dari asset program atau 10 % dari nilai kini liabilitas,
5. Beban jasa lalu yang sudah vested diakui sekaligus, sedangkan untuk yang belum vested diamortisasi selama sisa periode sampai dengan menjadi vested.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**n. Aset keuangan dan kewajiban keuangan**

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012, kebijakan akuntansi atas aset dan kewajiban keuangan adalah sebagai berikut:

1. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut (i) aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman dan piutang, (iii) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

(i) Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui di laporan laba atau rugi adalah aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan. Sebuah aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

(ii) Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak terpengaruh oleh pasar aktif. Pinjaman dan piutang awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman dan piutang terdiri dari piutang usaha dan piutang lainnya.

2. Kewajiban keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban keuangan dalam kategori (i) kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi dan (ii) kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(i) Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi

Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi adalah kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan. Sebuah kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan kewajiban keuangan yang dimaksud termasuk dalam "laba/rugi selisih kurs".

(ii) Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah hutang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, dan obligasi.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**n. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)****3. Estimasi nilai wajar**

Perusahaan menggunakan harga pasar untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan yang aktif diperdagangkan di pasar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Perusahaan menggunakan metode diskonto arus kas dengan menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada kondisi pasar pada tanggal neraca yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

o. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode tahun berjalan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

4. KAS DAN SETARA KAS

	2014	2013
Kas		
Rupiah	1,054,253,230	443,699,632
SGD (2014: SGD 5,03; 2013: SGD 1.426,76)	47,275	13,736,845
	1.054.300.505	457.436.477
Bank		
<u>Rupiah:</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43,645,042,410	30,255,864,120
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11,369,470,864	7,282,376,961
PT Bank BRI	-	1,721,000
PT Bank Jabar Banten	209,203,637	592,128,623
Jumlah Valuta Rupiah	55,223,716,911	38,132,090,704
<u>Mata uang asing:</u>		
Dolar Amerika:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014: USD2.142.132,6; 2013: USD394.409,81)	26,720,962,178	4,807,461,163
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2014:USD189.718,8; 2013: USD72.008,08)	2,366,552,808	877,706,474
Dolar Singapura:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2014: SGD631.147; 2013: SGD150.654,11)	8,717,409,841	1,450,497,771
Overseas Express Bank Singapura (2014: SGD248.693,20; 2013: SGD707.645,35)	2,339,206,521	6,813,209,430
	40,144,131,348	13,948,874,838
Jumlah Bank	95,367,848,259	52,080,965,542

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**Deposito berjangka**

<u>Rupiah:</u>	2014	2013
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Syariah	9,000,000,000	13,000,000,000
PT Bank BNI	2,000,000,000	3,000,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Syariah	9,000,000,000	13,000,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21,000,000,000	2,000,000,000
PT Bank Bukopin	5,000,000,000	-
PT Bank Jabar Banten	19,000,000,000	16,000,000,000
PT Bank BRI	-	3,000,000,000
PT Bank BRI Syariah	12,000,000,000	4,000,000,000
Jumlah Deposito	77,000,000,000	54,000,000,000
Money in transit	-	-
Jaminan Bank Garansi Jangka Pendek	159,061,070	397,389,070
Jumlah Kas dan Setara Kas	173,581,209,834	106,935,791,089

Money in transit adalah transfer uang dari Unit produksi ke Kantor Pusat yang belum diterima atau masih dalam perjalanan.

Jaminan Bank garansi jangka pendek adalah uang di bank Unit produksi yang sementara tidak dapat digunakan karena dijadikan jaminan garansi bank dalam durasi jangka pendek.

Deposito berjangka :

Tingkat suku bunga	4,50% - 9,50%	4,5% - 7,00%
Jangka waktu	1 - 3 bulan	1 - 3 bulan

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

5. PIUTANG USAHA

Saldo piutang usaha dirinci berdasarkan jenis usaha jasa dan penyisihan piutang sebagai berikut

	2014	2013
Piutang Jasa Klasifikasi	138,822,463,562	108,651,678,916
Piutang Jasa Komersil	120,717,575,319	66,363,531,269
Sub Jumlah	259,540,038,881	175,015,210,185
Dikurangi penyisihan piutang	(26,092,514,920)	(16,832,832,433)
Jumlah bersih	233,447,523,961	158,182,377,752

Rincian piutang berdasarkan umurnya adalah sebagai berikut:

	2014	2013
1 sampai dengan 12 bulan	233,624,557,694	155,516,935,394
13 sampai dengan 24 bulan	12,416,621,163	11,153,446,555
25 sampai dengan 36 bulan	6,098,219,117	1,642,146,500
Di atas 36 bulan	7,400,640,907	6,702,681,736
Jumlah	259,540,038,881	175,015,210,185

Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Sesuai dengan PSAK tersebut, Perusahaan telah melakukan penilaian kecukupan penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, pada tanggal 31 Desember 2014 Perusahaan menambah penyisihan piutang usaha sebesar Rp9,259,682,487, sehingga saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2014 berjumlah Rp26,092,514,920. Tambahan penyisihan tersebut seluruhnya dibebankan pada tahun 2014. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan yang telah dibentuk cukup memadai untuk mengantisipasi kerugian piutang tak tertagih.

Ikhtisar mutasi saldo penyisihan piutang usaha per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Saldo awal tahun	16,832,832,433	9,389,661,713
Penyisihan yang dibentuk	9,259,682,487	7,443,170,720
Saldo akhir tahun	26,092,514,920	16,832,832,433

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

6. TAGIHAN BRUTO

	2014	2013
Biaya Jasa (produksi langsung) yang telah terjadi	20,445,776,625	2,082,748,469
Laba (Rugi) Kotor yang diakui	18,710,975,804	522,239,879
Diakui dalam Tagihan Bruto	39,156,752,429	2,604,988,348

Seluruh saldo tagihan bruto di atas mencerminkan nilai pekerjaan segmen Komersil dan Klas yang per 31 Desember 2014 dan 2013 masih dalam tahap penyelesaian dan belum dilakukan penagihan termin.

7. ASET LANCAR LAINNYA

	2014	2013
Pendapatan bunga deposito yang akan diterima	276,642,923	143,313,536
Piutang karyawan	206,974,133	1,088,577,770
Uang muka pembelian barang & jasa	1,244,957,543	1,242,351,040
Pajak dibayar dimuka	3,697,529,098	2,266,861,999
Asuransi	620,064,650	1,100,746,592
Tunjangan perumahan	4,400,000	282,018,295
Survey klasifikasi	120,726,200	137,203,260
Sewa	2,656,778,415	116,249,995
Pemeliharaan kendaraan	57,479,613	55,490,352
Lain-lain	6,204,019	10,422,430
Jumlah	8,891,756,594	6,443,235,269

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

8. ASET TETAP, ASET DALAM PEMBANGUNAN DAN ASET TERSEDIA UNTUK DIJUAL**31 Desember 2014**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai perolehan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
- Tanah	14,622,366,818	-	-	-	14,622,366,818
- Bangunan	81,589,875,765	2,169,388,161	1,835,425,980	603,250,000	82,527,087,946
- Kendaraan bermotor	22,013,281,084	1,815,370,636	5,500,000	(2,694,805,000)	21,128,346,720
- Inventaris gol I	30,787,445,974	5,450,606,751	993,132,990	-	35,244,919,735
- Inventaris gol II	8,886,105,944	1,415,651,881	1,047,897,347	-	9,253,860,478
- Inventaris gol III	25,314,716,133	3,708,525,716	136,779,621	-	28,886,462,228
- Aset dalam pembangunan	1,474,037,521	10,890,004,827	-	(603,250,000)	11,760,792,348
Jumlah aset tetap	184,687,829,239	25,449,547,972	4,018,735,938	(2,694,805,000)	203,423,836,273
Aset tersedia dijual	22,118,898,226	-	4,647,115,000	2,694,805,000	20,166,588,226
Nilai Perolehan	206,806,727,465	25,449,547,972	8,665,850,938	-	223,590,424,499

31 Desember 2014

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
- Bangunan	12,033,201,428	2,733,753,284	1,811,022,747	-	12,955,931,965
- Kendaraan bermotor	9,634,404,768	2,704,977,271	5,500,000	(1,911,655,397)	10,422,226,642
- Inventaris gol I	19,704,089,815	6,161,871,726	993,101,547	-	24,872,859,994
- Inventaris gol II	6,554,458,848	637,903,894	1,029,258,099	-	6,163,104,643
- Inventaris gol III	9,047,776,683	2,049,911,314	81,519,214	-	11,016,168,783
Jumlah	56,973,931,542	14,288,417,489	3,920,401,606	(1,911,655,397)	65,430,292,027
Aset tersedia untuk dijual	21,822,278,370	-	3,863,965,386	1,911,655,397	19,869,968,381
	78,796,209,912	14,288,417,489	7,784,366,992	-	85,300,260,408
Nilai Buku Aset Tetap					137,993,544,246
Nilai Buku Aset tersedia untuk dijual					296,619,845

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

8. ASET TETAP, ASET DALAM PEMBANGUNAN DAN ASET TERSEDIA UNTUK DIJUAL (lanjutan)

	31 Desember 2013				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai perolehan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
- Tanah	14,252,366,818	370,000,000	-	-	14,622,366,818
- Bangunan	37,554,949,888	970,095,950	-	43,064,829,927	81,589,875,765
- Kendaraan bermotor	34,967,579,085	561,085,400	-	(13,515,383,401)	22,013,281,084
- Inventaris gol I	22,931,322,862	11,774,667,181	-	(3,918,544,069)	30,787,445,974
- Inventaris gol II	11,037,007,017	370,360,058	-	(2,521,261,131)	8,886,105,944
- Inventaris gol III	24,996,674,828	2,481,750,930	-	(2,163,709,625)	25,314,716,133
- Aset dalam pembangunan	38,989,720,750	5,549,146,698	-	(43,064,829,927)	1,474,037,521
Jumlah aset tetap	184,729,621,248	22,077,106,217	-	(22,118,898,226)	184,687,829,239
Aset tersedia untuk dijual		-	-	22,118,898,226	22,118,898,226
Nilai Perolehan	184,729,621,248	22,077,106,217	-	-	206,806,727,465

	31 Desember 2013				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
- Bangunan	10,280,938,458	1,752,262,970	-	-	12,033,201,428
- Kendaraan bermotor	22,489,920,809	659,867,272	-	(13,515,383,313)	9,634,404,768
- Inventaris gol I	19,727,228,699	3,891,669,855	-	(3,914,808,739)	19,704,089,815
- Inventaris gol II	8,324,924,173	711,360,531	-	(2,481,825,856)	6,554,458,848
- Inventaris gol III	8,870,583,447	2,087,453,698	-	(1,910,260,462)	9,047,776,683
Jumlah	69,693,595,586	9,102,614,326	-	(21,822,278,370)	56,973,931,542
Aset tersedia untuk dijual	-	-	-	21,822,278,370	21,822,278,370
	69,693,595,586	9,102,614,327	-	-	78,796,209,912
Nilai Buku Aset Tetap					127,713,897,697
Nilai Buku Aset tersedia untuk dijual					296,619,856

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

8. ASET TETAP, ASET DALAM PEMBANGUNAN DAN ASET TERSEDIA UNTUK DIJUAL (lanjutan)

Aset tersedia untuk dijual adalah berdasarkan surat Dewan Komisaris no. A.013/DK.201/V/KI-13 tanggal 22 Mei 2013 perihal Persetujuan Penghapusbukuan Aset yang mengacu pada Keputusan RUPS PT. BKI (Persero) tanggal 4 Juni 2013 tentang Pengesahan RKAP tahun buku 2013 butir 5, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap milik BUMN khususnya pasal 3 dan pasal 14.

Tata Cara pelaksanaan penjualan Aset dimaksud ditetapkan dalam SK Direksi No. DU.044/KP.008/KI-14 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penetapan Nilai Harga Jual Minimum dan Tata Cara Penjualan & Penghapusbukuan Aset Tetap sesuai Surat Dewan Komisaris tentang Persetujuan Penghapusan Aset No.A.013/DK.201/V/KI-13 tanggal 22 Mei 2013.

Aset tersedia untuk dijual :

Jenis	Nilai Pembelian	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
- Kendaraan Roda Empat	11,563,073,401	11,563,073,324	77
- Inventaris Lainnya	8,603,514,825	8,306,895,057	296,619,768
	20,166,588,226	19,869,968,381	296,619,845

Seluruh Biaya Penyusutan dibebankan sebagai Beban Administrasi dan Umum.

Ikhtisar perubahan saldo Aset Dalam Pelaksanaan selama tahun 2014 dan tahun 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

	2014	2013
Saldo awal	1,474,037,521	38,989,720,750
Penambahan	10,890,004,827	5,549,146,698
Reklasifikasi ke aset bangunan	(603,250,000)	(43,064,829,927)
Per 31 Desember	11,760,792,348	1,474,037,521

Rincian aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut;

	2014	2013
Kantor Pusat	9,047,439,820	-
Cabang Utama Komersil Balikpapan	1,474,037,521	1,474,037,521
Kantor cabang Klas Ambon	103,265,000	-
Kantor cabang Klas Bitung	198,000,000	-
Kantor cabang Klas Pontianak	938,050,007	-
Jumlah	11,760,792,348	1,474,037,521

Sebagian aset tetap perusahaan telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk menutupi segala risiko yang mungkin timbul.

Manajemen perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai Aset tetap.

9. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	2014	2013
Jaminan Sewa	542,084,797	354,872,675
Jaminan pelaksanaan peserta tender	114,750,000	-
Nilai hak pakai atas tanah	262,316,405	262,316,405
dikurangi : akumulasi amortisasi	(65,579,100)	(13,115,820)
	196,737,305	249,200,585
	853,572,102	604,073,260

Hak pemakaian atas tanah di atas adalah milik PT Pelabuhan Indonesia III yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk masa sampai dengan 2018.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

10. UTANG USAHA

Akun ini merupakan kewajiban Perusahaan atas bagian kerjasama kepada partner asing maupun dalam negeri yang pembayarannya dilakukan secara periodik. Saldo hutang usaha per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2014	2013
American Bureau of Shipping (ABS)	-	2,096,995,560
PT Denvegra (DNV-GL)	8,235,738,209	-
Jumlah	8,235,738,209	2,096,995,560

11. UTANG LAIN-LAIN

	2014	2013
Wearnes Automotive, Pte. Ltd.	724,262,000	856,322,500
Pratita Prama Nugraha, PT	3,702,508,069	148,147,840
Aplika Nusa Lintasartha, PT	-	144,820,500
Jamsostek, PT (Persero)	2,122,437	178,900
Monas Adi Karya, PT	-	63,570,850
Neo Dunia Persada, PT	11,100,000	14,900,000
Binaman Utama, PT	-	543,312,000
Tunas Auto Graha, PT	-	165,802,304
Gita Menata Jaya, PT	-	1,560,121,177
Limawira Wisesa, PT	-	101,000,000
Telekomunikasi Indonesia, PT	4,976,000,000	4,976,000,000
Inet Global Indonesia, PT	-	232,000,000
Permata Sejahtera Buana, PT	-	208,000,000
Terakom Internasional, PT	-	175,700,000
Dewa Daru Aditech, PT	-	1,030,165,000
Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, PT	-	108,000,000
Xeloxindo Grafika, CV	-	234,700,000
Global Solution, PT	2,786,909,820	-
Graha Technosoft, PT	1,726,788,516	-
Jasa Konstruksi Raya, CV	716,625,000	-
DNV GL	461,538,000	-
Dunia Saftindo, PT	288,000,000	-
Setra Sari, PT	281,096,000	-
Koperasi Pegawai BKI	240,705,799	-
Kharisma, PT	218,933,000	-
Walton Empire, PTE Ltd	131,684,000	-
Asuransi Jasindo, PT	114,404,343	-
Asosiasi Independen Surveyor	105,000,000	-
Pratama Citra Kreasi, PT	94,325,000	-
Lain-lain (dibawah Rp50 juta sebanyak : - tahun 2014 : 19 kreditur; tahun 2013 : 14 kreditur)	524,796,102	147,207,029
Jumlah	17,106,798,086	10,709,948,100

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

12. UTANG BIAYA

	2014	2013
Beban Personel	19,891,063,672	11,425,256,062
Beban Direksi dan Komisaris	3,061,336,301	2,507,792,042
Beban Produksi Komersil	3,539,997,782	83,518,645
Beban Pengembangan Operasi	42,854,305	210,624,757
Beban Pemasaran	140,083,804	476,900
Beban Pemeliharaan	259,562,500	2,059,500
Perencanaan & Perijinan Bangunan	-	125,765,750
Beban Lainnya	9,730,100	-
Jumlah	26,944,628,464	14,355,493,656

Beban yang masih harus dibayar atas beban Personel dan beban Direksi dan Komisaris terdiri atas pembebanan atas insentif jasa produksi karyawan dan tantiem Direksi dan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

13. PERPAJAKAN**a. Pajak Dibayar Dimuka**

	2014	2013
Saldo Pajak (PPN) Masukan dapat dikreditkan	3,697,529,098	2,266,861,999
Jumlah	3,697,529,098	2,266,861,999

b. Taksiran Pajak Penghasilan

	2014	2013
Pajak kini	(54,600,209,000)	(39,566,593,500)
Penghasilan/(beban) pajak tangguhan	293,178,519	(303,166,439)
Jumlah	(54,307,030,481)	(39,869,759,939)

c. Beban Pajak atas pendapatan komprehensif lain

	2014	2013
Pendapatan komprehensif atas laba kurs valuta asing	1,952,479,485	1,644,916,807
Beban pajak 25%	(488,119,000)	(411,229,000)
Jumlah	1,464,360,485	1,233,687,807

d. Utang Pajak

	2014	2013
Pajak Penghasilan Pasal 21 Wapu	32,705,870,250	15,123,842,682
Pajak Penghasilan Pasal 23 Wapu	599,140,734	99,187,693
Pajak Penghasilan Pasal 25	3,591,000,000	1,289,000,000
Pajak Penghasilan Pasal 29	4,810,204,387	2,778,349,473
Pajak Penghasilan Pasal 26	70,441,150	47,664,000
PPh Final	7,714,999	2,199,999
PPN masukan - Wapu	8,662,069,664	1,231,096,124
Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran)	9,296,435,628	10,499,044,560
Jumlah	59,742,876,812	31,070,384,531

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)**e. Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Laba sebelum pajak	199,476,918,601	144,984,589,682
<u>Beda tetap:</u>		
Pendapatan jasa giro	(652,572,870)	(272,817,503)
Pendapatan bunga deposito	(3,654,516,903)	(2,714,615,891)
Pengembangan perusahaan	894,500,000	820,000,000
Biaya perolehan proyek	8,730,300,000	8,405,050,000
Rekreasi dan olahraga	142,000,000	136,000,000
Koreksi beban pendapatan tahun lalu	44,807,150	447,013,548
Listrik, air, telepon (rumah dinas)	96,440,000	87,210,000
Cinderamata	67,500,000	64,000,000
Sumbangan dan biaya duka	124,034,400	79,440,000
	<u>205,269,410,378</u>	<u>152,035,869,836</u>
<u>Beda waktu:</u>		
Penyisihan piutang	9,259,682,487	7,443,170,720
Provisi Imbalan Kerja Jangka Panjang Karyawan	2,807,124,564	2,408,465,385
Penyusutan aset	1,064,618,572	(3,621,131,140)
Taksiran laba kena pajak bersih tahun berjalan	<u>218,400,836,001</u>	<u>158,266,374,801</u>
Taksiran laba fiskal dibulatkan	<u>218,400,836,000</u>	<u>158,266,374,000</u>
Taksiran pajak penghasilan badan (25%)	54,600,209,000	39,566,593,500
Pajak atas pendapatan komprehensif lainnya	488,119,000	411,229,000
<u>Kredit pajak:</u>		
Pajak Penghasilan pasal 23	5,452,227,123	4,919,121,086
Pajak Penghasilan pasal 24 Luar Negeri	1,733,896,490	1,344,351,941
Pajak Penghasilan pasal 25	43,092,000,000	30,936,000,000
Jumlah kredit pajak	<u>50,278,123,613</u>	<u>37,199,473,027</u>
Pajak penghasilan yang harus dibayar	4,810,204,387	2,778,349,473
Kompensasi kelebihan pajak tahun lalu (PPh pasal 28A)	-	-
Pajak Penghasilan Badan Terhutang	4,810,204,387	2,778,349,473
per 31 Desember 2014 dan 2013		

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)**f. Aset Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2014	Manfaat/(Beban) Pajak Tangguhan	31 Desember 2014
Kewajiban manfaat karyawan	3,504,042,573	700,256,141	4,204,298,714
Penyisihan piutang ragu-ragu	673,232,265	(673,232,265)	-
Penyusutan aset	(1,498,472,717)	266,154,643	(1,232,318,074)
	2,678,802,121	293,178,519	2,971,980,640
	1 Januari 2013	Manfaat/(Beban) Pajak Tangguhan	31 Desember 2013
Kewajiban manfaat karyawan	2,901,926,227	602,116,346	3,504,042,573
Penyisihan piutang ragu-ragu	673,232,265	-	673,232,265
Penyusutan aset	(593,189,932)	(905,282,785)	(1,498,472,717)
	2,981,968,560	(303,166,439)	2,678,802,121

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

14. UTANG BRUTO

	2014	2013
Bidang klasifikasi	5,077,494,912	2,883,052,880
Bidang Komersil	3,973,920,618	1,727,179,683
Jumlah	9,051,415,530	4,610,232,563

Utang Bruto untuk bidang klasifikasi dan bidang komersil adalah saldo uang muka survey yang diterima dari perusahaan pelayaran/rekanan yang akan diperhitungkan dengan invoice terbit yaitu pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

15. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

Akun ini merupakan iuran pegawai kepada DPLK BNI dan Dana Pensiun BKI serta kontribusi Perusahaan yang belum disetor, yaitu sebagai berikut:

	2014	2013
DPLK BNI	1,550,000	2,450,000
Uang muka lainnya	12,676,000	-
Jumlah	14,226,000	2,450,000

16. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN

	2014	2013
Provisi Imbalan Pensiun	6,704,312,366	4,556,853,648
Provisi Imbalan Balas Jasa & Pengabdian	9,088,032,188	8,373,611,581
Provisi Imbalan Cuti Besar	1,011,835,544	1,075,874,998
Provisi iuran program DPLK	13,014,757	9,830,064
Jumlah	16,817,194,855	14,016,170,291

a. Imbalan Pensiun

Manfaat Pensiun diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lainnya yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Besarnya manfaat pensiun yang diberikan ditentukan oleh masa kerja karyawan dan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun terakhir (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

Pendanaan program pensiun ini dibentuk setiap bulan dari iuran karyawan sebesar 6,00% dan iuran yang ditanggung Perseroan sebesar 15,40% dari gaji dasar karyawan.

Pengelolaan dana program pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun PT Biro Klasifikasi Indonesia. Adapun peraturan dana pensiunnya yang terakhir kali ditetapkan oleh Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. B.0038D/KP903/KI-05 tanggal 01 Januari 2005 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-049/KM.12/2006 tanggal 03 Agustus 2006.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2014 dan 2013:

	2014	2013
Aset Program	53,056,979,562	47,607,103,690
Nilai Tunai Manfaat Pensiun	(89,828,247,732)	(66,240,926,464)
Surplus (defisit) Pendanaan	(36,771,268,170)	(18,633,822,774)
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui	27,502,490,905	29,809,746,854
Laba/Rugi Aktuarial belum diakui	2,564,464,899	(15,732,777,728)
Biaya dibayar dimuka (Provisi) Pensiun	(6,704,312,366)	(4,556,853,648)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

16. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)

Rekonsiliasi perubahan saldo Provisi Imbalan Pensiun selama tahun 2014 dan 2013:

	2014	2013
Saldo awal tahun	4,556,853,648	3,152,034,512
Beban pensiun tahun berjalan	7,260,864,501	5,608,049,893
Kontribusi iuran ke Dana Pensiun	(5,113,405,783)	(4,203,230,757)
Saldo akhir tahun	6,704,312,366	4,556,853,648

Adapun beban yang diakui pada tahun 2014 dan 2013 terdiri dari komponen sebagai berikut:

	2014	2013
Beban jasa kini	4,569,435,943	2,818,160,651
Beban bunga	5,708,888,246	5,175,551,477
-/- Imbalan Hasil investasi	(4,760,710,369)	(4,692,918,184)
Beban amortisasi Jasa Lalu	2,307,255,949	2,307,255,949
Amortisasi Laba/Rugi Aktuaria	(564,005,268)	-
Beban yang diakui	7,260,864,501	5,608,049,893

Komposisi Aset Program Pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun PT Biro Klasifikasi Indonesia selama tahun 2014 dan 2013 terdiri dari:

	2014	2013
a. Obligasi, Sukuk, Surat Utang Negara	56 %	56 %
b. Deposito Berjangka	24 %	24 %
c. Saham, Reksadana, Penempatan	13 %	13 %
d. Properti	7 %	7 %
Jumlah	100 %	100 %

Pengalaman Penyesuaian pada Liabilitas dan Aset Program dalam tahun 2014 dan 2013:

a. Pengalaman Penyesuaian Atas Aset	(1,615,405,440)	(5,898,319,261)
Presentase	3.00%	12.40%
b. Pengalaman Panyesuaian atas Liabilitas	6,622,995,665	6,058,355,740
Presentase	7.40%	9.10%

b. Imbalan Balas Jasa dan Pengabdian Masa Kerja

Penyelenggaraan Program Balas Jasa didasarkan pada Peraturan Direksi No. DU.249a/KP.106/KI-08 tanggal 31 Desember 2008. Manfaat Balas Jasa berupa pembayaran jumlah lumpsum diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut. Adapun jumlah lumpsum yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan.

Adapun Pengabdian masa kerja adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 25 tahun. Imbalan diberikan berupa uang pengharagaan 1 (satu) kali THP (*Take Home Pay*), peniti emas 8 gram dan piagam penghargaan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2014 dan 2013:

	2014	2013
Aset Program	-	-
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat	26,886,213,699	23,241,787,713
Defisit Pendanaan	(26,886,213,699)	(23,241,787,713)
Kewajiban Jasa Lalu yg belum diakui	5,565,480,732	5,781,704,621
Labar/Rugi Aktuarial yg belum diakui	12,232,700,779	9,086,471,511
Biaya dibayar dimuka (Provisi)	(9,088,032,188)	(8,373,611,581)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

16. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)

Rekonsiliasi perubahan saldo Provisi 2014 dan 2013:

	2014	2013
Saldo Provisi awal tahun	8,373,611,581	7,523,439,130
Beban yang dibentuk	4,539,322,076	3,049,578,656
Imbalan yang dibayarkan	(3,824,901,469)	(2,199,426,205)
Saldo Provisi akhir tahun	9,088,032,188	8,373,591,581

Adapun beban yang dibentuk selama tahun 2014 dan 2013 terdiri dari:

	2014	2013
Beban jasa kini	1,973,524,831	1,311,941,377
Beban bunga	1,762,657,578	1,076,536,002
Amortisasi Beban Jasa Lalu	418,717,817	276,679,427
Amortisasi Laba / Rugi Aktuarial	384,421,850	384,421,850
Beban Yang Diakui	4,539,322,076	3,049,578,656

Pengalaman Penyesuaian pada Liabilitas dan Aset Program selama tahun 2013 :

	2014	2013
Pengalaman Penyesuaian pada Liabilitas	1,612,452,861	8,880,420,012
Presentase	6.00%	38.20%

c. Imbalan Cuti Besar

Perusahaan memberikan imbalan cuti besar sebesar 1 (satu) kali THP (*Take Home Pay*) yang diberikan setiap 5 tahun sekali pada saat karyawan menjalani hak cuti besar. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2014 dan 2013 :

	2014	2013
Aset Program		
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat	1,546,343,408	(1,075,874,998)
Defisit Pendanaan	1,546,343,408	(1,075,874,998)
Kewajiban Jasa Lalu yang belum diakui	-	-
Labar/Rugi Aktuarial yang belum diakui	-	-
Biaya dibayar dimuka (Provisi) Imbalan Cuti	1,546,343,408	(1,075,874,998)

Rekonsiliasi perubahan saldo Provisi selama tahun 2014 dan 2013:

	2014	2013
Saldo Provisi awal tahun	1,075,874,998	932,211,264
Beban yang dibentuk	716,437,226	793,574,615
Imbalan yang dibayarkan	(245,968,816)	(649,910,881)
Saldo Provisi akhir tahun	1,546,343,408	1,075,874,998

Adapun beban yang dibentuk selama tahun 2014 dan 2013 terdiri dari:

	2014	2013
Beban jasa kini	414,620,420	152,261,301
Beban bunga	96,828,750	16,938,023
Beban amortisasi kewajiban transisi	-	-
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	656,477,026	624,375,291
Beban Yang Diakui	1,167,926,196	793,574,615

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

16. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)**d. D P L K**

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2014 dan 2013 :

	2014	2013
Aset Program	-	-
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat	(7,132,770)	(7,179,730)
Defisit Pendanaan	(7,132,770)	(7,179,730)
Kewajiban Jasa Lalu yang belum diakui	-	-
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(5,881,987)	(2,650,334)
Biaya dibayar dimuka (Provisi)	(13,014,757)	(9,830,064)

Rekonsiliasi perubahan saldo Provisi selama tahun 2014 dan 2013 :

	2014	2013
Saldo Provisi awal tahun	-	-
Beban yang dibentuk	13,014,757	9,830,064
Imbalan yang dibayarkan yang dibayarkan	-	-
Saldo Provisi akhir tahun	13,014,757	9,830,064

Adapun beban yang dibentuk selama tahun 2014 dan 2013 terdiri dari:

	2014	2013
Beban jasa kini	2,616,845	3,964,162
Beban bunga	646,176	455,521
Biaya jasa lalu	9,751,736	5,410,381
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	-	-
Beban Yang Diakui	13,014,757	9,830,064

Asumsi Aktuarial

Perhitungan beban dan kewajiban aktuarial tersebut di atas dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Perhitungan aktuaris dilakukan dengan frekuensi setahun sekali, adapun asumsi aktuarial yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- (1) metode perhitungan yang dipergunakan : Projected Unit Credit,
- (2) tingkat bunga diskonto yang dipergunakan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah 8% p.a, dan 9% p.a.
- (3) tingkat bunga imbalan hasil investasi aset program per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah 10% p.a dan 10% p.a.
- (4) Tingkat kenaikan gaji berkala 5 % per tahun.
- (5) tabel mortalita yang dipergunakan: GAM-1971
- (6) usia pensiun 56 tahun.
- (7) jumlah pegawai peserta program imbalan di atas per 31 Desember 2014 adalah 564 orang.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

17. MODAL SAHAM

Modal saham Perusahaan per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp255.000.000.000 dan Rp45.000.000.000, seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan surat Menteri BUMN Nomor : S-539/MBU/09/2014 tanggal 17 September 2014 hal Peningkatan modal dasar, penambahan modal disetor dan perubahan anggaran dasar PT BKI (Persero) disebutkan bahwa modal dasar perseroan yang semula sebesar Rp180.000.000.000 ditingkatkan menjadi Rp600.000.000.000. Meningkatkan penempatan saham sebanyak 210.000 saham, masing-masing saham dengan nilai Rp1.000.000 sehingga seluruhnya seharga 210.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Dengan adanya penambahan modal disetor tersebut, maka modal ditempatkan/ disetor PT.BKI (Persero) yang semula sebesar Rp45.000.000.000 menjadi sebesar Rp255.000.000.000. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PT BKI (Persero) untuk disesuaikan dengan peningkatan modal dasar. Penambahan Modal dasar sebesar Rp 210.000.000.000 di ambil dari kapitalisasi sebagian Cadangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2013.

18. PEMBAGIAN LABA

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Keputusan RUPS Nomor : RIS-04/DU. MBU/2014 pemegang saham telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun 2014, sehingga penggunaan laba bersih tahun buku 2013 dan 2012 sebagai berikut:

	Pembagian laba tahun buku 2013	Pembagian laba tahun buku 2012
Pembagian dividen	15,952,277,600	10,115,732,970
Penyisihan cadangan umum	89,162,552,143	57,322,486,832
	105,114,829,743	67,438,219,802

Saldo cadangan umum per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Saldo awal	177,249,593,141	119,927,106,309
Pemindahan dari laba	89,162,552,143	57,322,486,832
Dikapitalisasikan menjadi Modal disetor	(210,000,000,000)	-
Saldo akhir	56,412,145,284	177,249,593,141

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

19. PENDAPATAN JASA

	2014	2013
Jasa klasifikasi	482,690,602,184	363,468,731,342
Jasa komersil	286,534,711,896	212,958,252,684
Bagian partner kerjasama	(12,565,086,058)	(21,229,810,322)
Jumlah	756,660,228,022	555,197,173,704

Rincian pendapatan jasa klasifikasi, jasa konsultansi dan supervisi dan bagian partner kerjasama untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Jasa Klasifikasi

	2014	2013
a. Klas tunggal (Single Class)		
<u>Klas BKI (Dalam Negeri) oleh BKI</u>		
- Penerimaan klas	150,214,893,437	141,507,084,174
- Mempertahankan klas	143,124,947,669	97,106,787,836
- Material dan komponen	30,320,439,143	27,710,266,553
- Statutoria	70,175,133,777	46,759,845,674
	393,835,414,026	313,083,984,237
<u>Klas BKI (Luar Negeri) oleh BKI</u>		
- Penerimaan klas	5,334,370,610	5,901,852,172
- Mempertahankan Klas	7,515,781,040	5,101,220,820
- Material dan komponen	3,098,301,102	2,897,998,390
- Statutoria	5,634,907,155	5,008,796,964
	21,583,359,907	18,909,868,346
Jumlah Klas tunggal BKI	415,418,773,933	331,993,852,583

b. Kerjasama dengan klas asing

	2014	2013
<u>Klas BKI (Luar Negeri) oleh asing</u>		
- Mempertahankan klas	29,085,000	26,060,000
- Statutoria	9,025,000	5,665,000
	38,110,000	31,725,000
<u>Klas ganda / dual class (Dalam Negeri)</u>		
- Penerimaan klas	19,258,013,529	9,775,432,687
- Mempertahankan klas	5,279,568,853	4,318,702,970
- Material dan komponen	18,016,329,952	264,713,520
- Statutoria	3,226,823,026	2,053,143,266
	45,780,735,360	16,411,992,443
<u>Klas ganda / dual class (Luar Negeri)</u>		
- Penerimaan klas	12,847,748,926	10,950,984,982
- Mempertahankan klas	6,616,134,711	2,282,330,988
- Statutoria	1,989,099,254	1,784,995,346
	21,452,982,891	15,018,311,316
<u>Klas asing di Indonesia</u>		
- Statutoria	-	12,850,000
	-	12,850,000
Jumlah kerjasama dengan klas asing	67,271,828,251	31,474,878,759
Jumlah pendapatan jasa klasifikasi	482,690,602,184	363,468,731,342

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

19. PENDAPATAN JASA (lanjutan)**B. Pendapatan Jasa Komersil**

	2014	2013
Bidang pengujian	90,103,255,182	64,963,926,398
Bidang inspeksi	110,695,593,148	67,400,513,953
Bidang rekayasa teknik	71,878,780,374	7,913,415,531
Bidang jasa marine	13,714,083,192	69,365,548,842
Lain-lain	143,000,000	3,314,847,960
Jumlah	286,534,711,896	212,958,252,684

C. Bagian Partner Kerjasama

	2014	2013
Kerjasama klas tunggal (<i>single class</i>)	-	-
Kerjasama klas ganda (<i>dual class</i>)	7,998,011,968	-
Kerjasama komersil	4,567,074,090	21,229,810,322
Jumlah	12,565,086,058	21,229,810,322

Bagian partner kerjasama adalah bagian pendapatan yang diberikan kepada mitra kerja asing dan lokal atas hasil kerjasama survey dan inspeksi

20. BEBAN JASA

	2014	2013
Beban perjalanan dinas survey	69,786,968,072	43,586,375,852
Beban material	15,662,776,865	7,284,613,168
Beban tenaga kerja proyek	43,771,418,595	22,645,213,544
Beban mobilisasi dan demobilisasi	14,767,460,043	8,861,157,562
Beban komitmen dan rekayasa proyek	19,984,553,389	19,010,360,640
Beban pelaporan	3,818,863,372	2,186,015,337
Jumlah	167,792,040,336	103,573,736,103

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

21. BEBAN PEMASARAN

	2014	2013
Beban pemasaran	5,691,741,628	4,825,770,700
Beban humas	1,969,941,394	1,667,834,831
Jumlah	7,661,683,022	6,493,605,531

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2014	2013
Beban direksi & komisaris	12,025,419,822	12,341,781,192
Beban personel	246,107,831,778	199,626,962,345
Beban fasilitas kerja	35,495,965,223	25,405,147,424
Beban pendidikan dan riset	12,520,743,847	7,762,758,714
Beban perjalanan dinas	9,117,619,020	6,071,737,468
Beban pengembangan operasi	20,783,844,331	20,139,871,524
Beban audit	1,456,083,143	1,158,364,422
Beban pemeliharaan	10,488,847,324	7,058,814,868
Beban penyusutan	14,288,417,489	9,102,614,326
Beban penyisihan piutang usaha	9,259,682,487	7,443,170,720
Beban provisi imbalan jangka panjang karyawan	12,971,297,466	9,453,441,214
Beban PKBL	2,000,000,000	3,400,000,000
Jumlah	386,515,751,930	308,964,664,217

Beban personel merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan pembayaran kepada karyawan baik di Kantor Pusat maupun cabang-cabang. Biaya personel tersebut terdiri dari: gaji dasar, gaji merit, gaji pangkat, tunjangan kesejahteraan, honorarium, tunjangan pengobatan, tunjangan cuti, tunjangan perumahan, asuransi dan tunjangan PPh pasal 21, tunjangan pendidikan, tunjangan uang makan, tunjangan transport dan tunjangan telephone. Sedangkan beban Direksi dan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, tunjangan listrik/PAM, uang cuti, asuransi, Tantiem, tunjangan komunikasi, tunjangan operasional dan fasilitas kendaraan. Pembebanan tersebut adalah sesuai dengan RKAP tahun 2014 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT BKI (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2014 tanggal 19 Desember 2013.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

23. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN

	2014	2013
Pendapatan lain-lain		
Pendapatan bunga deposito bersih	3,931,159,826	2,714,615,891
Selisih kurs laba	4,101,075,327	8,069,983,643
Jasa Giro	652,572,870	272,817,503
Revisi pendapatan jasa klasifikasi	356,888,917	30,196,800
Laba Penjualan Aset	2,357,919,928	-
Lain-lain Pendapatan	573,575,056	610,141,538
Jumlah	11,973,191,924	11,697,755,375
Beban lain-lain		
Beban bunga	73,564,551	25,041,171
Selisih kurs rugi	4,486,417,399	1,520,431,321
Revisi Pendapatan Jasa Klasifikasi	44,807,150	31,046,400
Revisi Pendapatan Jasa Komersil	1,053,257,464	415,967,148
Denda pajak kurang bayar	163,153,112	230,025,339
Beban bank	871,183,355	360,925,161
Beban denda	38,053,140	38,719,550
Beban duka	124,034,400	95,345,000
Lain-lain Beban	332,555,486	160,832,456
Jumlah	7,187,026,057	2,878,333,546

Pendapatan Komprehensif Lainnya

Akun ini berasal dari laba kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing sebagai berikut :

	TAHUN 2014		
	USD	SGD	LABA KURS
- Piutang	2,331,851	33,707,646	1,348,305,858
- Kas dan Setara Kas	-	1,175,491	695,274,218
- Deposit	-	49,339	185,667,197
- Hutang	-	120,675	(276,767,788)
			1,952,479,485
- Beban Pajak 25%			(488,119,000)
Pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak			1,464,360,485
	TAHUN 2013		
	USD	SGD	LABA KURS
- Piutang	154,827.00	1,226,757	1,498,377,098
- Kas dan Setara Kas	-	146,830	77,031,230
- Deposit	-	36,858	69,508,479
			1,644,916,807
- Beban Pajak 25%			411,229,000
Pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak			2,056,145,807

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

24. MANAJEMEN RISIKO FINANSIAL

Dari kegiatan usaha yang dijalankannya, Perusahaan menghadapi risiko-risiko keuangan yang meliputi:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Pasar

Pengelolaan risiko-risiko tersebut saat ini dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko di Kantor Pusat dengan mengacu limit-limit risiko yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Penjabaran mengenai kebijakan pengelolaan ketiga jenis risiko tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang akan diderita Perusahaan apabila pelanggan gagal melunasi baik sebagian maupun seluruh kewajibannya kepada Perusahaan. Terdapat tiga faktor utama yang dapat menyebabkan pihak pelanggan mengalami gagal bayar yaitu kondisi makro ekonomi atau kondisi usaha pelanggan yang kurang baik, kesulitan keuangan yang dialami pelanggan, atau karakter/itikad baik pelanggan.

Berdasarkan pengalaman secara empiris, eksposur risiko kredit yang signifikan terdapat pada pos Piutang Usaha. Besarnya eksposur risiko kredit Piutang Usaha adalah sebagaimana yang tertera di Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai nilai tercatat Piutang Usaha (Catatan 5).

Sesuai arahan yang tertera dalam RKAP 2014 dan 2013, kebijakan yang ditetapkan Manajemen Perusahaan dalam membatasi eksposur risiko kredit tersebut adalah dengan menetapkan maksimal *Collection Period* piutang usaha untuk tahun 2014 dan 2013 adalah masing-masing 66 hari.

Dalam realisasinya, *collection period* piutang usaha selama tahun 2014 dan 2013 tercatat mencapai 110,46 hari dan 100,62 hari. Oleh karena itu, dalam tahun 2014 dan 2013, Perusahaan meningkatkan pencadangan untuk mengantisipasi timbulnya kerugian tidak tertagihnya Piutang Usaha tersebut. Sebagaimana tertera dalam Catatan No. 5 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menambah cadangan kerugian penurunan nilai piutang selama tahun 2014 sebesar Rp9,259,682,487 dan tahun 2013 sebesar Rp6,988,945,218.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Perusahaan untuk melunasi kewajiban keuangannya kepada pihak ekstern. Risiko ini timbul akibat ketidaksesuaian periode penerimaan kas dari penagihan piutang usaha dan periode jatuh tempo pembayaran kepada pihak ekstern (*maturity mismatch*). Risiko likuiditas berkaitan erat dengan risiko kredit, yaitu semakin panjang *collection period* atas piutang usaha maka Perusahaan akan semakin rentan mengalami risiko likuiditas.

Untuk menggambarkan eksposur risiko likuiditas per 31 Desember 2014, berikut ini diuraikan periode jatuh tempo liabilitas jangka pendek selama periode 12 bulan ke depan yaitu sebagai berikut:

	Periode Jatuh Tempo Selama 2014			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Utang Usaha	8,235,738,209	-	-	-
Utang Lain-lain	18,355,020,060	13,500,002,618	-	-
Utang Biaya	26,855,600,000	5,031,152,889	-	-
Utang Pajak	54,932,661,331	4,727,000,000	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	14,226,000	-	-	-

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

24. MANAJEMEN RISIKO FINANSIAL (lanjutan)**b. Risiko Likuiditas (lanjutan)**

Sesuai arahan yang tertera dalam RKAP 2014 dan 2013, kebijakan yang ditetapkan Manajemen Perusahaan dalam membatasi eksposur risiko likuiditas tersebut adalah dengan menjaga pencapaian *Cash Ratio* adalah masing-masing 220,61% dan 73,69% dari jumlah liabilitas jangka pendek.

Dalam realisasinya, *cash ratio* per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing mencapai 143,34% dan 166,84%.

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya laba/rugi kurs akibat pertukaran mata uang asing yaitu USD atau SGD ke dalam Rupiah dan dari selisih penilaian kurs penutup saldo asset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

Eksposur risiko pasar dari nilai tukar mata uang asing yang dimiliki Perusahaan pada posisi 31 Desember 2014 dan 2013 dapat digambarkan sebagai berikut:

31 Desember 2014				
	Dolar Amerika Serikat	Dolar Singapura	Euro	Setara Rupiah
<u>Aset</u>				
Kas dan setara kas	-	120,674.50	-	1,135,064,347
Piutang usaha	332,029.50	786,815.79	-	7,400,789,321
	<u>332,029.50</u>	<u>907,490.29</u>	<u>-</u>	<u>8,535,853,668</u>
<u>Kewajiban</u>	660,232.34	120,674.50	-	9,370,802,556
Jumlah aset/(kewajiban) bersih	<u>(328,202.84)</u>	<u>786,815.79</u>	<u>-</u>	<u>(834,948,888)</u>
31 Desember 2013				
	Dolar Amerika Serikat	Dolar Singapura	Euro	Setara Rupiah
<u>Aset</u>				
Kas dan setara kas	466,417.89	859,726.22	-	13,962,611,707
Piutang usaha	1,769,088.81	1,382,736.70	-	34,876,412,453
	<u>2,235,506.70</u>	<u>2,242,462.92</u>	<u>-</u>	<u>48,839,024,160</u>
<u>Kewajiban</u>	169,039.67	-	-	2,060,424,512
Jumlah aset bersih	<u>2,066,467.03</u>	<u>2,242,462.92</u>	<u>-</u>	<u>46,778,599,648</u>

Sebagaimana tertera pada Catatan No. 23 atas laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013, Besarnya laba/rugi kurs yang terjadi adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Laba Kurs	4,101,075,327	8,069,983,643
Rugi Kurs	(4,486,417,399)	(1,520,431,321)
Laba Neto	(385,342,072)	6,549,552,322

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

25. MANAJEMEN PERMODALAN

Manajemen Perusahaan melakukan pengelolaan kecukupan permodalan dengan tujuan menjaga kemampuan Perusahaan dalam menjamin kelangsungan usahanya sehingga Perusahaan dapat memenuhi seluruh komitmennya baik kepada Pemegang Saham, Fiskus, rekanan penyedia barang/jasa, maupun karyawan.

Sesuai arahan RKAP 2014 dan 2013, Perusahaan terus berupaya menjaga rasio kecukupan modal dengan mengacu rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset yang masing-masing ditargetkan 86,59% dan 83,18%. Rasio tersebut dihitung sebagai perbandingan antara jumlah seluruh aset (di luar aset yang belum jelas statusnya) dibagi dengan jumlah modal sendiri (di luar dana yang belum jelas statusnya).

Dalam realisasinya per 31 Desember 2014 dan 2013, rasio modal terhadap total asset mencapai 52,15% dan 81,04%.

26. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Perusahaan memperoleh fasilitas garansi bank dari Bank Mandiri Kantor Pusat berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Garansi Bank dengan No. KP-COD/011/PGB/2004 tanggal 23 Juni 2004. Perjanjian ini telah diperbaharui beberapa kali dan terakhir dengan Addendum XI tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan peningkatan plafond Fasilitas Garansi Bank sesuai surat bank Mandiri No. TOP.CRO/CLA.316/ADD/2014 tanggal 20 Juni 2014 dan mengacu pada surat bank Mandiri No: IBG.IB.1/SPPK/D04/021/2014 tanggal 18 Juni 2014. Addendum ini berlaku selama 1 tahun sampai dengan tanggal 23 Juni 2015. Dengan perjanjian ini perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang tunai untuk penerbitan Garansi Bank. Besarnya plafond sebesar Rp30.000.000.000 dari plafond sebelumnya Rp15.000.000.000. Tujuan penggunaan adalah penerbitan tender bond, *Advance payment Bond*, *Performance Bond*, dan *Retensi Bond*.

Fasilitas ini dijamin oleh: piutang usaha dan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Nomor: 2131/Kebon Bawang yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, kecamatan Tanjung Priok. Bidang tanah dan bangunan ini telah dibebani dengan Hak Tanggungan dengan nilai total sebesar Rp30.000.000.000.

Tujuan penggunaan: Penerbitan tender bond (untuk mengikuti tender), *advance payment bond*, *performance bond* (atas dasar kontrak kerja atau SPK), *retensi bond* (surat penegasan dari *bowheer* bahwa proyek telah memasuki masa retensi). Jumlah Fasilitas Bank Garansi yang dipergunakan sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp23.966.619.286.

27. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI

	2014	2013
<u>Utang Lain-lain</u>		
Koperasi BKI	240,705,799	-
Jumlah utang lain-lain	31,855,022,678	-
Prosentase terhadap Utang Lain-lain	75.56%	0.00%
<u>Beban Jasa dan Beban Usaha</u>		
Koperasi BKI (Pembayaran sewa kendaraan)	4,546,924,093	988,684,000
Prosentase terhadap jumlah beban sewa	81.23%	24.00%

28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, tidak terdapat peristiwa tanggal neraca yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan.

29. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan setuju untuk diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2015.



PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)

Jl. Yos Sudarso Kav. 38-40
Tanjung Priok - Jakarta 14320
Telp. 62-21-4301017
Fax. 62-21-43936175
www.bki.co.id